



KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2018
(Audited)

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diterima secara umum. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 (dua) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal adalah salah satu entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Laporan Operasional (LO); Neraca; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); Laporan Arus Kas (LAK); dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan, yang mencakup unsur pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan, yang mencakup unsur pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit-LO. Neraca menyajikan aset, utang, dan ekuitas dana yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Sedangkan Laporan Arus Kas menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan, arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan



arus kas dari aktivitas non anggaran yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.

Guna menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan, perlu dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal yang meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengikuti laporan tersebut adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal selama satu periode Tahun Anggaran 2018.

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna, berupa posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan (Tahun Anggaran 2018).

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133);
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 4400);
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5584) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuhbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
 - 16) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4575);
 - 17) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 - 18) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
 - 19) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607);
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 24) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 25) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 26) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
- 27) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 28) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 29) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

- Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 - 31) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/ 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
 - 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 - 33) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/ 2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1.974);
 - 34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
 - 35) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 92);
 - 36) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 51) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 80);



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

- 37) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 81);
- 38) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 110);
- 39) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 13);
- 40) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 6);
- 41) Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 57 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 57);
- 42) Peraturan Bupati Tegal Nomor 18 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 18) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 58 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 18 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 58);
- 43) Peraturan Bupati Tegal Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 60);
- 44) Peraturan Bupati Tegal Nomor 93 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 93);



- 45) Peraturan Bupati Tegal Nomor 60 tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 60);

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 memuat penjelasan dan atau catatan atas laporan keuangan dalam periode Tahun Anggaran 2018 yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I berisi Pendahuluan, yang menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan;
2. Bab II berisi Ekonomi Makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD, yang menyajikan diskripsi ekonomi makro/ekonomi regional, kebijakan keuangan, dan indikator pencapaian target kinerja APBD;
3. Bab III berisi Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, yang menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;
4. Bab IV berisi Kebijakan Akuntansi, yang menjelaskan tentang entitas pelaporan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP, serta kebijakan akuntansi tertentu;
5. Bab V berisi Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan, yang merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Laporan Arus Kas (LAK);
6. Bab VI, berisi Penjelasan Atas Informasi-informasi non keuangan, yang menjelaskan tentang gambaran umum daerah;
7. Bab VII, berisi Penutup.



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

PDRB Kabupaten Tegal tahun 2017 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 30.044.412.28 juta dan PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2017 mencapai Rp. 22.371.534,53 juta. Struktur ekonomi Kabupaten Tegal didominasi oleh tiga sektor utama yaitu: sektor pertanian, sektor industri dan sektor perdagangan. Ketiga sektor tersebut merupakan sektor riil yang sangat mempengaruhi perekonomian Kabupaten Tegal, dan bisa dilihat pengaruhnya pada penggunaan lahan serta penduduk berdasar mata pencaharian.

Sektor industri pengolahan berkembang dengan adanya kluster logam di Kecamatan Talang dan Adiwerna utamanya meliputi komponen kapal, komponen alat mesin pertanian, komponen otomotif, komponen alat berat, dan peralatan rumah tangga. Produk IKM Kabupaten Tegal telah banyak dipakai di banyak daerah di Indonesia, bahkan di beberapa negara tetangga. Industri pengolahan makanan juga berkembang dengan baik di Kabupaten Tegal utamanya minuman dan makanan kecil khas Kabupaten Tegal diantaranya adalah teh, tahu aci, pilus, anthor, olos, dan kacang bogares. Kuliner lain selain makanan kecil adalah sate kambing muda yang terkenal gurih dan lezat danteh poci yang tidak dapat dipisahkan dari kedua kuliner khas Tegal di atas dan sangat mendukung perkembangan industri berbasis makanan ini. Industri konfeksi juga menyumbang kontribusi yang cukup besar utamanya industri batik tegalan sebagai identitas budaya khas Kabupaten Tegal. Upaya yang telah dilakukan diantaranya adalah peningkatan kualitas batik, introduksi pewarna alami, pelatihan manajemen, promosi melalui pameran, dan kebijakan untuk mengenakan batik tegalan sebagai pakaian resmi daerah yang dikenakan setiap hari Kamis.

Secara umum, industri pengolahan merupakan kontributor yang signifikan karena selain sumbangsinya yang besar pada perekonomian Kabupaten Tegal, sifat industrinya adalah padat karya sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Selain itu, kontribusinya relatif stabil – hampir mencapai 30% dari total perekonomian wilayah - serta tren pertumbuhannya juga cenderung meningkat selama lima tahun terakhir. Sebagai sektor ekonomi yang memiliki potensi bagus serta *backward* dan *forward linkage* yang kuat, sudah seharusnya sektor industri pengolahan dijadikan prioritas pembangunan. Perkembangan yang terjadi pada sektor ini akan menarik sektor ekstraktif untuk maju dan mendorong sektor *tersier* untuk berkembang.

Kontribusi sektor perdagangan juga sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya *outlet* penjualan di sepanjang jalur regional yang ada. Berkembangnya sektor ini dilatarbelakangi dengan berkembangnya sektor lain,



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

mengingat perkembangan perdagangan merupakan muara dari sistem produksi. Kawasan pusat ekonomi di Kabupaten Tegal adalah Kecamatan Adiwerna dan Slawi. Pusat-pusat perdagangan muncul dengan pesat serta membentuk satu koridor ekonomi yang utuh. Hampir semua titik penjualan hasil produksi di Kabupaten Tegal berada di area Adiwerna dan Slawi.

Sektor perdagangan juga mengalami tren yang menaik dari tahun ke tahun, serta kontribusinya juga mengalami peningkatan. Selain karena lokasi Kabupaten Tegal yang relatif baik, perkembangan sektor ini dipengaruhi perkembangan kawasan perkotaan kecamatan, dan tumbuhnya sektor industri pengolahan. Peningkatan aktifitas sektor perdagangan dan industri memberi pengaruh terhadap ketahanan perekonomian daerah. Hal tersebut dibuktikan pada saat kondisi makro ekonomi Indonesia yang bergejolak pada tahun 2015 tidak terlalu mempengaruhi kondisi makro ekonomi Kabupaten Tegal. Perkembangan kawasan perkotaan di kecamatan juga memiliki pengaruh yang signifikan dimana perkembangan fisik dan ekonomi tidak lagi terpusat pada kawasan Slawi-Adiwerna, tetapi juga pada kawasan perkotaan kecamatan, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan lokal untuk kawasan sekitarnya. Selain itu, pertumbuhan sektor industri pengolahan yang bagus akan secara langsung mendorong perkembangan sektor perdagangan. Setiap barang yang diproduksi pasti akan dijual, dan setiap penjualan akan meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan.

Sementara, kontribusi sektor pertanian juga relatif besar meskipun tidak terlalu signifikan. Meskipun demikian, sektor ini tetap harus menjadi perhatian karena merupakan sektor yang sangat strategis. Kondisi ketahanan pangan Kabupaten Tegal sangat bergantung pada performa sektor pertanian. Selain itu, jumlah masyarakat yang bekerja pada sektor ini sangat besar dan merupakan kontributor terbesar pada jenis pekerjaan yang ditekuni masyarakat Kabupaten Tegal. Sayangnya, perkembangan sektor pertanian cenderung mengalami penurunan. Hal ini karena fokus usaha di sektor ini masih berkuat pada cara ekstraktif. Cara ini sangat bergantung pada kondisi alam, dimana ketika hasil yang didapat berkualitas bagus maka sektor pertanian akan tumbuh. Sebaliknya, jika hasil yang didapat berkualitas kurang baik, maka sektor pertanian akan cenderung turun. Di samping itu, luas lahan pertanian yang semakin berkurang (termasuk infrastruktur pendukungnya) juga ikut mendorong turunnya kontribusi sektor pertanian. Kedua hal tersebut menjadikan sektor pertanian hanya menghasilkan nilai tambah yang kecil dalam perekonomian. Kondisi ini diperburuk dengan lemahnya industri pengolahan di Kabupaten Tegal yang berbasis pada produk pertanian yang dihasilkan dari daerah sendiri. Industri pengolahan makanan yang memiliki kontribusi besar yaitu industri teh, mengambil bahan baku bukan dari Kabupaten Tegal. Industri pengolahan makanan kecil juga kebanyakan berbahan dasar terigu yang merupakan bahan impor. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tegal perlu mendorong industrialisasi pertanian yang berbasis produk pertanian di Kabupaten Tegal. Jika hal ini dapat



dilakukan dengan baik, maka sektor industri akan berkembang, dan sektor perdagangan juga akan ikut terdorong.

2.2. Kebijakan Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal tahun 2018 disusun berdasarkan pada Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tegal tahun 2018 yang merupakan nota kesepakatan antara Bupati Tegal dan DPRD Kabupaten Tegal Nomor : $\frac{900/16/4182/2017}{170/18/2017}$ tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018, yang diperbaharui dengan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Tegal tahun 2018 yang merupakan nota kesepakatan antara Bupati Tegal dan DPRD Kabupaten Tegal Nomor: $\frac{900/16/3985/2018}{170/09/2018}$ tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Tegal Tahun 2018 merupakan dokumen kebijakan daerah yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum, memuat kondisi ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan dan strategi pencapaiannya yang disepakati sebagai pedoman penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2018. KUA disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2018 yang merupakan dokumen rencana kerja tahunan daerah yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2019.

2.2.1 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2018, adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Umum Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- 1) Meningkatkan target penerimaan Pendapatan Pajak Daerah antara lain melalui:
 1. Pajak Hotel, di Kota Slawi sudah berdiri Hotel Bintang 3 dan tingkat hunian kamar hotel mulai dari Hotel Bintang 3 sampai dengan Hotel Melati terutama di lokasi OW Guci setiap akhir minggu semakin tinggi yang dipengaruhi adanya kemudahan akses jalan tol sehingga banyak wisatawan dari Jakarta yang berlibur di Kabupaten Tegal yang tentunya diperkirakan akan meningkatkan pendapatan Pajak Daerah dari Pajak Hotel;
 2. Peningkatan Pajak Restoran, dengan perhitungan belanja makan minum dari APBD Kabupaten Tegal Tahun 2018 yang sekitar



- Rp. 15 milyar, maka bisa didapat Pajak Restoran dari penyedia jasa catering sebesar 10% atau sebesar Rp. 1,5 Milyar, termasuk perlu upaya intensifikasi pendapatan Pajak Restoran dari Restoran dan Rumah Makan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tegal;
3. Peningkatan Pajak Reklame, dengan terbangunnya beberapa ruang terbuka hijau di Kota Kecamatan dan semakin banyaknya terpasang spot spot untuk pemasangan reklame, dan terbangunnya dua Videotron di Kota Slawi serta adanya penyelenggaraan pesta demokrasi berupa Pemilihan Kepala Daerah di Tahun 2018 maka penerimaan dari Pajak Reklame diperkirakan akan meningkat;
 4. Pajak Bumi dan Bangunan, masih ada pengalihan piutang pajak dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Tegal dari Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2012 yang belum tertagih, perlu ada upaya dari instansi yang terkait agar dapat meningkatkan penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan, selain itu juga dengan naiknya NJOP Tanah di beberapa wilayah yang berpotensi di Kabupaten Tegal dan peralihan status tanah dari tanah kosong menjadi tanah dengan bangunan, tentunya akan meningkatkan pula penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan;
 5. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), peningkatan penerimaan diperkirakan dari naiknya NJOP Tanah PBB dan intensitas peralihan hak atas tanah dan bangunan.
- 2) Target penerimaan Pendapatan Pajak Daerah dari Pajak Minerba Bukan Logam dan Batuan di Tahun 2018 diperkirakan menurun disebabkan sudah selesainya pekerjaan proyek Jalan Tol Trans Jawa yang kebutuhannya selama ini disuplai dari tanah urug yang berasal dari Kabupaten Tegal.
- 3) Pendapatan Retribusi Daerah ada yang mengalami peningkatan tetapi ada pula yang mengalami penurunan yaitu :
1. Retribusi Pasar Los, dengan adanya ketentuan baru nilai retribusi pasar los yang dikenakan kepada pedagang pasar, maka diperkirakan ada peningkatan penerimaan pendapatan;
 2. Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi LRA tidak lagi dikenakan retribusi, sehingga penerimaan dari retribusi pos ini tidak ada;
 3. Retribusi Tempat Rekreasi diperkirakan akan meningkat karena ada kenaikan tarif masuk obyek wisata;
 4. Retribusi Perizinan tertentu untuk Izin Gangguan Tepat



Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi tidak lagi dikenakan, maka tidak ada lagi penerimaan pendapatan dari pos retribusi ini.

- 4) Mengoptimalkan penerimaan PAD melalui perolehan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Badan Usaha Milik Daerah yaitu PDAM, BPR-BKK dan Bank Jateng berupa perolehan laba maupun penyertaan modal karena adanya penambahan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah.
 - 5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dari Pendapatan BLUD diperkirakan akan meningkat dengan pertimbangan semakin tersedia dan terlengkapi sarana dan prasarana di RSUD dan Puskesmas-Puskemas.
 - 6) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyediaan barang publik yang mampu meningkatkan kapasitas masyarakat melalui penyempurnaan sistem pemungutan, peningkatan profesionalisme pegawai, dan lain-lain.
 - 7) Penguatan sistem manajemen dan koordinasi sinergis antar bidang SKPD yang berwenang melaksanakan pemungutan pendapatan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah.
 - 8) Mengalokasikan tambahan penerimaan daerah berupa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan mengoptimalkan manajemen kas daerah dan pengelolaan aset-aset daerah yang berpotensi memberikan sumber-sumber penerimaan bagi pendapatan asli daerah.
- b. Kebijakan Umum Dana Perimbangan
- 1) Memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana yang tercantum dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2018, bahwa untuk penguatan kualitas desentralisasi fiskal dalam jangka menengah akan ditempuh dalam beberapa langkah utama, antara lain.
 1. Penyempurnaan payung hukum pelaksanaan desentralisasi fiskal dengan melakukan revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah melalui Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga perlu dilakukan untuk memperkuat *local taxing power*.
 2. Memperkuat Dana Insentif Daerah (DID) sebagai instrumen insentif dalam sistem transfer, yaitu diberikan sebagai *reward*



atas pencapaian kinerja daerah di bidang tata kelola keuangan daerah, pencapaian pembangunan di bidang tertentu, serta inovasi dan keunggulan spesifik yang dimiliki oleh daerah dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat.

3. Meningkatkan kualitas belanja APBD dengan mengatur penggunaan sebagian DTU (*earmarking*) untuk belanja infrastruktur yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan pelayanan publik antar daerah, meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja pegawai, menerbitkan peraturan tentang standar biaya yang berlaku bagi pusat dan daerah, mendorong penyerapan belanja daerah dan mengurangi penumpukan dana daerah di perbankan melalui kebijakan konversi Dana Bagi Hasil (DBH) dan/atau Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi bentuk non tunai.
- 2) Mempedomani Arah Kebijakan Fiskal Pemerintah Pusat terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yaitu:
 1. Implementasi kebijakan desentralisasi fiskal utamanya ditujukan untuk mendorong perbaikan pelayanan dasar publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 2. Kebijakan TKDD diarahkan pada sinkronisasi perencanaan / penganggaran TKDD agar sejalan dengan perencanaan / penganggaran K/L dan perbaikan mekanisme penyaluran TKDD berdasarkan pada kinerja pelaksanaan di daerah. Di samping itu, penggunaan sebagian Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan untuk belanja infrastruktur yang berorientasi pada pembangunan fasilitas layanan publik dan ekonomi, pengurangan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja, dan pengurangan kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah. Sedangkan Pengalokasian Dana Transfer Khusus (DTK) diarahkan untuk percepatan peningkatan pelayanan dasar publik dan pencapaian prioritas nasional, serta afirmasi kepada daerah tertinggal dan perbatasan.
 3. Kebijakan penguatan pelaksanaan desentralisasi fiskal tahun 2018 akan dilakukan melalui peningkatan alokasi TKDD sesuai kemampuan keuangan negara yang diikuti dengan perbaikan distribusi dan peningkatan kualitas belanja di daerah.
 4. Penguatan pelaksanaan desentralisasi fiskal merupakan hal penting sebagai kebijakan alokasi TKDD tahun 2018 karena memiliki peran strategis dalam mengurangi ketimpangan fiskal vertikal (pusat-daerah) dan horizontal (antar daerah), mendorong



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

peningkatan kemandirian fiskal daerah dalam kerangka negara kesatuan, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mengurangi ketimpangan pelayanan publik antar daerah, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3) Mempedomani pokok-pokok kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2018:

1. *Pertama*, meningkatkan alokasi TKDD secara proporsional serta meningkatkan sinkronisasi perencanaan/ penganggaran alokasi TKDD dengan perencanaan/ penganggaran alokasi belanja K/L.

2. *Kedua*, memperkuat implementasi kebijakan Dana Transfer Umum (DTU) dalam mendanai kewenangan desentralisasi, dengan:

(a) mengoptimalkan alokasi, penyaluran, dan penggunaan DBH, serta penyelesaian kurang/lebihbayar DBH;

(b) pagu DAU Nasional bersifat tidak final mengikuti dinamika PDN neto, menyempurnakan formulasi perhitungan PDN neto agar lebih mencerminkan kapasitas PDN yang sebenarnya, mengalokasikan DAU dengan memperhitungkan pengalihan kewenangan antar tingkat pemerintahan, dan memberikan informasi alokasi DAU kepada daerah kepulauan, tertinggal, dan perbatasan;

(c) melanjutkan pengaturan penggunaan 25 persen DTU untuk belanja infrastruktur, yang berupa belanja modal dan belanja pemeliharaan non aparatur, sehingga fokus pada belanja infrastruktur yang berorientasi pada peningkatan kuantitas dan kualitas layanan publik guna meningkatkan perekonomian daerah, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesempatan kerja, dan mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah.

3. *Ketiga*, memperkuat implementasi DTK dalam mengurangi kesenjangan layanan public antar daerah melalui pendanaan kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang selaras dengan prioritas nasional, serta afirmasi kepada daerah tertinggal, kepulauan dan perbatasan antarnegara, diantaranya melalui:

(a) meningkatkan alokasi DTK dalam rangka mempercepat penyediaan infrastruktur dasar dan pencapaian standard pelayanan minimal;

(b) penyempurnaan dan *refocusing* bidang/sub bidang DAK



Fisik agar lebih fokus pada upaya mengatasi ketimpangan layanan publik antardaerah dan pengalokasian DAK Fisik berdasarkan proposal dari daerah;

- (c) peningkatan kualitas DAK Non Fisik melalui penerapan *performance based* untuk seluruh jenis DAK Non Fisik, peningkatan efektivitas pemantauan atas penggunaan, dan peningkatan akurasi data dasardan *unit cost* pengalokasian DAK Non Fisik;
 - (d) peningkatan kualitas DAK Non Fisik melalui penerapan *performance based* untuk seluruh jenis DAK Non Fisik, peningkatan efektivitas pemantauan atas penggunaan, dan peningkatan akurasi data dasar dan *unit cost* pengalokasian DAK Non Fisik;
 - (e) penguatan penyaluran DTK berdasarkan kinerja penyerapan dan pencapaian *output*.
4. *Keempat*, melakukan penguatan DID sebagai instrument insentif dalam TKDD, melalui peningkatan alokasi dan penyempurnaan kriteria DID dengan berdasarkan pada prestasi daerah, yang dihubungkan dengan penilaian atas inovasi, kreativitas, keunggulan spesifik dan output/outcome yang dihasilkan, dalam bentuk kategori tertentu antara lain di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
5. *Kelima*, distribusi Dana Desa dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan. *Ketujuh*, penguatan Dana Desa sebagai instrumen peningkatan dan pemerataan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan.
- c. Kebijakan Umum Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- 1) Mengupayakan adanya penerimaan dana hibah dari pemerintah pusat sebagai sumber penerimaan daerah.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk upaya penjaminan ketersediaan penerimaan sumber-sumber dana penyesuaian berupa alokasi dana pendidikan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Tunjangan Profesi Guru.
 - 3) Melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi sebagai upaya penjaminan ketersediaan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi dan dana bantuan keuangan dari provinsi.

2.2.2 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan,



akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap OPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan umum belanja daerah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Umum Belanja Tidak Langsung

Struktur Belanja Daerah adalah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kebijakan umum untuk Belanja Tidak Langsung adalah sebagai berikut :

a). Belanja Pegawai

Belanja pegawai diprioritaskan untuk pemenuhan gaji PNS dan tunjangan PNS.

b). Belanja Hibah

Belanja hibah diprioritaskan untuk pencairan dana cadangan Pilkada, bantuan pada lembaga pendidikan swasta, dan bantuan kepada organisasi sosial kemasyarakatan guna mendukung Misi 3 RPJMD yaitu Mewujudkan kehidupan paseduluran dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

c). Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Madrasah dan TPQ dalam bentuk tambahan kesejahteraan untuk pendidik.

d). Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes

Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes



diprioritaskan untuk mendukung kelancaran tugas Pemerintahan Desa.

e). Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota, Pemdes dan Parpol

1) Bantuan Keuangan Umum, diprioritaskan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pengembangan infrastruktur fisik dan sosial ekonomi, serta penanggulangan kemiskinan.

2) Bantuan Keuangan Khusus, diprioritaskan untuk menanggulangi kemiskinan dalam bentuk Program Rehab RTLH dan mencapai kondisi 100% akses sanitasi dalam bentuk Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) dengan fokus pembangunan jamban sehat.

f) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tak Terduga diprioritaskan untuk penanggulangan bencana dan hal-hal yang bersifat mendesak.

b. Kebijakan Umum Belanja Langsung

Belanja Langsung diarahkan untuk memenuhi prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan, yaitu: (1) Pemenuhan layanan dasar pada masyarakat yang sesuai dengan SPM, (2) Peningkatan kondisi perekonomian masyarakat, dan (3) Pembangunan infrastruktur, dengan memperhatikan afirmasi pada wilayah tertinggal dan terluar.

Belanja Langsung juga diarahkan untuk mengefisienkan belanja pegawai (karena sudah diwadahi dalam TPP), melakukan penghematan barang habis pakai pada belanja barang dan jasa, serta meningkatkan proporsi belanja modal dari total Belanja Langsung.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan pemerintahan terbagi dalam urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Sesuai dengan pasal 11 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Urusan Pemerintahan Konkuren terbagi dalam urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Adapun urusan pemerintahan wajib terdiri atas 6 (enam) urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan 18 (delapan belas) urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Adapun urusan pemerintahan pilihan terbagi dalam 8 urusan pilihan.

Berdasarkan pada kebijakan umum serta arah dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tegal tahun 2018 dapat ditetapkan rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerah pada tahun 2018 sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal sebagai berikut :



1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1) Urusan Pendidikan

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
- c. Program Pendidikan Non Formal;
- d. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
- e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

2) Urusan Kesehatan

- a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
- b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
- c. Program Pengawasan Obat dan Makanan
- d. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia;
- e. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
- g. Program Pengembangan Lingkungan Sehat ;
- h. Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
- i. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
- j. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
- k. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;
- l. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/rumah sakit Paru-paru/Rumah Sakit mata;
- m. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
- n. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita;
- o. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia;
- p. Program Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan;
- q. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- b. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;



- c. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong;
 - d. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - e. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong;
 - f. Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan;
 - g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
 - h. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;
 - i. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;
 - j. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah;
 - k. Program Pengendalian Banjir;
 - l. Program Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
 - m. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;
 - n. Program Perencanaan Tata Ruang;
 - o. Program Pemanfaatan Ruang.
- 4) Urusan Perumahan Rakyat**
- a. Program Pengembangan Perumahan;
 - b. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
 - c. Program Pengelolaan Areal Pemakaman;
 - d. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Kebakaran.
- 5) Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat**
- a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan;
 - b. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;
 - c. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
 - d. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
 - e. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan;
 - f. Program Pendidikan Politik Masyarakat;



- g. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.

6) Urusan Sosial

- a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
- b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
- c. Program pembinaan anak terlantar;
- d. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma;
- e. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo;
- f. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial;
- g. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1) Urusan Tenaga Kerja

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
- c. Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

2) Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

- a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;
- b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
- c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
- d. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan;

3) Urusan Pangan

- a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan.

4) Urusan Pertanahan

- a. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah;
- b. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.



5) Urusan Lingkungan Hidup

- a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup;
- c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
- d. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam;
- e. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH;
- f. Program Peningkatan Pengendalian Polusi;
- g. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut.
- h. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);

6) Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pечатatan Sipil

- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan.

7) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
- b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
- c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;
- d. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
- e. Program Peningkatan Perempuan di Pedesaan.

8) Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

- a. Program Keluarga Berencana ;
- b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR);
- c. Program Pelayanan Kontrasepsi;
- d. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri;
- e. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat;
- f. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR;
- g. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS;



- h. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak;
- i. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga;
- j. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU.

9) Urusan Perhubungan

- a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
- b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
- c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
- d. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas.

10) Urusan Komunikasi Dan Informatika

- a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
- b. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
- c. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa;
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi

11) Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

- a. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM;
- b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM;
- c. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

12) Urusan Penanaman Modal

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
- b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
- c. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah;
- d. Program Optimalisasi Pelayanan Perijinan.

13) Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga

- a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;
- b. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda;



- c. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga;
- d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.

14) Urusan Statistik

- a. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.

15) Urusan Kebudayaan

- a. Program Pengembangan Nilai Budaya;
- b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
- c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

16) Urusan Perpustakaan

- a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

17) Urusan Kearsipan

- a. Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah;
- b. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan;
- c. Program Peningkatan kualitas Pelayanan Informasi.

3. Urusan Pilihan

1) Urusan Kelautan Dan Perikanan

- a. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir;
- b. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut;
- c. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
- d. Program Pengembangan Perikanan Tangkap;
- e. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan;
- f. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;
- g. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar.

2) Urusan Pariwisata

- a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- c. Program Pengembangan Kemitraan



3) Urusan Pertanian

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- b. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan;
- c. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan;
- d. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan;
- e. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan;
- f. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;
- g. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
- h. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan;
- i. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan;
- j. Program Pengembangan Peternakan.

4) Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral

- a. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga Listrik.

5) Urusan Perdagangan

- a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
- b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
- c. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.

6) Urusan Perindustrian

- a. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi;
- b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
- c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;
- d. Program Penataan Struktur Industri.

7) Urusan Ketransmigrasian

- a. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

4. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Urusan Pemerintahan

1) Urusan Pemerintahan



- a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - c. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;
 - d. Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah
 - e. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
 - f. Program Peningkatan Pelayanan Publik.
- 2) Urusan Pengawasan**
- a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
 - b. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- 3) Urusan Perencanaan**
- a. Program Pengembangan Data/Informasi;
 - b. Program Kerjasama Pembangunan;
 - c. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
 - d. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar;
 - e. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - f. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
 - h. Program Perencanaan Sosial Budaya;
 - i. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
- 4) Urusan Keuangan**
- a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Program Pembinaan Administrasi dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.
- 5) Urusan Kepegawaian**
- a. Program Pendidikan Kedinasan;
 - b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;



c. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

6) Urusan Pendidikan dan Pelatihan

a. Program Peningkatan Pelayanan Publik

2.2.3 Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Kebijakan Pembiayaan Daerah diprioritaskan pada pencairan dana cadangan Pilkada, karena pada tahun 2018 akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran adalah penerimaan Sisa Lebih Perhitungan anggaran Tahun yang lalu (SiLPA), sedangkan yang kedua berasal dari penerimaan piutang daerah. Penggunaan SiLPA adalah sebagai sumber penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran berikutnya dalam rangka mendanai kegiatan-kegiatan yang belum selesai pada tahun anggaran berkenaan maupun penggunaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Apabila terjadi defisit anggaran riil maka diupayakan untuk menutup defisit melalui :

- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa pelepasan saham ataupun penjualan aset pemerintah daerah lainnya pada BUMD maupun lembaga usaha lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. penerimaan pinjaman daerah dari pihak lain baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun lembaga donor yang dimanfaatkan untuk keperluan pendanaan kegiatan jangka pendek maupun jangka panjang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.



Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya. Kebijakan umum Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2018 adalah :

- a. Penyertaan modal pada BUMD maupun lembaga usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Tahun 2018 yaitu untuk penyertaan modal pada Bank Jateng, Bank TGR, BKK Slawi dan PDAM.
- b. Cadangan Pemilihan Kepala Daerah

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

a. Anggaran Pendapatan

Pendapatan daerah tahun 2018 dianggarkan sejumlah Rp2.644.381.703.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp418.830.489.000,00 terdiri dari:
 - a) Pendapatan pajak daerah Rp105.528.154.000,00 yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan umum, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, Pajak BPHTB.
 - b) Hasil retribusi daerah Rp26.613.490.000,00 yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu.
 - c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp21.044.967.000,00 berupa bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
 - d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp265.643.878.000,00 berupa hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR), pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah, pendapatan BLUD, hasil dari pengelolaan dana bergulir, lain-lain PAD yang sah lainnya, pendapatan denda atas pelanggaran perda, hasil penjualan aset lainnya, pendapatan dari sumber mata air, pendapatan sewa BLK dan pendapatan sewa LPK Nelayan.
- 2) Pendapatan Transfer sebesar Rp2.072.704.414.000,00, yang terdiri dari :
 - a) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Rp1.556.105.684.000,00 yang berasal dari dana bagi hasil pajak Rp71.227.065.000,00, dana bagi



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

hasil bukan pajak (sumber daya alam) Rp8.626.340.000,00, dana alokasi umum Rp1.144.494.182.000,00 dan dana alokasi khusus Rp331.758.097.000,00.

- b) Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Rp317.703.163.000,00 yang berasal dari dana penyesuaian.
 - c) Transfer pemerintah provinsi Rp188.026.177.000,00 yang berupa pendapatan bagi hasil pajak.
 - d) Bantuan Keuangan Rp10.869.390.000,00 yang berasal dari Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi lainnya
- 3) Lain-lain pendapatan yang sah Rp152.846.800.000,00 yang berasal dari Pendapatan Hibah.

Anggaran pendapatan berdasarkan urusan pemerintahan ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1. Anggaran Pendapatan berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2018

No	URUSAN	ANGGARAN (Rp)
	PENDAPATAN	2.644.381.703.000,00
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	237.051.295.000,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	9.167.628.000,00
3	Urusan Pilihan	17.100.000.000,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	2.381.062.780.000,00

Rincian anggaran pendapatan berdasarkan urusan dapat dilihat pada *lampiran 2.1*.

b. Anggaran Belanja

Anggaran belanja daerah tahun 2018 adalah sebesar Rp2.755.269.339.000,00. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka belanja daerah diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan daerah dan berdasarkan kelompok belanja. Berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan daerah maka belanja daerah terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar Rp1.630.343.221.717,00 urusan wajib bukan pelayanan dasar Rp151.885.803.321,00, urusan pilihan Rp97.194.956.953,00 dan urusan pemerintahan fungsi penunjang Rp875.845.357.009,00

Penjelasan secara keseluruhan dari alokasi belanja daerah berdasarkan urusan pemerintahan daerah tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.2. Anggaran Belanja berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2018

NO	URUSAN	ANGGARAN (Rp)
	BELANJA	2.755.269.339.000,00
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1.630.343.221.717,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

NO	URUSAN	ANGGARAN (Rp)
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	151.885.803.321,00
3	Urusan Pilihan	97.194.956.953,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	875.845.357.009,00

Rincian anggaran belanja berdasarkan urusan dapat dilihat pada *lampiran 2.2*.

Berdasarkan kelompok belanja maka belanja daerah diklasifikasikan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Berdasarkan klasifikasi tersebut maka jumlah anggaran belanja tidak langsung adalah Rp1.570.671.461.000,00 terdiri dari belanja pegawai Rp1.020.938.773.000,00, Belanja hibah Rp72.740.428.000,00, belanja bantuan sosial Rp20.632.000.000,00, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa Rp10.029.933.000,00 belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Rp440.330.327.000,00, dan belanja tidak terduga Rp6.000.000.000,00.

Anggaran belanja langsung Rp1.184.597.878.000,00 terdiri dari belanja pegawai Rp121.199.039.000,00, belanja barang dan jasa Rp592.680.637.000,00 dan belanja modal Rp470.718.202.000,00.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) maka anggaran belanja daerah diklasifikasikan dalam (1) Belanja Operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan (2) Belanja Modal (3) Belanja tak terduga yang dialokasikan dalam rangka penanganan bencana alam dan bencana sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya (4) Transfer (Tansfer bagi hasil ke desa).

Berdasarkan klasifikasi tersebut belanja operasi dianggarkan sebesar Rp1.828.190.877.000,00 yang terdiri dari belanja pegawai Rp1.142.137.812.000,00, belanja barang Rp558.506.679.100,00, belanja hibah Rp106.713.608.900,00 bantuan sosial Rp20.832.777.000,00 dan belanja bantuan keuangan Rp440.330.327.000,00.

Belanja modal dianggarkan sebesar Rp470.718.202.000,00 yang terdiri dari belanja tanah Rp6.250.489.000,00, belanja peralatan dan mesin Rp95.972.151.550,00, belanja bangunan dan gedung Rp140.800.907.400,00, belanja jalan, irigasi dan jaringan Rp226.050.504.050,00, serta belanja aset tetap lainnya Rp1.644.150.000,00.

Belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp.6.000.000.000,00

Untuk Transfer yaitu Transfer Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa dianggarkan sebesar Rp10.029.933.000,00 yang terdiri dari Transfer Bagi Hasil



Pajak Rp7.804.975.000,00 dan Transfer Bagi Hasil Retribusi sebesar Rp2.224.958.000,00.

Untuk anggaran pembiayaan daerah tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan pembiayaan daerah Rp119.765.636.000,00 terdiri dari Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Rp106.925.094.000,00 dan pencairan dana cadangan Rp12.840.542.000,00.
- 2) Pengeluaran pembiayaan daerah Rp8.878.000.000,00 terdiri dari penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Rp8.849.000.000,00 dan pengembalian biaya administrasi pembukaan rekening BLUD Puskesmas Rp.29.000.000,00

Berdasarkan kondisi tersebut maka anggaran pembiayaan netto adalah Rp110.887.636.000,00 dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun berkenaan Rp0,00.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

a. Anggaran Pendapatan

Anggaran pendapatan daerah dalam perubahan APBD tahun 2018 direncanakan sebesar Rp2.644.381.703.000,00 sedangkan realisasinya adalah Rp2.524.365.919.814,62 sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp120.015.783.185,38 atau 4,54%, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan sebesar Rp418.830.489.000, dengan realisasi sebesar Rp372.282.676.054,62 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp47.547.812.945,38 atau 11,11%, terdiri dari:
 - a) Pendapatan pajak daerah dianggarkan Rp105.528.154.000,00 yang terealisasi sebesar Rp107.035.473.258,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp1.507.319.258,00 atau 1,43%.
 - b) pendapatan retribusi daerah Rp26.613.490.000,00 yang terealisasi sebesar Rp17.833.906.345,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp8.779.583.655,00 atau 32,99%.
 - c) pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp21.044.967.000,00 yang terealisasi sebesar Rp12.576.924.389,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp8.468.042.611,00 atau 40,24%.
 - d) lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp265.643.878.000,00 yang terealisasi sebesar Rp234.836.372.062,62 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp30.807.505.937,38 atau 11,60%.
- 2) Pendapatan transfer dianggarkan sebesar Rp2.072.704.414.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.008.586.726.208,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp64.117.687.792,00 atau 3,09%, terdiri dari:
 - a) Transfer pemerintah pusat – dana perimbangan Rp1.556.105.684.000,00 yang terealisasi sebesar Rp1.513.203.330.274,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp42.902.353.726,00 atau 2,76%, yang berasal dari :
 - (1) Dana bagi hasil pajak dianggarkan sebesar Rp71.227.065.000,00, terealisasi sebesar Rp21.232.470.187,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp49.994.594.813,00 atau 70,19%
 - (2) Dana bagi hasil SDA dianggarkan sebesar Rp8.626.340.000,00, terealisasi sebesar Rp8.188.805.102,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp437.534.898,00 atau 5,07%



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

- (3) Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan sebesar Rp1.144.494.182.000,00 terealisasi sebesar Rp1.144.494.182.000,00 atau 100%.
- (4) Dana Alokasi Khusus dianggarkan Rp331.758.097.000,00. Terealisasi sebesar Rp339.287.872.985,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp7.529.775.985,00 atau 2,27%.
- b) Transfer pemerintah pusat - lainnya dianggarkan sebesar Rp317.703.163.000,00 yang berupa dana penyesuaian, terealisasi sebesar Rp317.703.162.997,00 atau 100%.
- c) Transfer pemerintah provinsi yang berasal dari pendapatan bagi hasil pajak sebesar Rp188.026.177.000,00 terealisasi sebesar Rp167.207.542.937,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp20.818.634.063,00 atau 11,07%.
- d) Bantuan Keuangan yang berasal dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya sebesar Rp10.869.390.000,00 terealisasi sebesar Rp10.472.690.000,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp396.700.000,00 atau 3,65%.
- 3) Lain-lain pendapatan yang sah, yang berasal dari pendapatan hibah Rp152.846.800.000,00, terealisasi sebesar Rp143.496.517.552,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp9.350.282.448,00 atau 6,12%

Realisasi pencapaian target kinerja pendapatan menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat dilihat pada *lampiran 3.1*.

b. Anggaran Belanja

Berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan daerah maka belanja daerah terdiri dari belanja urusan wajib pelayanan dasar sebesar Rp1.630.343.221.717,00 dengan realisasi sebesar Rp1.508.121.802.574,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp122.221.419.,00 atau 7,50%, belanja urusan wajib bukan pelayanan dasar sebesar Rp151.885.803.321,00 dengan realisasi sebesar Rp47.474.087.042,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp6.249.292.958,00 atau 11,63%, belanja urusan pilihan sebesar Rp97.194.956.953,00 dengan realisasi sebesar Rp33.342.366.333,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp4.321.926.667,00 atau 11,45% dan belanja urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang sebesar Rp875.845.357.009,00 dengan realisasi sebesar Rp932.095.251.372,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp34.125.794.928,00 atau 3,53%. Rincian anggaran belanja berdasarkan urusan pemerintahan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat dilihat pada *lampiran 3.2*.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah maka anggaran belanja daerah pada APBD tahun 2018 sebesar Rp2.304.909.079.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp2.127.372.729.068,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp177.536.349.932,00 atau 7,70% yang diklasifikasikan ke dalam belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga.

- 1) Belanja operasi dianggarkan sebesar Rp1.828.190.877.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.705.253.631.133,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp122.937.245.867,00 atau 6,72%, yang terdiri dari :
 - a) Belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp1.142.137.812.000,00, dengan realisasi sebesar Rp1.108.018.481.665,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp34.119.330.335,00 atau 2,99%,
 - b) Belanja barang dianggarkan sebesar Rp558.506.679.100,00, dengan realisasi sebesar Rp484.444.957.020,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp74.061.722.080,00 atau 13,26%,
 - c) Belanja hibah dianggarkan sebesar Rp106.713.608.900,00, dengan realisasi sebesar Rp92.525.895,948,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp14.187.712.952,00 atau 13,30%,
 - d) Belanja Bantuan sosial dianggarkan sebesar Rp20.832.777.000,00 dengan realisasi sebesar Rp20.264.296.500,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp568.480.500,00 atau 2,73%.
 - e) Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp440.330.327.000,00 dengan realisasi sebesar Rp439.235.325.874,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp1.095.001.126,00 atau 0,25%.
- 2) Belanja modal dianggarkan sebesar Rp470.718.202.000,00 dengan realisasi sebesar Rp417.983.021.935,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp52.735.180.065,00 atau 11,20%, yang terdiri dari :
 - a) Belanja modal tanah dianggarkan sebesar Rp6.250.489.000,00, dengan realisasi sebesar Rp3.148.086.385,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp3.102.402.615,00 atau 49,63%.
 - b) Belanja modal peralatan dan mesin dianggarkan sebesar Rp95.972.151.550,00, dengan realisasi sebesar Rp96.724.967.692,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp752.816.142,00 atau 0,78%.
 - c) Belanja modal bangunan dan gedung dianggarkan sebesar Rp140.800.907.400,00 dengan realisasi sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Rp109.978.782.599,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp30.822.124.801,00 atau 21,89%.

d) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dianggarkan sebesar Rp226.050.504.050,00 dengan realisasi sebesar Rp206.618.577.009,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp19.431.927.041,00 atau 8,60%

e) Belanja modal aset tetap lainnya dianggarkan sebesar Rp1.644.150.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.512.608.250,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp131.541.750,00 atau 8%.

2) Belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp6.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.136.076.000,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp1.863.924.000,00 atau 31,07%

c. Anggaran Transfer

Transfer dalam APBD Kabupaten Tegal tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp10.029.933.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp9.012.448.100,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp1.017.484.900,00 atau 10,4%. Transfer merupakan transfer bagi hasil ke kabupaten yang terdiri dari transfer bagi hasil pajak dan transfer bagi hasil retribusi.

1) Transfer bagi hasil pajak dianggarkan sebesar Rp7.804.975.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.385.046.100,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp419.928.900,00 atau 5,38%.

2) Transfer bagi hasil retribusi dianggarkan sebesar Rp2.224.958.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.627.402.000,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp597.556.000,00 atau 26,86%.

d. Anggaran Pembiayaan

Untuk realisasi anggaran pembiayaan daerah tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp119.765.636.000,00 dengan realisasi sebesar Rp122.078.567.177,80 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp2.312.931.177,80 atau 1,93%, yang terdiri dari :

a) Penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp106.925.094.000,00 dengan realisasi sebesar Rp106.925.093.495,80 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp504,20 atau 100%,



- b) Pencairan dana cadangan sebesar Rp12.840.542.000,00 dengan realisasi sebesar Rp14.942.245.791,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp2.101.703.791,00 atau 16,37%
 - c) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp211.227.891,00
- 2) Pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp8.878.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.878.000.000,00 atau 100%, terdiri dari :
- a) Penyertaan modal/investasi pemerintah daerah sebesar Rp8.849.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.849.000.000,00 atau 100%.
 - b) Pengembalian biaya administrasi BLUD sebesar Rp29.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp29.000.000,00 atau 100%

Berdasarkan kondisi tersebut maka anggaran pembiayaan netto yang dianggarkan sebesar Rp110.887.636.000,00 terdapat realisasi sebesar Rp113.200.567.117,80 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp2.312.931.177,80 atau 2,09%.

Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun 2018 sebesar Rp59.884.279.259,42 yang merupakan selisih antara realisasi surplus / defisit sebesar Rp51.254.583.227,38 dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp113.200.567.177,80.

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan secara umum adalah sebagai berikut :

- a. Adanya ketentuan yang mengatur persyaratan bagi penerima bansos/hibah adalah organisasi yang telah berbadan hukum dengan legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM, sehingga dana bansos/hibah tidak dapat terserap secara maksimal.
- b. Dalam persiapan pelaksanaan kegiatan fisik ditemui banyak kendala, diantaranya adanya perubahan standar analisis pekerjaan, RAB dan Gambar yang penyelesaiannya belum tepat waktu dikarenakan terbatasnya jumlah SDM yang ada di Dinas PU.
- c. Dalam pelaksanaan lelang, terdapat beberapa paket pekerjaan yang harus dilaksanakan lelang ulang, bahkan ada yang gagal lelang.
- d. Keterbatasan peralatan-peralatan berat, sementara kegiatan yang harus dilaksanakan jumlahnya cukup banyak.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

- e. Adanya pekerjaan yang belum terbayarkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, dikarenakan belum lengkapnya persyaratan administrasi dalam mengajukan pembayaran, keterlambatan pengajuan persyaratan pembayaran, serta adanya pekerjaan yang belum terselesaikan.
- f. Adanya penyetoran kembali ke kas daerah oleh bendaharawan pengeluaran yang melebihi tahun anggaran.
- g. Penyampaian SPJ dana Bos yang tidak tepat waktu dari sekolah penerima dana BOS.
- h. Penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang tidak tepat waktu dari desa penerima dana desa.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Dalam hal ini yang dimaksud entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Dalam hal ini yang dimaksud entitas pelaporan adalah pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya (SKPD, SKPKD, BLUD).

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Penyusunan Laporan Keuangan Daerah menggunakan 2 (dua) basis akuntansi, yaitu Basis Kas dan Basis Akrual.

Basis kas dipergunakan untuk menyusun laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL). Penggunaan basis kas dikarenakan anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas. Penyusunan LRA menggunakan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah, sedangkan selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran disebut sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, sehingga tidak menggunakan istilah laba.

Basis akrual dipergunakan untuk menyusun laporan finansial yang terdiri dari Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Laporan Arus Kas (LAK). Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.



Untuk mengungkapkan pos-pos yang disajikan pada laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial, maka disusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arua Kas. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintah, serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 berpedoman pada :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan beserta lampirannya;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 57 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua



Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;

- h. Peraturan Bupati Tegal Nomor 18 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 18) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 58 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 18 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;
- i. Peraturan Bupati Tegal Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 60).

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.

Berkenaan dengan target yang telah ditetapkan maka penerapan Kebijakan Akuntansi sampai akhir tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan yang telah sesuai standar akuntansi pemerintahan yaitu pengakuan basis kas dalam Laporan Realisasi Anggaran dan pengakuan basis akrual dalam neraca.
- b. Penerapan yang belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yaitu aset tetap belum dilakukan penyusutan kecuali pada BLUD RSUD dr. Soeselo Slawi, penghapusan atas aset yang tidak produktif dan pengalihan kepemilikan terhadap pihak ketiga atas aset tetap.
- c. Penyajian Piutang Lainnya khususnya yang bersal dari pinjaman kepada masyarakat (dana bergulir) telah dibuatkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 10 tahun 2013 tentang perubahan atas lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 31.B tahun 2007 tentang kebijakan akuntansi yang mengatur tentang penyisihan piutang berdasarkan umur piutang.

4.5. Kebijakan Akuntansi Tertentu

- a. Penerapan bagan akun standar berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
- b. Penerapan besarnya amortisasi aset tak berwujud berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1.974).



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. LRA

5.1.1. Pendapatan – LRA

Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Anggaran dan realisasi pendapatan dalam Tahun Anggaran 2018 serta realisasi Tahun Anggaran 2017 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.1 Pendapatan Daerah TA 2018 dan TA 2017

Pendapatan Daerah	TA 2018		TA 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	418.830.489.000,00	372.282.676.054,62	375.531.165.351,20
b. Pendapatan Transfer	2.072.704.414.000,00	2.008.586.726.208,00	1.921.568.586.197,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	152.846.800.000,00	143.496.517.552,00	153.666.800.582,00
Jumlah Pendapatan Daerah	2.644.381.703.000,00	2.524.365.919.814,62	2.450.766.552.130,20

Dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2017 sebesar Rp2.450.766.552.130,20 maka realisasi pendapatan daerah tahun 2018 sebesar Rp2.524.365.919.814,62 mengalami kenaikan sebesar Rp73.599.367.684,42 atau 3%. Realisasi masing-masing Pendapatan Daerah dapat dijelaskan pada uraian dibawah ini.

a. Pendapatan Asli Daerah

Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp372.282.676.054,62 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp375.531.165.351,20 dengan rincian PAD disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.2. Pendapatan Asli Daerah TA 2018 dan TA 2017

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	TA 2018		TA 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1) Pendapatan Pajak Daerah	105.528.154.000,00	107.035.473.258,00	96.425.287.892,00
2) Pendapatan Retribusi Daerah	26.613.490.000,00	17.833.906.345,00	20.047.124.895,00
3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	21.044.967.000,00	12.576.924.389,00	25.475.140.654,00
4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	265.643.878.000,00	234.836.372.062,62	233.583.611.910,20
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	418.830.489.000,00	372.282.676.054,62	375.531.165.351,20

Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017, maka realisasi Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,87%. Untuk Pendapatan Pajak Daerah mengalami kenaikan sebesar 11%, Retribusi Daerah mengalami penurunan sebesar 11,04%, Pendapatan Hasil



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Pengelolaan Kekayaan Daerah mengalami penurunan sebesar 50,63% dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami kenaikan sebesar 0,54%. Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2018 dan 2017, tersaji sebagai berikut:

1) Pajak Daerah

Tarif pajak daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012. Pendapatan pajak daerah Kabupaten Tegal dikelola oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BP2D), realisasi TA 2018 sebesar Rp107.035.473.258,00 dan TA 2017 sebesar Rp96.425.287.892,00 dengan rincian disajikan dalam table berikut:

Table 5.3. Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a)	Pajak Hotel	1.075.000.000,00	610.644.058,00	447.178.254,00
b)	Pajak Restoran	3.500.000.000,00	5.395.788.141,00	2.621.114.069,00
c)	Pajak Hiburan	320.000.000,00	398.127.550,00	120.789.838,00
d)	Pajak Reklame	2.333.594.000,00	2.337.877.616,00	1.745.076.469,00
e)	Pajak Penerangan Jalan	45.000.000.000,00	47.443.862.691,00	41.716.698.780,00
f)	Pajak Parkir	50.000.000,00	65.292.250,00	38.849.750,00
g)	Pajak Air Tanah	300.000.000,00	351.565.000,00	280.475.935,00
h)	Pajak Sarang Burung Walet	3.000.000,00	3.000.000,00	2.600.000,00
i)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.268.750.000,00	1.154.324.950,00	2.721.284.620,00
j)	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	30.677.810.000,00	25.443.644.371,00	25.541.523.528,00
k)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	21.000.000.000,00	23.831.346.631,00	21.189.696.649,00
Jumlah pendapatan pajak daerah		105.528.154.000,00	107.035.473.258,00	96.425.287.892,00

Dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak daerah Tahun 2017, maka realisasi Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 11% atau Rp10.610.185.366,00.

2) Retribusi Daerah

Tarif retribusi daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012. Pendapatan retribusi daerah dikelola oleh masing-masing OPD penghasil, dengan realisasi selama TA 2018 sebesar Rp17.833.906.345,00 dan TA 2017 sebesar Rp20.047.124.895,00. Rincian pendapatan retribusi dapat dilihat pada lampiran 5.1.

Dibandingkan dengan realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun 2017, maka realisasi Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 11,04% atau sebesar Rp2.213.218.550,00.



3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah merupakan PAD yang berasal dari kegiatan pembiayaan/investasi berupa penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lembaga keuangan bank. Pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp12.576.924.389,00 dan TA 2017 sebesar Rp25.475.140.654,00 dengan rincian sebagai mana tabel berikut ini.

Tabel 5.4. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah :		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a)	Bank Jateng	15.686.048.000,00	7.291.565.543,00	20.813.668.084,00
b)	PDAM	1.859.257.000,00	1.859.257.641,00	1.723.621.035,00
c)	BPR BKK Talang	852.375.000,00	820.119.791,00	793.981.070,00
d)	BPR BKK Slawi	1.937.972.000,00	1.896.665.995,00	1.596.580.513,00
e)	Bank TGR	709.315.000,00	709.315.419,00	547.289.952,00
Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah		21.044.967.000,00	12.576.924.389,00	25.475.140.654,00

Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun 2017, maka realisasi Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 50,63% atau Rp12.898.216.265,00.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin, dengan realisasi selama TA 2018 sebesar Rp234.836.372.062,62 dan TA 2017 sebesar Rp233.583.611.910,20 dengan rincian pada lampiran 5.2

Dibandingkan dengan realisasi pendapatan lain-lain PAD yang Sah Tahun 2017, realisasi Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp1.252.760.152,42 atau 0,54%.

a) Rincian Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan TA 2018 sebesar Rp306.856.280,00 dan TA 2017 sebesar Rp299.810.970,00 dengan rincian pada tabel berikut ini.

Tabel 5.5. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan :		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Hasil Penjualan Peralatan/mesin	29.000.000,00	230.989.000,00	172.750.000,00
(2)	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	300.000.000,00	41.247.280,00	102.551.300,00
(3)	Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.000.000,00	6.100.000,00	6.000.000,00
(4)	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00	28.520.000,00	18.509.670,00
Jumlah		360.000.000,00	306.856.280,00	299.810.970,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

- b) Penerimaan Hasil penjualan aset lainnya tahun anggaran 2018 sebesar Rp238.520.000,00 dan Tahun 2017 adalah sebesar Rp242.601.850,00.
- c) Pendapatan Jasa Giro TA 2018 sebesar Rp4.650.582.910,00 dan 2017 sebesar Rp6.657.879.164,00.
- d) Realisasi pendapatan bunga deposito Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp16.830.238.549,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp11.430.479.397,00. Rincian penerimaan Bunga deposito Tahun Anggaran 2018 disajikan dalam tabel berikut ini

Table 5.6. Pendapatan Bunga Deposito

No	Nama Bank	Penempatan Deposito	Bunga Deposito
(1)	Bank Jateng Cabang Slawi	500.000.000.000,00	14.479.047.558,00
(2)	Bank Mandiri	25.000.000.000,00	249.486.300,00
(3)	Deposito Dana Cadangan		2.101.704.691,00
JUMLAH		525.000.000.000,00	16.830.238.549,00

- e) Realisasi pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp10.290.000,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.000.000,00.
- f) Realisasi pendapatan Denda atas keterlambatan Pekerjaan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp717.191.571,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.854.520.937,00.
- g) Realisasi pendapatan Denda Pajak Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.005.760.695,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp754.525.848,00 berupa denda hotel, denda pajak mineral bukan logam dan batuan, denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- h) Realisasi penerimaan pendapatan Denda Retribusi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp873.171.400,00 merupakan penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, denda retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan denda retribusi tempat khusus parkir dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp888.710.000,00.
- i) Realisasi penerimaan dari pendapatan denda atas pelanggaran Perda Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp55.500.000,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp29.250.000,00.
- j) Realisasi penerimaan dari Pendapatan Hasil Eksekusi atas jaminan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp686.800.500,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.246.255.297,00.
- k) Rincian penerimaan dari pendapatan pengembalian Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.448.535.803,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.505.163.284,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Table 5.7. Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan dari Pengembalian		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Pengembalian Pajak Penghasilan pasal 21	2.000.000.000,00	3.073.711.948,00	1.090.565.874,00
(2)	Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	218.737.087,00	334.393.308,00
(3)	kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	2.300.000,00	480.000,00
(4)	Pengembalian Uang Muka	0,00	113.249.142,00	0,00
(5)	Pengembalian Kewajiban yang Harus Dibayarkan	0,00	1.040.537.626,00	79.724.102,00
Jumlah		2.000.000.000,00	4.448.535.803,00	1.505.163.284,00

- l) Realisasi penerimaan dari pendapatan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp719.800.800,00.
- m) Realisasi Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp203.467.756.069,62 dan Tahun Anggaran 2017 Rp208.002.868.021,20 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Table 5.8. Pendapatan BLUD

Pendapatan BLUD		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Dinkes	72.090.795.000,00	70.937.761.245,60	66.168.041.034,20
(2)	RSUD Soeselo Slawi	145.000.000.000,00	114.804.330.710,02	126.795.279.758,00
(3)	RSUD Suradadi	18.600.000.000,00	17.725.664.114,00	15.039.547.229,00
Jumlah		235.690.795.000,00	203.467.756.069,62	208.002.868.021,20

- n) Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Lainnya Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp29.858.005,00 dan Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp9.910.000,00.
- o) Realisasi pendapatan dari Fasilitas sosial dan Fasilitas umum TA 2018 sebesar Rp237.843.300,00 dan TA 2017 sebesar Rp252.115.800,00.
- p) Realisasi Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp11.867.700,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp3.860.000,00.
- q) Realisasi pendapatan dari Penerimaan Sumber Mata Air Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp545.798.480,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp380.661.342,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Tabel 5.9. Pendapatan dari Penerimaan Sumber Mata Air

Penerimaan Sumber Mata Air:		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	PDAB	136.500.000,00	394.241.640,00	326.072.880,00
(2)	PDAM	89.250.000,00	57.287.800,00	54.588.462,00
(3)	PDAM Kota Tegal	52.500.000,00	94.269.040,00	0,00
Jumlah		278.250.000,00	545.798.480,00	380.661.342,00

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer berasal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, meliputi Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Transfer Pemerintah Provinsi dan Bantuan Keuangan. Realisasi pendapatan transfer dalam TA 2018 sebesar Rp2.008.586.726.208,00 dan TA 2017 sebesar Rp1.921.568.586.197,00 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.10. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer :		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1)	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.556.105.684.000,00	1.513.203.330.274,00	1.505.671.807.702,00
2)	Transfer Pemerintah Pusat lainnya (Dana Penyesuaian Otda)	317.703.163.000,00	317.703.162.997,00	234.026.299.000,00
3)	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	188.026.177.000,00	167.207.542.937,00	164.221.871.495,00
4)	Bantuan Keuangan	10.869.390.000,00	10.472.690.000,00	17.648.608.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer		2.072.704.414.000,00	2.008.586.726.208,00	1.921.568.586.197,00

1) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Realisasi transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2018 sebesar Rp1.513.203.330.274,00 dan TA 2017 sebesar Rp1.505.671.807.702,00 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.11. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a)	Bagi Hasil Pajak	71.227.065.000,00	21.232.470.187,00	29.750.032.332,00
b)	Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	8.626.340.000,00	8.188.805.102,00	8.610.348.281,00
c)	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.144.494.182.000,00	1.144.494.182.000,00	1.141.687.714.000,00
d)	Dana Alokasi Khusus (DAK)	331.758.097.000,00	339.287.872.985,00	325.623.713.089,00
Jumlah Pendapatan Transfer PemerintahPusat-Dana Perimbangan		1.556.105.684.000,00	1.513.203.330.274,00	1.505.671.807.702,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Dibandingkan dengan realisasi pendapatan dana perimbangan Tahun 2017, realisasi Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,50% atau Rp7.531.522.572,00. Rincian pendapatan dana perimbangan TA 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut:

a) Bagi Hasil Pajak

Realisasi pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp21.232.470.187,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp29.750.032.332,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.12. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak :		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan	8.837.530.000,00	7.053.583.951,00	8.614.535.654,00
(2)	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan	0,00	113.862.539,00	73.281.450,00
(3)	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan	0,00	1.744.555.802,00	1.382.723.650,00
(4)	PPh ps 25 dan ps 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh ps 21	62.389.535.000,00	12.320.425.594,00	19.679.491.578,00
(5)	Bea Pemungutan Pertambangan	0,00	42.301,00	0,00
Jumlah Bagi Hasil Pajak		71.227.065.000,00	21.232.470.187,00	29.750.032.332,00

b) Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)

Realisasi pendapatan bagi hasil bukan pajak (SDA) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp8.188.805.102,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp8.610.348.281,00 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.13. Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)

Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	811.808.000,00	463.795.684,00	814.211.118,00
(2)	Pungutan Hasil Perikanan	943.027.000,00	701.234.591,00	525.572.127,00
(3)	Pertambangan Minyak Bumi	21.519.000,00	36.346.929,00	30.278.848,00
(4)	Pertambangan Gas Bumi	160.453.000,00	291.237.025,00	480.660.548,00
(5)	Pertambangan Panas Bumi	91.880.000,00	85.408.015,00	257.303.864,00
(6)	Penerimaan Cukai Hasil tembakau	6.594.065.000,00	6.608.140.000,00	6.497.969.664,00
(7)	SDA Mineral dan Batu Bara	3.588.000,00	2.642.858,00	4.352.112,00
Jumlah Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)		8.626.340.000,00	8.188.805.102,00	8.610.348.281,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

c) Dana Alokasi Umum (DAU)

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.144.494.182.000,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.141.687.714.000,00.

d) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp339.287.872.985,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp325.623.713.089,00 dengan rincian pada lampiran 5.3.

2) Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Realisasi transfer dari Pemerintah Pusat lainnya berupa Dana Penyesuaian otonomi daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp317.703.162.997,00 berupa Dana Insentif Daerah sebesar Rp35.000.000.000,00 dan Dana Desa sebesar Rp282.703.162.997,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp234.026.299.000,00 berupa Dana Desa.

3) Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi. Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp167.207.542.937,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp164.221.871.495,00 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2017 maka realisasi Tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar 1,82% atau Rp2.985.671.442,00. Rincian pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.14. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Bagi Hasil Pajak :		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Pajak Kendaraan Bermotor	49.853.581.252,00	29.946.041.484,00	28.936.372.882,00
(2)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	42.851.999.748,00	33.957.373.172,00	35.539.387.135,00
(3)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	43.274.371.000,00	48.270.727.814,00	45.507.297.546,00
(4)	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	9.108.000,00	115.275.429,00	83.187.511,00
(5)	Bagi Hasil Pajak Rokok dari Propinsi	52.037.117.000,00	54.918.125.038,00	54.155.626.421,00
Jumlah		188.026.177.000,00	167.207.542.937,00	164.221.871.495,00



4) Bantuan Keuangan

Realisasi Bantuan Keuangan TA 2018 sebesar Rp10.472.690.000,00 dan TA 2017 sebesar Rp17.648.608.000,00 dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.15. Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a)	FEDEP	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
b)	TMMD	501.600.000,00	501.600.000,00	501.600.000,00
c)	Profil Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
d)	Pendidikan untuk semua (PUS)	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
e)	Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
f)	NANGKIS	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
g)	Pengembangan Sistem Informasi Desa	62.790.000,00	62.790.000,00	62.790.000,00
h)	Bantuan Sarana Prasarana	10.015.000.000,00	9.618.300.000,00	16.794.218.000,00
JUMLAH		10.869.390.000,00	10.472.690.000,00	17.648.608.000,00

c. Lain- Lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah penerimaan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer, realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah berupa Pendapatan Hibah. Realisasi pendapatan Hibah TA 2018 sebesar Rp143.496.517.552,00 dan TA 2017 sebesar Rp153.666.800.582,00 dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.16. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah :		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1)	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	14.000.000.000,00	6.178.000.000,00	9.894.070.712,00
2)	Hibah Dana BOS	138.846.800.000,00	137.318.517.552,00	143.772.729.870,00
Jumlah pendapatan Hibah		152.846.800.000,00	143.496.517.552,00	153.666.800.582,00

5.1.2. Belanja

Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga (BTT). Dalam TA 2018 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal terdapat sebanyak 48 OPD yang merupakan pengguna anggaran.

Anggaran dan realisasi belanja daerah TA 2018 adalah sebesar Rp2.304.909.079.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.127.372.729.068,00 serta realisasi TA 2017 sebesar Rp2.056.964.445.808,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Tabel 5.17. Belanja Daerah

Belanja Daerah :	TA 2018		TA 2017
	Anggaran	Realisasi	Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
a. Belanja Operasi	1.828.190.877.000,00	1.705.253.631.133,00	1.611.513.759.083,00
b. Belanja Modal	470.718.202.000,00	417.983.021.935,00	437.758.902.809,00
c. Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00	4.136.076.000,00	7.691.783.916,00
Jumlah	2.304.909.079.000,00	2.127.372.729.068,00	2.056.964.445.808,00

a. **Belanja Operasi**

Belanja Operasi Kabupaten Tegal meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Hibah dan Bantuan Sosial. Anggaran pada TA 2018 adalah sebesar Rp2.304.909.079.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.705.253.631.133,00 serta realisasi TA 2017 sebesar Rp1.611.513.759.083,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.18. Belanja Operasi

Belanja Operasi	TA 2018		TA 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1) Belanja Pegawai	1.142.137.812.000,00	1.108.018.481.665,00	1.062.190.303.509,00
2) Belanja Barang	558.506.679.100,00	484.444.957.020,00	477.065.476.668,00
3) Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
4) Belanja Hibah	106.713.608.900,00	92.525.895.948,00	55.420.678.906,00
5) Belanja Bantuan Sosial	20.832.777.000,00	20.264.296.500,00	16.837.300.000,00
Jumlah	1.828.190.877.000,00	1.705.253.631.133,00	1.611.513.759.083,00

1) **Belanja Pegawai**

Anggaran Belanja Pegawai TA 2018 sebesar Rp1.142.137.812.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.108.018.481.665,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp1.062.190.303.509,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.19. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai	TA 2018		TA 2017
	Anggaran	Realisasi	Realisasi
	Rp	Rp	Rp
a) Gaji dan Tunjangan	899.357.236.845,00	881.149.734.192,00	671.073.838.505,00
b) Tambahan Penghasilan	108.560.000.000,00	108.118.575.026,00	287.778.921.745,00
c) Operasional dan KI DPRD	6.900.000.000,00	6.679.500.000,00	5.417.400.000,00
d) Biaya Pemungutan PBB	200.000.000,00	197.364.969,00	270.838.796,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Belanja Pegawai		TA 2018		TA 2017
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
		Rp	Rp	Rp
e)	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	4.829.517.200,00	3.237.345.887,00	3.961.086.477,00
f)	Insentif pemungutan Retribusi Daerah	1.092.018.955,00	580.112.180,00	657.731.888,00
g)	Uang Lembur	3.197.146.625,00	2.608.756.600,00	2.608.492.700,00
h)	Honorarium PNS	28.258.987.875,00	24.782.046.075,00	23.433.824.450,00
i)	Honorarium Non PNS	47.637.890.500,00	43.472.695.394,00	28.960.791.100,00
j)	Belanja Pegawai BLUD	20.824.572.000,00	18.190.661.066,00	17.853.327.819,00
k)	Belanja Pegawai BOS	21.280.442.000,00	19.001.690.276,00	20.174.050.029,00
Jumlah		1.142.137.812.000,00	1.108.018.481.665,00	1.062.190.303.509,00

a) Belanja Gaji dan tunjangan

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan TA 2018 sebesar Rp881.149.734.192,00 dan TA 2017 sebesar Rp671.073.838.505,00 dengan rincian disajikan dalam lampiran 5.4.

b) Belanja Tambahan Penghasilan PNS

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNS TA 2018 sebesar Rp108.118.575.026,00 dan TA 2017 sebesar Rp287.778.921.745,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Table 5.20. Belanja Tambahan Penghasilan PNS

Belanja Pegawai		TA 2018		TA 2017
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	108.250.000.000,00	107.929.125.026,00	57.821.566.285,00
(2)	Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas	50.000.000,00	37.500.000,00	213.650.000,00
(3)	Tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja	260.000.000,00	151.950.000,00	0,00
(4)	Tunjangan Profesi Guru PNSD	0,00	0,00	227.748.220.360,00
(5)	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	0,00	0,00	1.308.375.000,00
(6)	Tunjangan Khusus Guru	0,00	0,00	687.110.100,00
Jumlah		108.560.000.000,00	108.118.575.026,00	287.778.921.745,00

c) Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH

Realisasi Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH TA 2018 sebesar Rp6.679.500.000,00 dan TA 2017 sebesar Rp5.417.400.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Table 5.21. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Belanja Penunjang Komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.300.000.000,00	6.289.500.000,00	4.817.400.000,00
(2)	Belanja Tunjangan Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	390.000.000,00	600.000.000,00
Jumlah		6.900.000.000,00	6.679.500.000,00	5.417.400.000,00

d) Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Realisasi Belanja Biaya Pemungutan Pajak PBB TA 2018 sebesar Rp197.364.969,00 dan TA 2017 sebesar Rp270.838.796,00.

e) Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Realisasi Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah TA 2018 sebesar Rp3.237.345.887,00 dan TA 2017 sebesar Rp3.961.086.477,00.

f) Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Realisasi Belanja Realisasi Insentif Pemungutan Retribusi Daerah TA 2018 Rp580.112.180,00 dan TA 2017 sebesar Rp657.731.888,00.

g) Belanja Uang Lembur

Realisasi Belanja Uang Lembur TA 2018 sebesar Rp2.608.756.600,00 dan TA 2017 sebesar Rp2.608.492.700,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.22. Belanja Uang Lembur

Uang lembur		TA 2018		TA 2017
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	Uang Lembur PNS	2.685.377.750,00	2.205.869.600,00	2.338.630.800,00
(2)	Uang Lembur Non PNS	511.768.875,00	402.887.000,00	269.861.900,00
Jumlah		3.197.146.625,00	2.608.756.600,00	2.608.492.700,00

h) Belanja Honorarium PNS

Realisasi Belanja Honorarium PNS TA 2018 sebesar Rp24.782.046.075,00 dan TA 2017 sebesar Rp23.433.824.450,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Tabel 5.23. Belanja Honorarium PNS

Honorarium PNS		TA 2018		TA 2017
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.178.365.000,00	4.918.776.125,00	6.122.149.200,00
(2)	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang /Jasa	3.468.408.500,00	3.018.701.500,00	2.856.640.500,00
(3)	Honorarium PNS Lainnya	18.612.214.375,00	16.844.568.450,00	14.455.034.750,00
Jumlah		28.258.987.875,00	24.782.046.075,00	23.433.824.450,00

i) Belanja Honorarium Non PNS

Realisasi Belanja Honorarium Non PNS TA 2018 sebesar Rp43.472.695.394,00 dan TA 2017 sebesar Rp28.960.791.100,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.24. Belanja Honorarium Non PNS

Honorarium Non PNS		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Pegawai Honorer/Tidak Tetap	20.288.346.000,00	18.706.002.500,00	11.549.145.100,00
(2)	Honorarium Non PNS Lainnya	27.349.544.500,00	24.766.692.894,00	17.411.646.000,00
Jumlah		47.637.890.500,00	43.472.695.394,00	28.960.791.100,00

j) Belanja Pegawai BLUD

Realisasi belanja Belanja Pegawai BLUD TA 2018 sebesar Rp18.190.661.066,00 dan TA 2017 sebesar Rp17.853.327.819,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.25. Belanja Pegawai BLUD

Belanja Pegawai BLUD		TA 2018		TA 2017
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	Dinkes	11.179.813.000,00	10.545.843.510,00	8.376.452.130,00
(2)	RSUD dr Soeselo Slawi	9.644.759.000,00	7.644.817.556,00	6.209.967.689,00
(3)	RSUD Suradadi	0,00	0,00	3.266.908.000,00
Jumlah		20.824.572.000,00	18.190.661.066,00	17.853.327.819,00

k) Belanja Pegawai BOS

Realisasi belanja Pegawai BOS TA 2018 sebesar Rp19.001.690.276,00 dan TA 2017 adalah sebesar Rp20.174.050.029,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2018 sebesar Rp484.444.957.020,00 dari jumlah Anggaran sebesar Rp558.506.679.100,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp477.065.476.668,00 dengan rincian disajikan dalam lampiran 5.5.

a) Belanja Bahan Pakai Habis

Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis TA 2018 sebesar Rp11.986.380.548,00 dan TA 2017 sebesar Rp10.399.747.417,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.26. Belanja Bahan Pakai Habis

	Belanja Bahan Pakai Habis	TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Alat tulis kantor	3.852.356.085,00	3.512.669.669,00	2.828.640.230,00
(2)	Dokumen/administrasi tender	32.747.200,00	4.198.200,00	850.000,00
(3)	Alat listrik dan elektronik	1.445.619.200,00	1.379.885.269,00	1.305.561.670,00
(4)	Perangko, materai dan benda pos lainnya	205.768.100,00	173.244.600,00	1.171.263.772,00
(5)	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.050.616.950,00	980.695.010,00	1.148.223.706,00
(6)	Bahan Bakar Minyak/Gas	4.174.643.550,00	3.305.486.589,00	1.329.554.119,00
(7)	Pengisian tabung pemadam kebakaran	50.720.000,00	33.881.000,00	46.017.280,00
(8)	Pengisian tabung gas	55.886.600,00	42.079.000,00	46.104.000,00
(9)	Bahan Pakai Habis Lainnya	2.741.036.660,00	2.554.241.211,00	2.523.532.640,00
	Jumlah	13.609.394.345,00	11.986.380.548,00	10.399.747.417,00

b) Belanja Bahan/Material

Realisasi belanja Bahan/Material TA 2018 sebesar Rp21.511.226.943,00 dan TA 2017 sebesar Rp23.843.381.361,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.27. Belanja Bahan Material

	Belanja Bahan/Material	TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Bahan baku bangunan	3.520.136.500,00	3.478.410.750,00	2.986.130.700,00
(2)	Bahan/Bibit tanaman	761.242.000,00	636.227.500,00	749.267.988,00
(3)	Bibit ternak/ikan	138.700.000,00	136.360.000,00	86.890.000,00
(4)	Bahan obat-obatan	11.300.636.790,00	11.093.369.077,00	13.962.850.968,00
(5)	Bahan kimia	936.516.800,00	858.477.665,00	1.103.451.136,00
(6)	Belanja Persediaan Makanan Pokok	354.490.100,00	322.540.000,00	306.780.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Belanja Bahan/Material		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(7)	Belanja Bahan/peralatan pelatihan	1.157.373.800,00	1.109.591.850,00	1.293.045.493,00
(8)	Belanja Bahan/ Material lainnya	4.219.462.550,00	3.876.250.101,00	3.354.965.076,00
Jumlah		22.388.558.540,00	21.511.226.943,00	23.843.381.361,00

c) Belanja Jasa Kantor

Realisasi Belanja Jasa kantor TA 2018 sebesar Rp82.899.821.165,00 dan TA 2017 sebesar Rp76.250.851.525,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.28. Belanja Jasa Kantor

Belanja Jasa Kantor		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Telepon	1.154.539.136,00	810.805.068,00	703.510.646,00
(2)	Air	1.028.550.400,00	777.798.929,00	740.817.776,00
(3)	Listrik	41.749.825.195,00	40.714.767.942,00	38.651.458.927,00
(4)	Jasa pengumuman lelang/pemenang lelang	0,00	0,00	7.000.000,00
(5)	Surat kabar/majalah	652.727.000,00	562.401.175,00	531.352.200,00
(6)	Kawat/faksimili/internet	1.875.622.769,00	1.571.695.807,00	1.120.652.036,00
(7)	Paket/pengiriman	15.349.000,00	11.053.900,00	8.631.420,00
(8)	Sertifikasi	443.482.500,00	356.259.100,00	229.283.320,00
(9)	Jasa Kantor Lainnya	40.277.054.150,00	38.095.039.244,00	34.258.145.200,00
Jumlah		87.197.150.150,00	82.899.821.165,00	76.250.851.525,00

d) Belanja Premi Asuransi

Realisasi Belanja Premi Asuransi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.219.039.089,00 dan TA 2017 Sebesar Rp869.595.260,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.29. Belanja Premi Asuransi

Belanja Premi Asuransi		TA 2018		TA 2017
		Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi Rp
(1)	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.037.640.300,00	1.024.553.897,00	688.228.843,00
(2)	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	206.099.700,00	194.485.192,00	181.366.417,00
Jumlah		1.243.740.000,00	1.219.039.089,00	869.595.260,00

e) Belanja Jasa Perawatan Kendaraan Bermotor

Realisasi Belanja Jasa Perawatan Kendaraan Bermotor TA 2018 sebesar Rp6.609.632.391,00 dan TA 2017 sebesar Rp8.932.525.851,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Tabel 5.30. Belanja Jasa Perawatan Kendaraan Bermotor

Belanja Jasa Perawatan Kendaraan Bermotor		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Jasa Service	1.377.002.600,00	1.204.091.355,00	1.227.316.806,00
(2)	Penggantian Suku Cadang	1.632.533.000,00	1.417.174.273,00	2.336.073.083,00
(3)	Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	4.109.711.900,00	3.529.073.310,00	4.966.105.187,00
(4)	Jasa KIR	29.100.000,00	10.503.075,00	5.490.000,00
(5)	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	290.752.300,00	232.085.828,00	240.319.550,00
(6)	Surat Tanda Nomor Kendaraan	248.230.500,00	216.704.550,00	157.221.225,00
Jumlah		7.687.330.300,00	6.609.632.391,00	8.932.525.851,00

f) Belanja Cetak dan Penggandaan

Realisasi belanja cetak dan penggandaan TA 2018 sebesar Rp9.297.612.783,00 dan TA 2017 sebesar Rp8.774.793.783,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.31. Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja Cetak dan Penggandaan		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Belanja Cetak	7.268.083.750,00	6.580.046.768,00	6.021.540.460,00
(2)	Belanja Penggandaan	3.051.401.683,00	2.717.566.015,00	2.753.253.323,00
Jumlah		10.319.485.433,00	9.297.612.783,00	8.774.793.783,00

g) Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Realisasi belanja sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.949.951.881,00 dan tahun anggaran 2017 sebesar Rp1.878.931.775,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.32. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Sewa rumah jabatan/rumah dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
(2)	Sewa gedung/kantor/tempat	1.932.469.000,00	1.620.224.681,00	1.668.766.475,00
(3)	Sewa ruang rapat/pertemuan	382.599.000,00	314.727.200,00	208.399.300,00
(4)	Sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas	0,00	0,00	1.766.000,00
Jumlah		2.330.068.000,00	1.949.951.881,00	1.878.931.775,00

h) Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Realisasi belanja sewa sarana mobilitas Tahun Anggaran 2018



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

sebesar Rp1.319.035.550,00 dan tahun anggaran 2017 sebesar Rp1.330.330.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.33. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Belanja Sewa Sarana Mobilitas	TA 2018		TA 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1) Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.473.867.200,00	1.314.885.550,00	1.328.530.000,00
(2) Belanja sewa Sarana Mobilitas air	6.550.000,00	4.150.000,00	1.800.000,00
Jumlah	1.480.417.200,00	1.319.035.550,00	1.330.330.000,00

i) Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Realisasi belanja sewa peralatan dan perlengkapan kantor TA 2018 sebesar Rp2.236.841.000,00 dan TA 2017 sebesar Rp1.892.337.400,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.34. Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TA 2018		TA 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1) Meja kursi	804.166.500,00	755.635.000,00	646.056.000,00
(2) Diesel/Generator	9.700.000,00	9.650.000,00	25.710.000,00
(3) Tenda/Layos	358.320.000,00	335.270.000,00	275.891.000,00
(4) Pakaian Adat/Tradisional	60.900.000,00	56.625.000,00	76.330.000,00
(5) perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	1.196.544.000,00	1.079.661.000,00	868.350.400,00
Jumlah	2.429.630.500,00	2.236.841.000,00	1.892.337.400,00

j) Belanja Makanan dan Minuman

Realisasi belanja makanan dan minuman TA 2018 sebesar Rp22.422.912.890,00 dan TA 2017 sebesar Rp19.105.678.296,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.35. Belanja Makanan dan Minuman

Belanja Makanan dan Minuman	TA 2018		TA 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1) Makanan dan minuman harian pegawai	2.582.918.800,00	2.362.890.115,00	2.392.196.096,00
(2) Makanan dan minuman rapat	13.233.054.800,00	11.275.186.600,00	8.549.003.250,00
(3) Makanan dan minuman tamu	1.225.624.000,00	1.028.044.150,00	696.112.500,00
(4) Makanan dan Minuman Pelatihan	4.476.474.500,00	3.862.453.450,00	3.762.798.100,00
(5) Makanan tambahan	4.229.555.500,00	3.894.338.575,00	3.705.568.350,00
Jumlah	25.747.627.600,00	22.422.912.890,00	19.105.678.296,00

k) Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

Realisasi belanja pakaian dinas dan atributnya TA 2018 sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Rp2.969.170.900,00 dan TA 2017 sebesar Rp564.739.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.36. Pakaian Dinas dan Atributnya

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	TA 2018		TA 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1) Pakaian Dinas KDH dan Wakil KDH	125.906.700,00	116.712.000,00	0,00
(2) Pakaian Sipil Harian (PSH)	59.100.000,00	58.135.000,00	103.720.000,00
(3) Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	139.600.000,00	136.170.000,00	19.470.000,00
(4) Pakaian Dinas Harian (PDH)	3.071.380.600,00	2.364.270.500,00	185.543.000,00
(5) Pakaian Dinas Upacara (PDU)	148.722.500,00	142.708.400,00	139.477.000,00
(6) Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	96.118.300,00	95.044.000,00	116.529.000,00
Jumlah	3.698.573.200,00	2.969.170.900,00	564.739.000,00

l) Belanja Pakaian Kerja

Realisasi Belanja Pakaian Kerja TA 2018 sebesar Rp752.875.350,00 dari jumlah anggaran Rp781.833.600,00 dan realisasi pada TA 2017 sebesar Rp586.752.935,00.

m) Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

Realisasi Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu TA 2018 sebesar Rp1.261.747.299,00 dan TA 2017 sebesar Rp1.022.773.163,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.37. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	TA 2018		TA 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1) Pakaian adat daerah	150.150.000,00	134.250.000,00	54.000.000,00
(2) Pakaian batik tradisional	155.965.000,00	139.594.999,00	162.555.000,00
(3) Pakaian Olah raga	766.585.000,00	714.832.900,00	523.303.463,00
(4) Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	283.876.400,00	273.069.400,00	282.914.700,00
Jumlah	1.356.576.400,00	1.261.747.299,00	1.022.773.163,00

n) Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2018 sebesar Rp28.947.885.047,00 dan TA 2017 sebesar Rp27.788.414.915,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.38. Belanja Perjalan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas	TA 2018		TA 2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1) Perjalanan dinas dalam daerah	6.295.256.850,00	4.485.035.687,00	4.832.382.950,00
(2) Perjalanan dinas luar daerah	28.352.251.948,00	24.462.849.360,00	22.956.031.965,00
Jumlah	34.647.508.798,00	28.947.885.047,00	27.788.414.915,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

o) Belanja Pemeliharaan

Realisasi belanja pemeliharaan TA 2018 sebesar Rp27.563.435.028,00 dan TA 2017 sebesar Rp26.395.587.504,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.39. Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Pemeliharaan Peralatan dan mesin	3.070.309.100,00	2.705.862.509,00	2.421.094.053,00
(2)	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.547.587.500,00	4.292.799.576,00	3.814.817.166,00
(3)	Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	20.643.641.000,00	20.399.962.443,00	19.753.985.400,00
(4)	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	200.925.000,00	164.810.500,00	405.690.885,00
Jumlah		28.462.462.600,00	27.563.435.028,00	26.395.587.504,00

p) Belanja Jasa Konsultasi

Realisasi belanja jasa konsultan TA 2018 sebesar Rp6.116.322.675,00 dan TA 2017 sebesar Rp5.786.049.950,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.40. Belanja Jasa Konsultasi

Belanja Jasa Konsultasi		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Jasa Konsultasi Penelitian	371.400.000,00	364.921.000,00	397.380.500,00
(2)	Jasa Konsultasi Perencanaan	3.187.436.500,00	2.897.673.625,00	3.799.734.900,00
(3)	Jasa Konsultasi Pengawasan	194.339.900,00	188.015.000,00	128.577.650,00
(4)	Jasa Konsultasi Lainnya	2.782.412.600,00	2.665.713.050,00	1.460.356.900,00
Jumlah		6.535.589.000,00	6.116.322.675,00	5.786.049.950,00

q) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

Realisasi beasiswa pendidikan PNS TA 2018 tidak ada dan TA 2017 sebesar Rp283.500.000,00 dengan rincian belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 sebesar Rp6.000.000,00 dan Beasiswa Tugas Belajar S2 sebesar Rp21.000.000,00.

r) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

Realisasi belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis TA 2018 sebesar Rp4.600.738.699,00 dan TA 2017 sebesar Rp6.105.140.941,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.41. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis		TA 2018		TA 2017
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	3.419.815.334,00	2.955.502.199,00	3.854.201.441,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

(2)	Belanja sosialisasi	36.427.000,00	34.507.000,00	44.199.500,00
(3)	Bintek	1.698.320.000,00	1.583.859.500,00	2.187.210.000,00
(4)	Biaya Ujian	33.090.000,00	26.870.000,00	19.530.000,00
Jumlah		5.187.652.334,00	4.600.738.699,00	6.105.140.941,00

s) Belanja Uang untuk diberikan kepada Pihak ketiga/masyarakat

Realisasi belanja yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.239.760.000,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.738.445.000,00 dengan rician disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.42. Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

Belanja Uang untuk diberikan kepada Pihak ketiga/masyarakat		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak ketiga	109.850.000,00	91.100.000,00	7.000.000,00
(2)	Belanja uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	2.208.260.000,00	2.148.660.000,00	1.731.445.000,00
Jumlah		2.318.110.000,00	2.239.760.000,00	1.738.445.000,00

t) Belanja Barang Jasa BLUD

Realisasi Belanja BLUD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp159.387.603.522,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp162.630.715.545,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.43. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Belanja Barang dan Jasa BLUD		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Dinkes	59.937.385.000,00	56.658.822.177,00	54.719.457.561,00
(2)	RSUD dr Soeselo Slawi	142.535.284.000,00	102.728.781.345,00	97.298.019.987,00
(3)	RSUD Suradadi	0,00	0,00	10.613.237.997,00
Jumlah		202.472.669.000,00	159.387.603.522,00	162.630.715.545,00

u) Belanja Barang dan Jasa Dana BOP PAUD

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BOP PAUD Tahun 2018 sebesar Rp148.800.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp120.000.000,00.

v) Belanja Barang Jasa BOS

Realisasi Belanja Barang Jasa BOS Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp84.100.464.260,00 dari jumlah Anggaran sebesar Rp92.215.241.000,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp86.956.090.047,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

w) Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli

Realisasi belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp4.903.700.000,00 dari jumlah Anggaran sebesar Rp6.239.661.100,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp4.065.595.000,00.

3) Belanja Hibah

Realisasi belanja hibah TA 2018 sebesar Rp92.525.895.948,00 dan TA 2017 sebesar Rp55.420.678.906,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.44. Belanja Hibah

Belanja Hibah		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a)	Hibah Kepada Pemerintah	19.071.268.000,00	10.557.557.342,00	17.806.165.900,00
b)	Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	53.669.160.000,00	52.100.809.800,00	28.365.300.000,00
c)	Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak ketiga	33.973.180.900,00	29.867.528.806,00	9.249.213.006,00
Jumlah		106.713.608.900,00	92.525.895.948,00	55.420.678.906,00

a) Hibah Kepada Pemerintah

Realisasi belanja Hibah Kepada Pemerintah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp10.557.557.342,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.45. Hibah Kepada Pemerintah

No	Uraian	Jumlah (Rp)
(1)	Hibah Kepada Polres	2.043.875.000,00
(2)	Hibah Kepada Kodim	600.000.000,00
(3)	Hibah Kepada Panwaslu	1.649.944.393,00
(4)	Hibah Kepada LPPL (Lembaga Penyiaran Publik Lokal)	300.000.000,00
(5)	Hibah Kepada KPU	5.819.737.949,00
(6)	Hibah Kepada UNSOED, STABAIAN Tegal, UNNES, IPB	144.000.000,00
Jumlah		10.557.557.342,00

b) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan

Realisasi hibah kepada organisasi kemasyarakatan tahun anggaran 2018 sebesar Rp52.100.809.800,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.46. Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan

No	Uraian	Jumlah (Rp)
(1)	Hibah kepada KNPI	250.000.000,00
(2)	Hibah BOP PAUD (DAK Non Fisik)	20.889.000.000,00
(3)	Hibah kepada Pramuka	300.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

No	Uraian	Jumlah (Rp)
(4)	Hibah kepada KONI	1.200.000.000,00
(5)	Hibah Kepada STAIBN, UNSOED, UPS	132.000.000,00
(6)	Hibah Kepada KOMPAK (komunitas Pecinta Alam Pekandangan)	30.000.000,00
(7)	Hibah kepada PKK	500.000.000,00
(8)	Hibah Kepada DSM (Difabel Salwi Mandiri)	74.849.800,00
(9)	Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi kemasyarakatan Kab Tegal Lainnya	28.724.960.000,00
Jumlah		52.100.809.800,00

c) Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

Realisasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga tahun anggaran 2018 sebesar Rp29.867.528.806,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.47 Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

NO	SKPD	Belanja Hibah Barjas yang akan diserahkan ke masyarakat (Rp)	Belanja Hibah Barjas yang akan diserahkan ke pihak ketiga (Rp)	Total (Rp)
(1)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.920.723.810,00	245.434.000,00	3.166.157.810,00
(2)	Dinas Kesehatan	451.067.475,00		451.067.475,00
(3)	Dinas Perkimtaru	11.208.412.662,00		11.208.412.662,00
(4)	Dinas Sosial	260.846.400,00		260.846.400,00
(5)	Dinas P2AP3KB	276.072.000,00		276.072.000,00
(6)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	14.141.059.659,00		14.141.059.659,00
(7)	Dinas Parpora	49.786.000,00		49.786.000,00
(8)	Kecamatan Slawi	314.126.800,00		314.126.800,00
Jumlah		29.622.094.806,00	245.434.000,00	29.867.528.806,00

4) Belanja Bantuan Sosial

Realisasi belanja bantuan sosial TA 2018 sebesar Rp20.264.296.500,00 dan TA 2017 sebesar Rp16.837.300.000,00 dengan rincian rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.48. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a)	Bantuan Sosial Organisasi Sosial kemasyarakatan	650.000.000,00	150.000.000,00	524.000.000,00
b)	Bantuan Sosial kepada Masyarakat	19.982.000.000,00	19.914.800.000,00	16.313.300.000,00
c)	Bantuan Sosial Barang/Jasa yang diserahkan kepihak ketiga	200.777.000,00	199.496.500,00	
Jumlah		20.832.777.000,00	20.264.296.500,00	16.837.300.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

a) Bantuan Sosial Organisasi Sosial kemasyarakatan

Realisasi belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan tahun anggaran 2018 sebesar Rp150.000.000,00 yaitu Bantuan Sosial Kepada Anak Yatim Piatu .

b) Bantuan Sosial Kepada Masyarakat

Realisasi 2018 sebesar Rp19.914.800.00,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.49. Bantuan Sosial Kepada Masyarakat

No	Uraian	Jumlah (Rp)
(1)	Bansos kepada Badko TPQ	6.504.000.000,00
(2)	Bansos Kepada Forum Komunikasi Madrasah Diniyah	5.505.000.000,00
(3)	Bansos Kepada Forum Komunikasi Hafidz Hafidzoh	1.058.000.000,00
(4)	Bansos Kepada forum Tutor	200.000.000,00
(5)	Bansos Kepada Forum Komunikasi Khotib Mubaligh (FKKM)	310.000.000,00
(6)	Bansos Kepada HIMPAUDI	478.800.000,00
(7)	Bansos Kepada Forum Pendidik dan Tenaga Kependidikan	599.400.000,00
(8)	Bansos Kepada Ikatan Guru TK Indonesia (IGTKI)	1.247.400.000,00
(9)	Bansos Kepada Ikatan Guru RA (IGRA)	846.000.000,00
(10)	Bansos Kepada Persatuan Guru RI Cab. Khusus Kemenag	1.198.800.000,00
(11)	Bansos Kepada Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI)	1.967.400.000,00
Jumlah		19.914.800.000,00

c) Bantuan Sosial Barang/Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga

Realisasi Bantuan Sosial Barang/Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga tahun anggaran 2018 sebesar Rp199.496.500,00 dengan rician Dinas Kesehatan sebesar Rp16.560.000,00, Dinas Sosial sebesar Rp49.581.500,00 dan Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp133.355.000,00.



b. Belanja Modal

Belanja Modal Kabupaten Tegal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset Lainnya. Realisasi Belanja Modal TA 2018 sebesar Rp417.983.021.935,00 dan TA 2017 sebesar Rp437.758.902.809,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut

Tabel 5.50. Belanja Modal

Belanja Modal :		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1)	Belanja Tanah	6.250.489.000,00	3.148.086.385,00	9.082.599.234,00
2)	Belanja Peralatan Mesin	95.972.151.550,00	96.724.967.692,00	81.344.975.420,00
3)	Belanja Gedung dan Bangunan	140.800.907.400,00	109.978.782.599,00	98.542.968.351,00
4)	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	226.050.504.050,00	206.618.577.009,00	244.257.718.104,00
5)	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.644.150.000,00	1.512.608.250,00	4.530.641.700,00
Jumlah Belanja Modal		470.718.202.000,00	417.983.021.935,00	437.758.902.809,00

1) Belanja Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2018 sebesar Rp3.148.086.000,00 dan TA 2017 sebesar Rp9.082.599.234,00 dengan rincian sebagai berikut:

a) Pengadaan Tanah perkampungan

Realisasi belanja Pengadaan Tanah Perkampungan TA 2018 adalah sebesar Rp1.004.071.125,00 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.100.000.000,00 berupa pengadaan tanah Kampung dan realisasi TA 2017 sebesar Rp5.566.303.360,00 berupa pengadaan Tanah Emplasmen.

b) Pengadaan Kolam Ikan

Realisasi Pengadaan Tanah Kolam Ikan TA 2018 tidak ada dan realisasi TA 2017 sebesar Rp648.754.374,00 berupa pengadaan Kolam Ikan Air Tawar.

c) Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung

Realisasi pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung TA 2018 adalah sebesar Rp2.133.528.340,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp2.867.541.500,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Tabel 5.51. Belanja Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung

Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	4.640.000.000,00	2.080.167.840,00	2.867.541.500,00
(2)	Pengadaan Tanah Kosong	500.000.000,00	53.360.500,00	0,00
Jumlah		5.140.000.000,00	2.133.528.340,00	2.867.541.500,00

d) Pengadaan Tanah untuk Bangunan bukan Gedung

Realisasi Belanja Modal pengadaan Tanah untuk Bangunan bukan Gedung TA 2018 adalah sebesar Rp10.486.920,00 dari jumlah Anggaran Rp10.489.000,00 berupa pengadaan Tanah untuk Bangunan Jalan.

2) Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 sebesar Rp96.724.967.692,00 dan TA 2017 sebesar Rp81.344.975.420,00 dengan rincian disajikan dalam lampiran 5.6.

a) Realisasi Belanja Modal Alat-alat besar Darat TA 2018 adalah sebesar Rp1.697.086.450,00 dari jumlah Anggaran Rp1.700.000.000,00 berupa Pengadaan Excavator.

b) Realisasi Belanja Modal Alat Bantu TA 2018 sebesar Rp418.730.000,00 dan Realisasi TA 2017 sebesar Rp4.484.200.216,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.52. Belanja Modal Alat-alat Bantu

BM - Alat Bantu		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Electric Generating set	424.580.000,00	414.880.000,00	0,00
(2)	Compressor	0,00	0,00	154.066.400,00
(3)	Pompa	5.054.000,00	990.000,00	10.970.000,00
(4)	Unit Pemeliharaan Lapangan	3.000.000,00	2.860.000,00	34.374.400,00
(5)	Alat Pengolahan Air Kotor	0,00	0,00	4.284.789.416,00
Jumlah		432.634.000,00	418.730.000,00	4.484.200.216,00

c) Rincian Belanja Alat Angkutan Darat Bermotor TA 2018 sebesar Rp6.460.698.314,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp7.086.100.350,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.53. Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

BM - Alat Angkutan Darat Bermotor		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.856.014.000,00	1.842.043.000,00	0,00
(2)	Kendaraan Bermotor Penumpang	1.229.201.000,00	788.663.526,00	2.770.450.500,00
(3)	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	2.417.464.050,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

BM - Alat Angkutan Darat Bermotor		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(4)	Kendaraan Bermotor Khusus	4.259.964.000,00	2.957.128.788,00	1.510.434.800,00
(5)	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	898.750.000,00	818.220.000,00	279.311.000,00
(6)	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	58.130.000,00	54.643.000,00	108.440.000,00
Jumlah		8.302.059.000,00	6.460.698.314,00	7.086.100.350,00

- d) Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor TA 2018 sebesar Rp3.800.000,00 dari jumlah Anggaran sebesar Rp3.800.000,00 berupa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang.
- e) Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat bengkel Tak Bermesin TA 2018 sebesar Rp9.590.000,00 dari jumlah Anggaran sebesar Rp9.830.000,00 berupa Perkakas Khusus (*Special Tool*) dan realisasi TA 2017 sebesar Rp22.000.000,00 berupa Perkakas Standar (*Standar Tool*).
- f) Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur TA 2018 sebesar Rp783.447.400,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp24.982.700,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.54. Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur

BM - Alat Ukur		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Alat Ukur Universal	0,00	0,00	6.815.000,00
(2)	Alat Ukur Lainnya	843.607.000,00	783.447.400,00	18.167.700,00
Jumlah		843.607.000,00	783.447.400,00	24.982.700,00

- g) Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan TA 2018 tidak ada dan realisasi TA 2017 sebesar Rp93.333.600,00 berupa Alat Pengolahan Produksi Perikanan.
- h) Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan TA 2018 sebesar Rp106.267.000,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp2.054.431.014,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.55. Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan

BM - Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Alat Pemeliharaan Tanaman	0,00	0,00	19.998.900,00
(2)	Alat Penyimpanan	13.316.000,00	13.310.000,00	968.000,00
(3)	Alat Laboratorium	100.000.000,00	92.957.000,00	2.033.464.114,00
Jumlah		113.316.000,00	106.267.000,00	2.054.431.014,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

- i) Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor TA 2018 sebesar Rp2.649.466.050,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp3.873.786.270,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.56. Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor

BM - Alat Kantor		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Mesin Ketik	11.700.000,00	11.380.000,00	11.409.550,00
(2)	Mesin Hitung/Jumlah	2.436.000,00	0,00	9.896.250,00
(3)	Alat Reproduksi (pengganda)	67.090.000,00	56.440.000,00	45.865.000,00
(4)	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	482.377.000,00	465.199.600,00	442.384.900,00
(5)	Alat Kantor Lainnya	2.296.076.000,00	2.116.446.450,00	3.364.230.570,00
Jumlah		2.859.679.000,00	2.649.466.050,00	3.873.786.270,00

- j) Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga TA 2018 sebesar Rp22.944.134.329,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp8.731.070.080,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.57. Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

BM - Alat Rumah Tangga		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Meubelair	3.553.411.560,00	2.753.125.025,00	4.295.972.460,00
(2)	Alat Pembersih	536.451.000,00	508.470.000,00	44.832.200,00
(3)	Alat Pendingin	834.934.550,00	790.027.700,00	804.165.200,00
(4)	Alat Dapur	336.010.000,00	316.518.400,00	168.493.000,00
(5)	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20.440.940.200,00	18.520.627.204,00	3.356.849.220,00
(6)	Alat Pemadam Kebakaran	65.533.000,00	55.366.000,00	60.758.000,00
Jumlah		25.767.280.310,00	22.944.134.329,00	8.731.070.080,00

- k) Realisasi Belanja Modal Pengadaan Komputer TA 2018 sebesar Rp5.377.626.879,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp5.468.539.298,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 58 Belanja Modal Pengadaan Komputer

BM - Komputer		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	komputer Unit Jaringan	1.282.704.000,00	1.235.458.449,00	514.941.930,00
(2)	Personal Komputer	2.757.948.000,00	2.627.324.639,00	2.518.300.960,00
(3)	Peralatan Komputer Mainframe	0,00	0,00	255.726.523,00
(4)	Peralatan Mini Komputer	113.629.000,00	104.463.275,00	278.230.950,00
(5)	Peralatan Personal Komputer	1.089.915.000,00	1.067.003.276,00	1.431.879.435,00
(6)	Peralatan Jaringan	349.700.000,00	343.377.240,00	469.459.500,00
Jumlah		5.593.896.000,00	5.377.626.879,00	5.468.539.298,00

- l) Realisasi Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat TA 2018 sebesar Rp924.731.500,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp319.053.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Tabel 5. 59. Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

BM - Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Meja Kerja Pejabat	464.058.000,00	457.836.000,00	218.108.900,00
(2)	Meja Rapat Pejabat	44.000.000,00	43.530.000,00	0,00
(3)	Kursi Kerja Pejabat	129.729.000,00	124.466.500,00	89.871.300,00
(4)	kursi Rapat Pejabat	25.000.000,00	24.852.000,00	0,00
(5)	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	30.186.000,00	29.760.000,00	2.472.800,00
(6)	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	136.099.440,00	97.969.000,00	8.600.000,00
(7)	Lemari dan Arsip Pejabat	156.903.000,00	146.318.000,00	0,00
Jumlah		985.975.440,00	924.731.500,00	319.053.000,00

m) Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Studio TA 2018 sebesar Rp702.646.500,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp944.415.665,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.60 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio

BM - Alat Studio		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Peralatan Studio Visual	549.014.800,00	518.442.500,00	488.306.065,00
(2)	Peralatan Studi Video dan Film	189.457.000,00	184.204.000,00	409.772.600,00
(3)	Peralatan Studi Video dan Film A	0,00	0,00	46.337.000,00
Jumlah		738.471.800,00	702.646.500,00	944.415.665,00

n) Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi TA 2018 sebesar Rp516.580.000,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp431.260.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 61 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi

BM - Alat Komunikasi		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Telephone	552.630.000,00	500.740.000,00	402.272.000,00
(2)	Radio VHF	0,00	0,00	16.713.000,00
(3)	Alat Komunikasi Sosial	15.840.000,00	15.840.000,00	12.275.000,00
Jumlah		568.470.000,00	516.580.000,00	431.260.000,00

o) Realisasi Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar TA 2018 sebesar Rp33.247.500,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp35.134.940,00 berupa pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola.

p) Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran TA 2018 sebesar Rp3.085.170.163,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp10.085.088.342,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Tabel 5.62. Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran

BM - Alat Kedokteran		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Alat Kedokteran Umum	3.293.515.000,00	3.020.718.040,00	8.968.994.542,00
(2)	Alat Kedokteran Gigi	80.194.000,00	41.634.750,00	83.047.000,00
(3)	Alat Farmasi	6.800.000,00	1.800.000,00	690.072.350,00
(4)	Alat-alat Kedokteran Jantung	32.280.000,00	21.017.373,00	-
(5)	Alat Kesehatan kebidanan dan Penyakit Kandungan	-	-	342.974.450,00
Jumlah		3.412.789.000,00	3.085.170.163,00	10.085.088.342,00

q) Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan TA 2018 sebesar Rp13.503.131.990,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp1.488.496.362,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.63. Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan

BM - Alat kesehatan		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Alat Kesehatan Perawatan	5.137.433.000,00	5.070.275.198,00	1.488.496.362,00
(2)	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	8.609.946.000,00	8.432.856.792,00	0,00
Jumlah		13.747.379.000,00	13.503.131.990,00	1.488.496.362,00

r) Realisasi Belanja Modal Pengadaan Unit-unit Laboratorium TA 2018 sebesar Rp1.056.252.195,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp1.892.975.520,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.64 Belanja Modal Pengadaan Umit-unit Laboratorium

BM - Unit-unit Laboratorium		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	200.000.000,00	173.401.195,00	1.041.831.300,00
(2)	Alat Laboratorium Umum	463.467.000,00	403.820.500,00	661.882.220,00
(3)	Alat Laboratorium Makanan	350.000.000,00	321.200.500,00	189.262.000,00
(4)	Alat Laboratorium kimia	161.980.000,00	157.830.000,00	0,00
Jumlah		1.175.447.000,00	1.056.252.195,00	1.892.975.520,00

s) Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah TA 2018 sebesar Rp35.601.808.177,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp34.139.132.563,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Tabel 5. 65. Belanja Modal pengadaan Alat Peraga/Praktik Sekolah

BM - Alat Peraga/Praktik Sekolah		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar	0,00	0,00	127.366.000,00
(2)	Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	0,00	0,00	147.219.000,00
(3)	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	28.823.920.000,00	35.601.808.177,00	33.864.547.563,00
Jumlah		28.823.920.000,00	35.601.808.177,00	34.139.132.563,00

Realisasi Belanja Modal Alat Peraga/Praktik Sekolah berupa pengadaan bidang pendidikan/ketrampilan lain-lain sebesar Rp35.601.808.177,00 terdapat realisasi dari yang berasal dari Belanja Modal BOS. Realisasi belanja BOS tersebut adalah sebesar Rp35.161.302.177,00. Realisasi belanja modal BOS untuk SD adalah sebesar Rp26.261.460.359,00 dari jumlah anggaran Rp20.861.752.000,00 sehingga terdapat belanja modal yang melebihi anggaran sebesar Rp5.399.708.359,00. Realisasi Belanja Modal BOS untuk SMP adalah sebesar Rp8.899.841.818,00 dari jumlah anggaran Rp7.512.168.000,00 sehingga terdapat belanja modal yang melebihi anggaran sebesar Rp1.387.673.818,00.

- t) Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan TA 2018 sebesar Rp392.275.000,00 dari jumlah Anggaran sebesar Rp394.000.000,00 berupa Pengadaan Proteksi Lingkungan Dan realisasi TA 2017 sebesar Rp185.522.000,00 berupa pengadaan Alat Kesehatan Kerja.
- u) Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan TA 2018 sebesar Rp458.278.245,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp170.975.500,00 dengan rincian sebagai disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.66. Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan

BM - Alat Keamanan dan Perlindungan		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Alat Bantu Keamanan	51.830.000,00	49.275.000,00	170.975.500,00
(2)	Alat Perlindungan	410.768.000,00	409.003.245,00	0,00
Jumlah		462.598.000,00	458.278.245,00	170.975.500,00

3) Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2018 sebesar Rp109.978.782.599,00 dan TA 2017 sebesar Rp98.542.968.351,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

dengan rician disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.67. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a)	Bangunan Gedung Tempat Kerja	139.061.907.400,00	108.264.239.437,00	93.755.164.873,00
b)	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	150.000.000,00	146.625.000,00	172.750.000,00
c)	Bangunan Bersejarah	830.000.000,00	822.133.532,00	0,00
d)	Bangunan Candi	200.000.000,00	199.511.900,00	0,00
e)	Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah Lainnya	0,00	0,00	2.365.812.978,00
f)	Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	53.469.000,00
g)	Bangunan Rambu-rambu	559.000.000,00	546.272.730,00	2.195.771.500,00
Jumlah		140.800.907.400,00	109.978.782.599,00	98.542.968.351,00

- a) Realisasi Belanja Pengadaan Bangunan Tempat Kerja TA 2018 sebesar Rp108.264.239.437,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp93.755.164.873,00 dengan rician disajikan dalam lampiran 5.7.
- b) Realisasi Belanja Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal TA 2018 sebesar Rp146.625.000,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp150.000.000,00 berupa Bangunan Rumah Negara Golongan III dan realisasi TA 2017 sebesar Rp172.750.000,00 Bangunan Rumah Negara Golongan I.
- c) Realisasi Belanja Pengadaan Bangunan Bersejarah TA 2018 sebesar Rp822.133.532,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp830.000.000,00 berupa pengadaan Bangunan Makam Sejarah.
- d) Realisasi Belanja Modal Pengadaan Candi TA 2018 sebesar Rp199.511.900,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp200.000.000,00 berupa pengadaan Bangunan Candi Lainnya.
- e) Realisasi Belanja Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah Lainnya TA 2018 tidak ada dan realisasi TA 2017 sebesar Rp2.365.812.978,00 berupa Pengadaan Bangunan Bersejarah.
- f) Realisasi Belanja Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/ Pasti TA 2018 tidak ada dan realisasi TA 2017 sebesar Rp53.469.000,00 berupa Pengadaan Bangunan Tugu/ Tanda Batas.
- g) Realisasi Belanja Pengadaan Bangunan Rambu-rambu TA 2018 sebesar Rp546.272.730,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp2.195.771.500,00 dengan rician disajikan dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Tabel 5.68. Belanja Modal Pengadaan Rambu-rambu

BM - Bangunan Rambu-rambu		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Bangunan Bersuar Lalu lintas Darat	400.000.000,00	390.846.530,00	1.798.631.500,00
(2)	Bangunan Ranbu Tidak Bersuar	159.000.000,00	155.426.200,00	397.140.000,00
Jumlah		559.000.000,00	546.272.730,00	2.195.771.500,00

4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2018 sebesar Rp206.618.577.009,00 dan TA 2017 sebesar Rp244.257.718.104,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.69. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a)	Pengadaan Jalan	184.814.981.000,00	168.301.857.517,00	196.231.922.301,00
b)	Pengadaan Jembatan	6.856.500.000,00	6.348.509.900,00	23.181.763.202,00
c)	Pengadaan Bangunan Air Irigasi	9.979.769.000,00	8.906.501.660,00	8.155.041.016,00
d)	Bangunan pengaman sungai dan Penanggulangan BA	200.000.000,00	199.400.000,00	1.881.335.400,00
e)	Bangunan Air Kotor	0,00	0,00	724.192.000,00
f)	Pengadaan Instalasi Air Minum/Bersih	96.990.000,00	44.500.000,00	0,00
g)	Pengadaan Instalasi Air kotor	14.596.120.000,00	13.878.672.321,00	102.000.000,00
h)	Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	2.728.305.000,00	2.635.279.500,00	511.206.000,00
i)	Instalasi gardu Listrik	9.500.000,00	9.500.000,00	19.839.600,00
j)	Instalasi Gas	0,00	0,00	129.804.528,00
k)	Pengadaan Jaringan Listrik	6.768.339.050,00	6.294.356.111,00	13.320.614.057,00
Jumlah		226.050.504.050,00	206.618.577.009,00	244.257.718.104,00

a) Realisasi Belanja Modal Jalan TA 2018 sebesar Rp168.301.857.517,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp196.231.922.301,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.70. Belanja Modal Pengadaan Jalan

BM - Pengadaan Jalan		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Jalan Kabupaten/Kota	181.541.027.000,00	165.064.092.317,00	194.673.027.551,00
(2)	Jalan Desa	0,00	0,00	197.062.100,00
(3)	Jalan Khusus	3.273.954.000,00	3.237.765.200,00	1.361.832.650,00
Jumlah		184.814.981.000,00	168.301.857.517,00	196.231.922.301,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

- b) Realisasi Belanja Modal Jembatan TA 2018 sebesar Rp6.348.509.900,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp23.181.763.202,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.71. Belanja Modal Pengadaan Jembatan

BM - Pengadaan Jembatan		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Jembatan Kabupaten/Kota	6.738.000.000,00	6.230.665.900,00	23.181.763.202,00
(2)	Jembatan Khusus	118.500.000,00	117.844.000,00	0,00
Jumlah		6.856.500.000,00	6.348.509.900,00	23.181.763.202,00

- c) Realisasi Belanja Modal Bangunan Air Irigasi TA 2018 sebesar Rp8.906.501.660,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp8.155.041.016,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.72. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi

BM - Bangunan Air irigasi		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi	820.000.000,00	738.216.460,00	654.796.680,00
(2)	Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	7.426.000.000,00	6.441.760.700,00	7.500.244.336,00
(3)	Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi	1.733.769.000,00	1.726.524.500,00	0,00
Jumlah		9.979.769.000,00	8.906.501.660,00	8.155.041.016,00

- d) Realisasi Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA TA 2018 sebesar Rp199.400.000,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp1.881.335.400,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.73. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA

BM - Bangunan pengaman sungai dan Penanggulangan BA		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	BangunanPembuang pengaman Sungai	200.000.000,00	199.400.000,00	938.063.400,00
(2)	Bangunan pengaman Sungai	0,00	0,00	943.272.000,00
Jumlah		200.000.000,00	199.400.000,00	1.881.335.400,00

- e) Realisasi Belanja Modal Bangunan Air Kotor TA 2018 tidak ada dan realisasi TA 2017 sebesar Rp724.192.000,00 berupa Bangunan Pembawa Air Kotor sebesar Rp9.562.000,00, dan Bangunan Pembuangan Air Kotor sebesar Rp714.630.000,00.
- f) Realisasi Belanja Modal Instalasi Air Minum/Bersih TA 2018 sebesar Rp44.500.000,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp96.990.000,00 berupa air bersih/air baku lainnya.
- g) Realisasi Belanja Modal Instalasi Air Kotor TA 2018 sebesar Rp13.878.672.321,00 dari jumlah anggaran Rp14.596.120.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

dan realisasi TA 2017 sebesar Rp102.000.000,00 berupa Instalasi air kotor.

- h) Realisasi Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah TA 2018 sebesar Rp2.635.279.500,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp511.206.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 74. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah

BM - Instalasi Pengolahan Sampah		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Instalasi Pengolahan Sampah organik	600.740.000,00	599.697.900,00	511.206.000,00
(2)	Instalasi Pengolahan Sampah non organik	2.127.565.000,00	2.035.581.600,00	0,00
Jumlah		2.728.305.000,00	2.635.279.500,00	511.206.000,00

- i) Realisasi Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik TA 2018 sebesar Rp9.500.000,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp9.500.000,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp19.839.600,00 berupa instalasi gardu listrik distribusi.
- j) Realisasi Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gas TA 2018 tidak ada dan realisasi TA 2017 adalah sebesar Rp129.804.528,00 berupa pengadaan instalasi jaringan pipa gas.
- k) Realisasi Belanja Modal Jaringan Listrik TA 2018 sebesar Rp6.294.356.111,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp13.320.614.057,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.75. Belanja Modal Jaringan Listrik

BM - Jaringan Listrik		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Jaringan Transmisi	6.707.000.000,00	6.235.816.531,00	13.073.993.557,00
(2)	Jaringan Distribusi	61.339.050,00	58.539.580,00	246.620.500,00
Jumlah		6.768.339.050,00	6.294.356.111,00	13.320.614.057,00

5) Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2018 sebesar Rp1.512.608.250,00 dan TA 2017 sebesar Rp4.530.641.700,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.76. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a)	Pengadaan Buku	407.520.000,00	401.451.200,00	3.993.071.500,00
b)	Pengadaan Barang-barang Perpustakaan	300.000.000,00	193.005.000,00	98.551.000,00
c)	Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	20.000.000,00	19.551.800,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
d)	Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	0,00	0,00	223.829.200,00
e)	Pengadaan Tanaman	16.630.000,00	13.602.000,00	16.240.000,00
f)	Pengadaan Aset Tetap Renovasi	900.000.000,00	884.998.250,00	198.950.000,00
Jumlah		1.644.150.000,00	1.512.608.250,00	4.530.641.700,00

Rincian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya diatas sebagai berikut:

- a) Belanja Modal Pengadaan Buku TA 2018 sebesar Rp401.451.200,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp3.993.071.500,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 77. Belanja Modal Pengadaan Buku

BM - Pengadaan Buku		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Buku Ilmu Pengetahuan Umum	387.520.000,00	381.451.200,00	3.973.071.500,00
(2)	Buku Ilmu Pengetahuan praktis	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Jumlah		407.520.000,00	401.451.200,00	3.993.071.500,00

- b) Realisasi Belanja Modal Pengadaan Barang-barang perpustakaan TA 2018 sebesar Rp193.005.000,00 dari jumlah anggaran Rp300.000.000,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp98.551.000,00 berupa pengadaan Berkas Komputer (*computer Files*).
- c) Realisasi Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak kebudayaan TA 2018 sebesar Rp19.551.800,00 dari jumlah anggaran Rp20.000.000,00 berupa pengadaan Barang bercorak Kebudayaan Barang Kerajinan.
- d) Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya TA 2018 tidak ada dan realisasi TA 2017 sebesar Rp223.829.200,00 berupa alat olah raga lainnya.
- e) Realisasi Belanja Modal Pengadaan Tanaman TA 2018 sebesar Rp13.602.000,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp16.240.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut,

Tabel 5.78. Belanja Modal Pengadaan Tanaman

BM - Pengadaan Tanaman		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Pengadaan Tanaman Hias	4.800.000,00	1.782.000,00	16.240.000,00
(2)	Pengadaan Tanaman Obat dan Kosmetika	11.830.000,00	11.820.000,00	0,00
Jumlah		16.630.000,00	13.602.000,00	16.240.000,00

- f) Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Renovasi TA 2018 sebesar Rp884.998.250,00 dari jumlah anggaran Rp900.000.000,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp198.950.000,00.



c. Belanja Tak Terduga (BTT)

Belanja Tak Terduga (BTT) dialokasikan dalam APBD dalam rangka penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan belanja tak terduga Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.136.076.000,00 secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja masing-masing, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Realisasi dari Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Pembayaran Biaya Pengembalian Pembayaran Pajak BPHTB yang telah disetor ke Kas Umum Daerah Kab. Tegal berdasarkan SK Bupati No. 973/15 Tahun 2018 tgl. 2 Januari 2018. Ditransfer ke rek BCA Cabang Tegal No. 0470024909 An. Amir Yulian sebesar Rp2.000.000,00
- 2) Belanja TTD (Bantuan Pengkajian Lokasi, Kerusakan & Sumber Daya) Penanganan Tanggap Darurat Benc. Longsor sesuai SK Bupati No. 360/282, SK Bupati No. 360/284, & SK Bupati No. 360/285, serta Benc. Banjir sesuai SK Bupati No. 360/283 tanggal 9 Feb 2018 sebesar Rp31.000.000,00
- 3) Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Pembangunan Bronjong Pengaman Tebing Sungai Cacaban Desa Tonggara Kec. Kedungbanteng (Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Berdasarkan SPK No. 050/30/1/125.3/PPK-TTD-BPBD/Paket-04/III/2018 Tanggal 19 Maret 2018) sebesar Rp778.192.000,00
- 4) Pembayaran termyn 100% Pek. Pemb. Bronjong Pengaman Tebing Kali Guci Desa Rembul Kec. Bojong sesuai kontrak No. 050/30/1/125.2PPK-TTD-BPBD/Paket-03/III/2018 sebesar Rp822.186.000,00
- 5) Pembayaran Termyn 100% Pek. Pemb. Pengaman Jalan Desa Gunungagung Kec. Bumijawa berdasarkan SPK No. 050/30/1/124.5/PPK-TTD-BPBD/Paket-05/III/2018 sebesar Rp348.817.000,00
- 6) Pembayaran Termyn 100% Pek. Pemb. Bronjong Pengaman Tebing Sungai Gamprit Ds. Rajegwesi Kec. Pagerbarang (SPK No. 050/30/1/124.1/PPK-TTD-BPBD/Paket-08/III/2018) sebesar Rp512.016.000,00.
- 7) Pembayaran Termyn 100% Pek. Pemb. Pengaman Jalan Kabupaten Jur. Sumbaga Sokatangah Kec. Bumijawa berdasarkan SPK 050/30/1/125.1/PPK-TTD-BPBD/Paket-02/III/2018 sebesar Rp197.024.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

- 8) Pembayaran Termyn 100% Pek. Pemb. Bronjong Pengaman Tebing Sungai Sibekek Ds. Pagiyanten Kec. Adiwerna (SPK No. 050/30/1/124.6/PPK-TTD-BPBD/Paket-06/III/2018) sebesar Rp463.750.000,00
- 9) Pembayaran Termyn 100% Pek. Pemb. Bronjong Pengaman Sungai Jembatan Kel. Pakembaran, berdasarkan SPK No. 050/30/1/124.7/PPK-TTD-BPBD/Paket-07/III/2018 sebesar Rp359.000.000,00
- 10) Pembayaran Termyn 100% Pek. Pemb. Jembatan Kali Crabak Ds. Sukareja Kec. Warureja, berdasarkan SPK No. 050/1/126.2/PPK-TTD-BPBD/Paket-01/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 sebesar Rp591.591.000,00
- 11) Belanja TTD BOP Penanganan Bencana Longsor SK No. 360/419 tanggal 18 Mei 2018 dan SK No. 360/454, SK No. 360/453, SK No. 360/452 tanggal 21 Mei 2018 sebesar Rp30.500.000,00

5.1.3. Transfer

Realisasi Transfer TA 2018 sebesar Rp448.247.773.974,00 dan TA 2017 sebesar Rp396.040.092.454,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.79. Transfer

Transfer :		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a.	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	10.029.933.000,00	9.012.448.100,00	9.980.183.500,00
b.	Transfer Bantuan Keuangan	440.330.327.000,00	439.235.325.874,00	386.059.908.954,00
Jumlah		450.360.260.000,00	448.247.773.974,00	396.040.092.454,00

a. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Ke Desa

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Desa TA 2018 sebesar Rp9.012.448.100,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp9.980.183.500,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.80. Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Desa

Transfer Bagi Hasil Pendapatan		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1)	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	7.804.975.000,00	7.385.046.100,00	7.799.361.400,00
2)	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	2.224.958.000,00	1.627.402.000,00	2.180.822.100,00
Jumlah		10.029.933.000,00	9.012.448.100,00	9.980.183.500,00



b. Transfer Bantuan Keuangan

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2018 sebesar Rp439.235.325.874,00 dan TA 2017 sebesar Rp386.059.908.954,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.81. Transfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1)	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	439.261.423.000,00	438.166.422.010,00	385.060.166.994,00
2)	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.068.904.000,00	1.068.903.864,00	999.741.960,00
Jumlah		440.330.327.000,00	439.235.325.874,00	386.059.908.954,00

5.1.4. Pembiayaan

Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dengan anggaran Pembiayaan Neto TA 2018 sebesar Rp110.887.636.000,00 dan realisasi sebesar Rp111.098.862.486,80 dan TA 2017 sebesar Rp109.163.079.627,60 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 82. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a.	Penerimaan Pembiayaan	119.765.636.000,00	119.976.862.486,80	133.104.079.627,60
b.	Pengeluaran Pembiayaan	8.878.000.000,00	8.878.000.000,00	23.941.000.000,00
Pembiayaan Neto		110.887.636.000,00	111.098.862.486,80	109.163.079.627,60

a. Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan TA 2018 sebesar Rp119.976.862.486,80 dan TA 2017 sebesar Rp133.104.079.627,60 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 83. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan:		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1)	Penggunaan SiLPA	106.925.094.000,00	106.925.093.495,80	119.670.200.252,60
2)	Pencairan dana cadangan	12.840.542.000,00	12.840.541.100,00	13.159.458.900,00
3)	Penerimaan Kembali Piutang		211.227.891,00	274.420.475,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		119.765.636.000,00	119.976.862.486,80	133.104.079.627,60



b. Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2018 sebesar Rp8.878.000.000,00 dan TA 2017 sebesar Rp23.941.000.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 84 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan:		TA 2018		TA 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1)	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	10.000.000.000,00
2)	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	8.849.000.000,00	8.849.000.000,00	13.941.000.000,00
3)	Pengembalian Biaya Administrasi Pembukaan Rekening BLUD Puskesmas	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		8.878.000.000,00	8.878.000.000,00	23.941.000.000,00

5.1.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)TA 2018 sebesar Rp59.844.279.259,42 dan TA 2017 sebesar Rp106.925.093.495,80 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.85. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) :	2018	2017
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1) Pendapatan dan Belanja :		
a)Realisasi Pendapatan	2.524.365.919.814,62	2.450.766.552.130,20
b)Realisasi Belanja	2.127.372.729.068,00	2.056.964.445.808,00
c) Transfer	448.247.773.974,00	396.040.092.454,00
Surplus (Defisit) Anggaran : a) – b) – c)	(51.254.583.227,38)	(2.237.986.131,80)
2) Pembiayaan :		
a)Penerimaan Daerah	119.976.862.486,80	133.104.079.627,60
b)Pengeluaran Daerah	8.878.000.000,00	23.941.000.000,00
Pembiayaan Neto : a) – b)	111.098.862.486,80	109.163.079.627,60
3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran : (1 + 2)	59.844.279.259,42	106.925.093.495,80

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp59.844.279.259,42,42 dan Rp106.925.093.495,80 rincian masing-masing disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 86 Rincian SiLPA

Rincian SiLPA :	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1) Rekening Giro BUD	41.645.810.899,00	57.457.061.138,00
2) Deposito	0,00	25.000.000.000,00
3) Saldo kas RSUD Dr Soesilo pada BankJateng Cabang Slawi	12.403.163.875,02	16.140.643.115,00
4) Kas BLUD Dinkes	3.633.482.849,80	4.679.264.848,80
5) Kas BLUD RSUD Suradadi	2.845.471,00	223.356.807,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Rincian SILPA :	2018 (Rp)	2017 (Rp)
6) Kas BOS	2.087.440.687,00	3.022.801.141,00
7) Kas di Bendahara Pengeluaran	20.199.984,00	38.512.246,00
8) Kas Bendahara Penerimaan	205.696.500,00	392.454.200,00
9) Utang PFK BLUD Dinkes yang belum disetor	(29.000.000,00)	(29.000.000,00)
10) Koreksi Kas	(3.818.706,40)	0,00
11) Lebih Salur Dana BOS	(5.760.000,00)	0,00
12) Utang BOK Dinkes	(115.782.300,00)	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	59.844.279.259,42	106.925.093.495,80

Rincian SILPA BUD TA 2018 sebesar Rp41.645.810.899,00 terdiri dari SILPA terikat berupa Tunjangan Profesi Guru Rp21.143.288.875,00, Tambahan Penghasilan Guru sebesar Rp779.691.120,00, Tunjangan Khusus Guru sebesar Rp20.532.000,00, Sisa DAK Reguler Fisik sebesar Rp197.486.175,00, Sisa DAK Penugasan Rp6.867.700,00, Sisa DAK Non Fisik sebesar Rp3.837.568.734,00, Sisa Dana Pelayanan Adminidtrasi Kependudukan sebesar Rp374.599.328,00, Bantuan Penyelenggaraan PAUD sebesar Rp85.200.000,00, Sisa DBHCHT sebesar Rp854.303.518,00, Kas BLUD Suradadi sebesar Rp967.241.833,00 dan Silpa lainnya sebesar Rp13.379.031.616,00.

5.2. Laporan Perubahan SAL

5.2.1. Perubahan SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp106.925.093.495,80.

2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2017 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2018 sebesar Rp106.925.093.495,80.

3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp59.844.279.259,42 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Surplus / Defisit Anggaran (Rp51.254.583.227,38)
- Pembiayaan Netto Rp111.098.862.486,80



SiLPA/SiKPA Tahun berjalan Rp 59.844.279.259,42

4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Tahun 2018 tidak ada.

5. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp59.844.279.259,42

5.3. Neraca

5.3.1. Aset

5.3.1.1. Aset Lancar

a. Kas di Kas Daerah

Akun ini menggambarkan saldo Kas Daerah yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang ditempatkan di Bank Jateng Cabang Slawi berupa rekening giro 1-035-00501-7 untuk menampung penerimaan dan pengeluaran rutin maupun yang berasal dari transfer dan bagi hasil dengan saldo kas per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp41.645.810.899,00 dan 2017 sebesar Rp82.457.061.138,00, dengan rincian masing-masing disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 87. Rincian Kas di Kasda

No.	Keterangan	2018 (Rp)	2017(Rp)
	Urusan Wajib :		
1)	Kas di Kas Daerah	41.645.810.899,00	57.457.061.138,00
2)	Deposito Pemerintah Kabupaten Tegal	0,00	25.000.000.000,00
	Jumlah	41.645.810.899,00	82.457.061.138,00

Namun demikian Kas di Kas Daerah seharusnya hanya sebesar Rp40.678.569.066,00, selisihnya sebesar Rp967.241.833,00 merupakan saldo Kas BLUD RSUD Suradadi karena kesalahan petugas bank saat menginput nomor rekening. Seharusnya masuk ke rekening Kas BLUD RSUD Suradadi tetapi terinput ke rekening Kas Daerah. Koreksi transaksi baru dilakukan pada awal Bulan Januari 2019.

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas ini merupakan sisa kas yang masih dipegang oleh bendahara pengeluaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) per 31 Desember 2018 sebesar Rp20.199.984,00 dan tahun 2017 sebesar Rp41.177.553,00, dengan rincian masing-masing disajikan dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Tabel 5. 88. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No.	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1	Kecamatan Bojong	0,00	2.665.307,00
2	Kecamatan Warureja	20.184.479,00	519.066,00
3	Kecamatan Lebaksiu	15.505,00	117.330,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	37.875.850,00
Jumlah		20.199.984,00	41.177.553,00

c. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas ini merupakan sisa kas yang masih dipegang oleh bendahara penerimaan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) per 31 Desember 2018 sebesar Rp282.728.100,00 dan tahun 2017 sebesar Rp392.454.200,00, dengan rincian masing-masing disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 89 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

No.	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
a.	Dinas Perhubungan	9.644.500,00	17.167.000,00
b.	Dinas Parpora	227.528.600,00	363.757.650,00
c.	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	0,00	11.529.550,00
d.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	45.555.000,00	0,00
Jumlah		282.728.100,00	392.454.200,00

d. Kas BLUD

Kas ini merupakan kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. Soeselo, RSUD Suradadi dan Puskesmas. Sebagai BLUD, diberi wewenang untuk menggunakan dana yang bersumber dari pendapatan jasa pelayanan rumah sakit atau puskesmas untuk pembiayaan/pembayaran kegiatan rumah sakit atau puskesmas secara langsung. Saldo kas di BLUD per 31 Desember 2018 adalah sejumlah Rp16.039.492.195,82 dan 2017 sejumlah Rp21.043.264.770,80 rincian masing-masing disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 90. Rincian Kas BLUD

No	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
A	RSUD dr Soeselo Slawi	12.403.163.875,02	16.140.643.115,00
B	RSUD Suradadi	2.845.471,00	223.356.807,00
C	Dinkes (Kas di BLUD Puskesmas)	3.633.482.849,80	4.679.264.848,80
Jumlah Total Kas di BLUD		16.039.492.195,82	21.043.264.770,80

Rincian lebih lanjut atas kas BLUD dapat dilihat pada *lampiran 5.8*.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Rincian Posisi Kas BLUD RSUD dr Soeselo disajikan dalam tabel berikut

Tabel.5.91. Rincian Posisi Kas BLUD RSUD dr. Soeselo

No	Uraian	Nomor Rekening	Jumlah (Rp)
1	Giro Bank Jateng	1-035-00150-8	7.400.400.418,00
2	Deposito Bank Jateng	A249677	5.000.000.000,00
3	Giro Bank Mandiri	139-000-0607089	2.763.457,02
Jumlah Total Kas di BLUD RSUD dr Soeselo			12.403.163.875,02

Rekening Kas BLUD RSUD Suradadi merupakan rekening giro di Bank Jateng dengan nomor rekening 1-035-00724-1 dengan saldo per 31 Desember 2018 Rp2.845.471,00. Seperti diuraikan di penjelasan Kas di Kas Daerah, saldo Kas BLUD RSUD Suradadi seharusnya Rp971.932.775,00 selisihnya sebesar Rp969.087.304,00 terjadi kesalahan input nomor rekening oleh petugas Bank sehingga terinput ke rekening Kas Daerah. Koreksi oleh pihak Bank dilakukan pada awal Bulan Januari 2019. Untuk rincian nomor rekening kas BLUD Puskesmas dapat dilihat pada lampiran 5.9.

e. Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS Merupakan Kas yang berasal dari Dana BOS yang ditransfer dari pemerintah Propinsi saldo per 31 desember 2018 adalah Rp2.087.440.687,00 sedangkan saldo per 31 desember 2017 adalah Rp3.022.801.141,00 .

f. Piutang Pendapatan

Piutang pendapatan sampai dengan akhir Desember 2018 sebesar Rp128.743.618.730,00 sedangkan tahun 2017 sebesar Rp85.858.253.380,00 akun ini menggambarkan hak pemerintah daerah yang berasal dari piutang pajak, piutang retribusi, piutang lain-lain PAD dan piutang lainnya dengan rincian disajikan dalam tabel berikut

Tabel.5.92. Rincian Piutang Pendapatan

No.	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1	Piutang Pajak Daerah	55.152.841.939,00	46.572.415.977,00
2	Piutang Retribusi	1.062.922.654,00	644.834.570,00
3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	72.527.854.137,00	38.641.002.833,00
	Jumlah	128.743.618.730,00	85.858.253.380,00

1) Piutang Pajak

Piutang pajak berada pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Akun ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah yang berasal dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 2018 dan sisa piutang tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp55.152.841.939,00 dan saldo per 31 Desember 2017



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Rp46.572.415.977,00 belum diterima Pemerintah Kabupaten Tegal, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut

Tabel 5.93. Rincian Piutang Pajak

No.	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1	Piutang Pajak Hiburan	608.675,00	608.675,00
2	Piutang Pajak Reklame	22.226.643,00	22.628.490,00
3	Piutang Pajak Air Tanah	65.048.470,00	41.480.760,00
4	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	21.924.000,00	21.924.000,00
5	Piutang PBB	50.788.336.852,00	46.485.774.052,00
6	Piutang PPJU	4.254.697.299,00	
	Jumlah	55.152.841.939,00	46.572.415.977,00

Rincian piutang pajak berdasarkan umur piutang dapat dilihat dalam lampiran 5.10. Rincian piutang pajak berdasarkan umur piutang

2) Piutang Retribusi

Akun ini merupakan piutang pada Sekretariat Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Piutang pada Sekretariat Daerah merupakan piutang Ijin Usaha Konstruksi pada Bagian Ekbang Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)nya namun belum dilunasi oleh Wajib Retribusi. Piutang pada Dinas Perhubungan terdiri dari piutang retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dan piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang telah ditetapkan SKRDnya namun belum dilunasi oleh Wajib Retribusi, sedangkan piutang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan piutang Izin IMB, Izin Gangguan dan pelayanan kesehatan. Saldo per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp1.062.922.654,00 dan Rp644.834.570,00. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.94. Rincian Piutang Retribusi

No.	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	238.037.674,00	238.037.674,00
2	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.400.000,00	700.000,00
3	Piutang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	479.125.000,00	156.000.000,00
4	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	121.185.780,00	84.067.721,00
5	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	199.289.650,00	159.993.025,00
6	Piutang Retribusi Izin Gangguan	4.763.550,00	4.936.150,00
7	Piutang Retribusi Izin Trayek	371.000,00	200.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

No.	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
8	Piutang Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	900.000,00	900.000,00
9	Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair	7.500.000,00	0,00
10	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	10.350.000,00	0,00
Jumlah		1.062.922.654,00	644.834.570,00

3) Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Akun ini merupakan piutang pada BLUD RSUD dr. Soeselo, RSUD Suradadi, Dinas Perhubungan dan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM dan BPKAD. Piutang pada Dinas Perdagangan merupakan Piutang Sewa Shelter TRASA, pada Dinas Perhubungan berupa piutang denda retribusi parkir tepi jalan umum. Piutang BPKAD berupa piutang bunga deposito Bank Jateng merupakan kekurangan penerimaan bunga atas deposito Pemkab Tegal di Bank Jateng sedangkan piutang penyertaan modal Bank Jateng berupa kekurangan penerimaan sumber tambahan setoran modal (STSM) hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dari Bank Jateng. Saldo per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp72.527.854.137,00 dan Rp38.641.002.833,00 Rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.5.95. Rincian Piutang lain – lain Pendapatan Asli Daerah

No.	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1	Piutang BLUD RSUD dr Soeselo	33.126.516.340,00	17.628.554.100,00
2	Piutang BLUD RSUD Suradadi	3.934.232.598,00	1.678.933.063,00
3	Piutang Denda Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	2.179.506,00	3.679.506,00
4	Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Sewa Shelter TRASA)	34.750.000,00	38.050.000,00
5	Piutang Denda PBB	20.800.509.785,00	19.287.691.624,00
6	Piutang Denda Pajak Air Tanah	4.094.540,00	4.094.540,00
7	Piutang Transfer Provinsi	8.270.741.614,00	
8	Piutang Budep Bank Jateng	5.829.754,00	
9	Piutang Penyertaan Modal Bank Jateng	6.349.000.000,00	
Jumlah		72.527.854.137,00	38.641.002.833,00

Rincian piutang BLUD RSUD dr Soeselo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.5.96. Rincian piutang BLUD RSUD dr Soeselo

No.	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
Piutang BLUD RSUD dr Soeselo			
1	-Piutang BPJS	32.358.542.237,00	17.620.454.100,00
2	-Piutang Obat Rawat Jalan Tingkat Lanjut	759.874.103,00	0,00
3	-Piutang Parkir	8.100.000,00	8.100.000,00
JUMLAH		33.126.516.340,00	17.628.554.100,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Rincian piutang BLUD RSUD Suradadi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 5.97. Rincian piutang BLUD RSUD Suradadi

No.	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
	Piutang BLUD RSUD Suradadi		
1	-Piutang BPJS Perawatan	3.349.805.794,00	1.377.898.050,00
2	-Piutang Ambulan BPJS	6.065.000,00	10.770.000,00
3	-Piutang Jasa Raharja	41.986.400,00	83.720.750,00
4	-Piutang Obat Kronis BPJS	511.008.304,00	190.931.263,00
5	-Piutang Jampersal	0,00	15.613.000,00
6	-Piutang BPJS Ketenagakerjaan	25.367.100,00	0,00
	JUMLAH	3.934.232.598,00	1.678.933.063,00

g. Piutang Lainnya

Akun ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah selain dari pajak dan retribusi daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, yang berasal dari pemberian pinjaman dan piutang lain. Pemberian pinjaman diberikan kepada petani, koperasi maupun pengrajin yang disalurkan melalui empat Dinas, yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan. Penerima dana pinjaman harus mengembalikan pokok pinjaman ke kas daerah dan jasa pinjaman. Pemberian pinjaman semula diklasifikasikan sebagai investasi non permanen berupa dana bergulir, namun berdasarkan pola dan karakteristik penyalurannya, dana tersebut tidak memenuhi karakteristik dana bergulir. Hal tersebut telah diungkapkan dalam LHP BPK RI atas LKPD Pemkab Tegal tahun 2009 dan 2010 atas penyajian investasi non permanen pada Neraca Pemkab Tegal dan Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan Investasi Non Permanen berupa Dana Bergulir kepada masyarakat yang dianggap tidak memadai. Dengan melakukan kajian berdasarkan Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang maka pemberian pinjaman dana tersebut lebih mendekati karakteristik sebagai Piutang Berdasarkan Perikatan berupa Pemberian Pinjaman, sehingga kemudian disajikan dalam kelompok piutang lainnya dalam neraca tahun 2013 s.d 2018 berdasarkan pembukuan yang ada pada masing-masing OPD teknis pelaksana. Jumlah Piutang Lainnya pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp10.303.269.051,00. dan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp10.975.611.326,00 yang terdiri dari Piutang yang berasal dari dana bergulir dan piutang lain berupa piutang pada pihak ketiga dijelaskan secara rinci dapat dilihat pada *lampiran 5.11*.

1) Piutang dari Pemberian Pinjaman

Akun ini merupakan piutang yang berasal dari Pemberian Pinjaman



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

dengan rincian sebagai berikut:

a) Dana Pinjaman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Merupakan sisa pokok atas pinjaman yang diberikan kepada Petani Kecil maupun Koperasi Petani yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 belum dibayar oleh para peminjam, dengan rincian masing-masing pinjaman dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 5.98. Rincian Pokok Pinjaman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

NO	URAIAN	2018 (Rp)
1	Pinj. Koperasi Tani Th 2000-2004	123.814.718,00
2	Pinj. Petani Alsintan Th 2001,2003,2004	103.315.617,00
3	Pinjaman P4K Tahun 2003,2004	100.778.664,00
4	Pinj. Petani Cluster Jagung Hib. 2003	41.924.791,00
5	Pinj. Petani Cluster Jagung Hib. 2004	27.451.997,00
6	Pinj. Petani Pingkat. Mutu Intes. Padi Th.2004	102.938.255,00
7	Pinj. Penagkar Benih Tanaman Pangan 2001	10.227.000,00
8	Pinj. Sentra Bawang Putih Tahun 2002	3.020.000,00
9	Pinj. Petani Sentra Kentang Th. 2003	36.620.000,00
10	Pinjaman Petani Melati Tahun 2004	1.738.092,00
	Jumlah	551.829.134,00

Sisa bunga atas pinjaman yang diberikan kepada Petani Kecil maupun Koperasi Petani yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 belum dibayar oleh para peminjam, rincian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 5.99. Rincian Bunga Pinjaman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

NO	URAIAN	2018 (Rp)
1	Pinj. Koperasi Tani Th 2000-2004	12.964.037,00
2	Pinj. Petani Alsintan Th 2001,2003,2004	43.117.959,00
3	Pinjaman P4K Tahun 2003,2004	6.008.281,00
4	Pinj. Petani Cluster Jagung Hib. 2003	(833.760,00)
5	Pinj. Petani Cluster Jagung Hib. 2004	(147.382,00)
6	Pinj. Petani Pingkat. Mutu Intes. Padi Th.2004	12.440.991,00
7	Pinj. Penagkar Benih Tanaman Pangan 2001	1.200.000,00
8	Pinj. Sentra Bawang Putih Tahun 2002	2.700.000,00
9	Pinj. Petani Sentra Kentang Th. 2003	2.100.000,00
10	Pinjaman Petani Melati Tahun 2004	(100.000,00)
	Jumlah	79.450.126,00

b) Dana Pinjaman pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Merupakan sisa pokok atas pinjaman yang diberikan kepada Industri Kecil maupun Pengrajin yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 belum dibayar oleh para peminjam sebesar Rp1.320.429.605,00 dengan rincian masing-masing pinjaman dapat dilihat pada lampiran 5.12.



Sisa bunga atas pinjaman yang diberikan kepada UKM, dan Pengrajin yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 belum dibayar oleh para peminjam sebesar Rp878.666.612,00 dengan rincian dapat dilihat pada *lampiran 5.13*.

c) Dana Pinjaman Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Merupakan sisa pokok atas pinjaman yang diberikan kepada koperasi yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 belum dibayar oleh para peminjam sebesar Rp3.509.646.926,00 dengan rincian masing-masing pinjaman dapat dilihat pada *lampiran 5.14*.

Sisa bunga atas pinjaman yang diberikan kepada Koperasi yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 belum dibayar oleh para peminjam sebesar Rp1.410.294.536,00 dengan rincian dapat dilihat pada *lampiran 5.15*.

d) Dana Pinjaman Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

Merupakan sisa pokok atas pinjaman yang diberikan kepada peternak, petani dan nelayan yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 belum dibayar oleh para peminjam sebesar Rp2.353.199.147,00 dengan rincian dapat dilihat pada *lampiran 5.16*.

Sisa bunga atas pinjaman yang diberikan kepada peternak, petani dan nelayan yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 belum dibayar oleh para peminjam sebesar Rp199.752.965,00 dengan rincian dapat dilihat pada *lampiran 5.17*.

Piutang lainnya tersebut di atas sudah dikoordinasikan dengan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) oleh BPKAD untuk proses penyerahannya.

2) Piutang lain

Piutang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Saldo Piutang PFK pada Tahun Anggaran 2018 tidak ada sedangkan Pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp449.246.684,00. Saldo tersebut Merupakan piutang atas pembayaran BPJS Ketenagakerjaan yang telah dibayarkan pada tahun 2015 sebesar Rp449.246.684,00 yang terdiri dari BPJS Ketenagakerjaan bulan Juli sebesar Rp224.689.928,00 dan bulan Agustus sebesar Rp224.556.756,00.

Namun demikian berdasarkan surat hasil konfirmasi dengan BPJS Ketenagakerjaan Nomor B/5527/042017 Tanggal 20 April 2017 Perihal Keterangan Pembayaran Iuran JKK-JKM Bulan Juli-Agustus 2015, BPJS Ketenagakerjaan tidak dapat mengembalikan iuran Bulan



Juli dan Agustus 2015 dikarenakan BPJS Ketenagakerjaan sudah memberikan perlindungan sosial kepada Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tegal terhitung sampai Bulan Agustus 2015 dan baru diberhentikan kepesertaannya berdasarkan bulan terbitnya Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2015 yaitu terhitung Bulan September 2015.

h. Penyisihan Piutang

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 57 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal maka Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Saldo penyisihan piutang Tahun Anggaran 2018 sebesar (Rp61.433.213.106,04) dan Tahun Anggaran 2017 sebesar (Rp54.329.647.191,61) rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 5.100. Rincian Penyisihan Piutang

No.	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(30.457.827.317,18)	(28.342.873.741,90)
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(693.805.839,00)	(483.791.925,25)
3	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	(19.978.310.898,86)	(14.751.993.540,46)
4	Penyisihan Piutang Pemberian Pinjaman	(10.303.269.051,00)	(10.526.364.642,00)
5	Penyisihan Piutang Perrhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	(224.623.342,00)
	Jumlah	(61.433.213.106,04)	(54.329.647.191,61)

i. Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodic, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Jumlah persediaan tahun 2018 sebesar Rp29.118.837.940,25 dan tahun 2017 sebesar Rp30.855.387.371,98. Tabel Jenis persediaan secara terinci dapat dilihat pada lampiran 5.18.

1) Persediaan Alat Tulis Kantor

Merupakan saldo Persediaan Alat Tulis Kantor per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.067.890.032,00 dan tahun 2017 sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Rp1.404.926.039,00. Rincian persediaan alat kantor per OPD dapat dilihat pada *lampiran 5.19*.

2) Persediaan Alat Listrik dan Elektronik

Merupakan Saldo Alat-alat Listrik Per 31 Desember 2018 sebesar Rp71.512.128,00 dan tahun 2017 sebesar Rp73.984.490,00 rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 5.101. Persediaan Alat Listrik dan Elektronik

No.	Uraian	2018 (Rp.)	2017 (Rp.)
1	RSUD Dr.Soeselo	51.850.198,00	62.682.400,00
2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	957.680,00	0,00
3	Satuan Polisi Pamong Praja	608.000,00	333.000,00
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.560.400,00	440.440,00
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.251.800,00	0,00
6	Sekretariat DPRD	11.282.850,00	10.528.650,00
7	Kecamatan Balapulang	274.000,00	0,00
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	727.200,00	0,00
JUMLAH		71.512.128,00	73.984.490,00

3) Persediaan Materai

Merupakan saldo persediaan Peranko, Materai per 31 Desember 2018 sebesar Rp.60.000,00 dan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp30.000,00 rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 5.102. Rincian Persediaan Materai

No.	Uraian	2018 (Rp.)	2017 (Rp.)
1	Sekretariat DPRD	0,00	30.000,00
2	Kecamatan Balapulang	60.000,00	0,00
JUMLAH		60.000,00	30.000,00

4) Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Merupakan Saldo Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp295.923.390,00 dan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp127.340.570,00 rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 5.103. Rincian Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

No.	Uraian	2018 (Rp.)	2017 (Rp.)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15.707.500,00	0,00
2	RSUD Suradadi	34.887.000,00	0,00
3	Dinas Sosial	280.600,00	0,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	221.215.790,00	118.433.120,00
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	744.500,00	1.414.000,00
6	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	4.034.700,00	0,00
7	Sekretariat Daerah	5.805.200,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

8	Sekretariat DPRD	11.856.600,00	7.340.600,00
9	Kecamatan Dukuhwaru	0,00	48.000,00
10	Kecamatan Kedungbanteng	30.000,00	104.850,00
11	Inspektorat	147.200,00	0,00
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	1.214.300,00	0,00
JUMLAH		295.923.390,00	127.340.570,00

5) Persediaan Bahan Bakar Minyak/ Gas

Merupakan saldo bahan bakar minyak/gas per 31 Desember 2018 sebesar Rp31.199.500,00 yang berada pada Dinas Lingkungan Hidup dan saldo per 31 Desember 2017 yang sebesar Rp7.258.700,00

6) Persediaan Isi Tabung Gas

Merupakan Saldo persediaan isi tabung gas yang berada di RSUD dr. Soeselo Slawi Per 31 Desember 2018 sebesar Rp22.362.500,00 dan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp50.287.500,00.

7) Persediaan Bahan Baku Bangunan

Merupakan saldo persediaan Bahan Baku Bangunan per 31 Desember 2018 sebesar Rp298.961.900,00 dan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp470.852.250,00 rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 5.104. Rincian Persediaan Bahan Baku Bangunan

No.	Uraian	2018 (Rp.)	2017 (Rp.)
1	Dinas Pekerjaan Umum	295.541.400,00	470.407.000,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	3.420.500,00	445.250,00
JUMLAH		298.961.900,00	470.852.250,00

8) Persediaan Bahan/Bibit Tanaman

Merupakan saldo persediaan bibit tanaman yang berada pada Dinas Pertanian, dan Ketahanan Pangan per 31 Desember 2018 sebesar Rp20.799.750,00 dan tahun 2017 sebesar Rp56.551.000,00

9) Persediaan Bibit Ternak

Merupakan saldo persediaan bibit ternak yang berada pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan per 31 Desember 2018 sebesar Rp702.900.000,00 dan tahun 2017 sebesar Rp650.760.000,00

10) Persediaan Bahan Obat-Obatan

Merupakan persediaan obat yang berada di gudang farmasi Dinas Kesehatan, Puskesmas, RSUD dr Soeselo, RSUD Suradadi, Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan dan Dinas Pemabrdayaan



Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana per 31 Desember 2018 sebesar Rp15.489.166.536,51 dan tahun 2017 sebesar Rp18.244.363.692,00.

Tabel persediaan bahan obat-obatan dapat dilihat dalam lampiran tabel.5.20.

Selain persediaan tersebut terdapat persediaan Obat *Expired Date* yang berada pada Dinas Kesehatan sebesar Rp227.842.575,00, RSUD dr Soeselo Slawi sebesar Rp9.364.326,00 dan RSUD Suradadi sebesar Rp30.477.497,29.

11) Persediaan Bahan Kimia

Merupakan saldo persediaan bahan kimia yang berada di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp59.698.211,00 dan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp48.964.710,00 yang merupakan saldo persediaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

12) Persediaan Bahan Makanan Pokok

Merupakan Saldo Bahan Makanan Pokok per 31 Desember 2018 sebesar Rp43.447.560,00 dan tahun 2017 sebesar Rp15.663.334,00 rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 5.105. Rincian Persediaan Bahan Makanan Pokok

No.	Uraian	2018 (Rp.)	2017 (Rp.)
1	RSUD Dr.Soeselo	23.940.000,00	5.064.250,00
2	RSUD Suradadi	19.507.560,00	10.599.084,00
JUMLAH		43.447.560,00	15.663.334,00

13) Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas

Merupakan saldo persediaan suku cadang sarana mobilitas yang berada per 31 Desember 2018 sebesar Rp165.859.392,00 dan tahun 2017 sebesar Rp286.095.413,00 rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 5.106. Rincian Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas

No.	Uraian	2018 (Rp.)	2017 (Rp.)
1	Dinas Lingkungan Hidup	146.856.342,00	286.095.413,00
2	Sekretariat Daerah	19.003.050,00	0,00
JUMLAH		165.859.392,00	286.095.413,00

14) Persediaan Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai

Merupakan saldo Persediaan Bahan dan alat kesehatan habis pakai per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.028.956.423,74 tahun 2017 sebesar Rp2.210.932.428,98 rincian dapat dilihat pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Tabel. 5.107. Rincian Persediaan Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai

No.	Uraian	2018 (Rp.)	2017 (Rp.)
1	RSUD Dr.Soeselo	1.066.485.376,00	1.326.999.504,00
2	RSUD Suradadi	962.471.047,74	883.932.924,98
JUMLAH		2.028.956.423,74	2.210.932.428,98

15) Persediaan Bahan Radiologi

Merupakan Saldo Bahan Radiologi Per 31 Desember 2018 sebesar Rp51.423.000,00 dan tahun 2017 sebesar Rp80.028.387,00 rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 5.108. Rincian Persediaan Bahan Radiologi

No.	Uraian	2018 (Rp.)	2017 (Rp.)
1	RSUD Dr.Soeselo	28.252.500,00	55.965.887,00
2	RSUD Suradadi	23.170.500,00	24.062.500,00
JUMLAH		51.423.000,00	80.028.387,00

16) Persediaan Bahan Laboratorium

Merupakan Saldo Bahan Laboratorium Per 31 Desember 2018 sebesar Rp943.219.285,00 dan tahun 2017 sebesar Rp1.101.342.523,00 rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 5.109. Rincian Persediaan Bahan Laboratorium

No.	Uraian	2018 (Rp.)	2017 (Rp.)
1	RSUD Dr.Soeselo	915.837.825,00	1.074.825.773,00
2	RSUD Suradadi	2.501.460,00	1.716.750,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	24.880.000,00	24.800.000,00
JUMLAH		943.219.285,00	1.101.342.523,00

17) Persediaan Bahan Pemeliharaan Air Bersih

Merupakan saldo bahan pemeliharaan air bersih per 31 Desember 2018 sebesar Rp7.583.000,00 yang berada di RSUD dr Soeselo Slawi dan tahun 2017 sebesar Rp3.852.800,00.

18) Persediaan Alat Kebersihan

Merupakan Saldo Bahan Alat Kebersihan Per 31 Desember 2018 sebesar Rp108.404.062,00 dan tahun 2017 sebesar Rp166.355.675,00 rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 5.110. Rincian Persediaan Alat Kebersihan

No.	Uraian	2018 (Rp.)	2017 (Rp.)
1	RSUD Dr.Soeselo	108.404.062,00	145.959.175,00
2	RSUD Suradadi	0,00	20.396.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

JUMLAH	108.404.062,00	166.355.675,00
--------	----------------	----------------

19) Persediaan Plakat

Merupakan Saldo Persediaan Plakat di Sekretariat Daerah per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp.17.198.500,00 dan tahun 2017 sebesar Rp0,00

20) Persediaan Blanko

Merupakan saldo persediaan Blangko per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.129.196.516,00.dan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.061.583.146,00 yang berada pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

21) Persediaan Bank Darah Rumah Sakit

Merupakan Saldo Persediaan Bank Darah yang berada di RSUD dr. Soeselo Slawi Per 31 Desember 2018 sebesar Rp40.949.950,00 dan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp82.493.036,00

22) Persediaan Hemodialisa

Merupakan Saldo Persediaan Haemodialisa yang berada pada RSUD dr. Soeselo Slawi per 31 Desember 2018 sebesar Rp56.280.400,00 dan tahun 2017 sebesar Rp67.430.220,00

23) Persediaan Alat Kontrasepsi

Merupakan Saldo Persediaan kontrasepsi yang berada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.104.554.081,00 dan tahun 2017 sebesar Rp189.019.600,00

24) Persediaan Cetakan

Merupakan Saldo Persediaan Barang Cetakan per 31 Desember 2018 Rp850.619.383,00 dan tahun 2017 sebesar Rp332.970.143,00 rincian persediaan cetakan per OPD dapat dilihat pada lampiran 5.21.

25) Persediaan Perlengkapan Ruang Pasien

Merupakan Saldo Persediaan Perlengkapan Ruang Pasien per 31 Desember 2018 sebesar Rp145.000,00dan saldo per 31 Desember 2017 yang berada pada RSUD dr. Soeselo Slawi sebesar Rp2.681.300,00.

26) Persediaan Perlengkapan Farmasi

Merupakan saldo Persediaan Perlengkapan Farmasi per 31 Desember 2018 sebesar Rp421.014.589,00 dan Tahun 2017 sebesar Rp482.670.540,00 rincian dapat dilihat pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Tabel. 5.111. Rincian Persediaan Perlengkapan Farmasi

No.	Uraian	2018 (Rp.)	2017 (Rp.)
1	RSUD Dr.Soeselo	110.789.000,00	66.509.000,00
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	310.225.589,00	416.161.540,00
JUMLAH		421.014.589,00	482.670.540,00

27) Persediaan Buku Uji dan Plat Uji

Merupakan saldo persediaan buku uji dan plat uji pada Dinas Perhubungan per 31 Desember 2018 sebesar Rp242.134.145,00 dan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp205.883.920,00.

28) Persediaan Papan IMB

Merupakan saldo persediaan Papan IMB per 31 Desember 2018 sebesar Rp19.228.670,00 dan tahun 2017 sebesar Rp1.775.000,00 rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 5.112. Rincian Persediaan Papan IMB

No.	Uraian	2018 (Rp.)	2017 (Rp.)
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.512.670,00	0,00
2	Kecamatan Dukuhwaru	66.000,00	0,00
3	Kecamatan Jatinegara	410.000,00	960.000,00
4	Kecamatan Kedungbanteng	240.000,00	440.000,00
5	Kecamatan Warurejo		375.000,00
JUMLAH		19.228.670,00	1.775.000,00

29) Persediaan Logistik Bencana

Merupakan saldo persediaan logistik bencana yang berada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp6.494.250,00 dan tahun 2017 sebesar Rp9.675.650,00.

30) Persediaan Karcis

Merupakan saldo persediaan karcis per 31 Desember 2018 sebesar Rp667.973.555,00 dan per 31 Desember 2017 Rp.147.600.040,00 rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 5.113. Rincian Persediaan Karcis

No.	Uraian	2018 (Rp.)	2017 (Rp.)
1	Dinas Perhubungan	41.332.500,00	36.258.750,00
2	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	543.573.555,00	60.219.450,00
3	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	83.067.500,00	51.121.840,00
JUMLAH		667.973.555,00	147.600.040,00



31) Persediaan Aspal

Merupakan saldo persediaan aspal per tanggal 31 Desember 2018 dan per tanggal 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp652.152.209,00 dan Rp1.620.900.400,00 rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 5.114. Rincian Persediaan Aspal

No.	Uraian	2018 (Rp.)	2017 (Rp.)
1	Dinas Pekerjaan Umum	6.622.709,00	1.502.251.480,00
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	645.529.500,00	118.648.920,00
JUMLAH		652.152.209,00	1.620.900.400,00

32) Persediaan Perlengkapan Komputer

Merupakan saldo persediaan Perlengkapan Komputer yang berada per 31 Desember 2018 sebesar Rp868.974.361,00 dan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp57.489.000,00 rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 5.115. Rincian Persediaan Perlengkapan Komputer

No.	Uraian	2018 (Rp.)	2017 (Rp.)
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	825.443.011,00	0,00
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.047.800,00	0,00
3	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	39.492.550,00	56.166.900,00
4	Kecamatan Slawi	264.000,00	0,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.727.000,00	1.322.100,00
JUMLAH		868.974.361,00	57.489.000,00

33) Persediaan Alat-Alat Rumah Tangga

Merupakan saldo persediaan alat-alat rumah tangga yang berada per 31 Desember 2018 sebesar Rp12.734.800,00 dan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00 rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 5.116. Rincian Persediaan Alat – alat Rumah Tangga

No.	Uraian	2018 (Rp.)	2017 (Rp.)
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.729.800,00	0,00
2	Kecamatan Dukuhturi	625.000,00	0,00
3	Kecamatan Kedungbanteng	826.000,00	0,00
4	Kecamatan Warurejo	4.554.000,00	0,00
JUMLAH		12.734.800,00	0,00

34) Persediaan Barang Yang akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga

Merupakan saldo persediaan barang yang akan Diserahkan kepada pihak ketiga per 31 Desember 2018 sebesar Rp339.872.861,00 dan



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp593.625.865,00 rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.117. Rincian Persediaan Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat

No.	Uraian	2018 (Rp.)	2017 (Rp.)
1	Dinas Sosial	4.800.000,00	92.650.000,00
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	310.430.861,00	455.243.865,00
3	Dinas Perhubungan	24.642.000,00	45.732.000,00
JUMLAH		339.872.861,00	593.625.865,00

35) Persediaan Gabah

Merupakan saldo persediaan Gabah untuk cadangan pangan Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Saldo per 31 desember 2018 adalah sebesar Rp279.948.000,00.

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

Akun ini menggambarkan jumlah Investasi Permanen dan Non Permanen untuk tahun 2018 sebesar Rp187.420.693.303,04 dan tahun 2017 sebesar Rp172.877.114.875,85 yaitu berupa Investasi Permanen. Akun ini menggambarkan jumlah dana milik Pemerintah Kabupaten Tegal yang ditempatkan untuk jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi, dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) Kabupaten Tegal pada Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah (BUMD/PD), BPR/BKK dan lainnya. Saldo dinilai dengan metode biaya untuk kepemilikan kurang dari 20% dan metode ekuitas untuk metode kepemilikan lebih dari 20%. Jumlah saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp187.420.693.303,04 dan 2017 sebesar Rp172.877.114.875,85.

1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp187.420.693.303,04 dan 2017 sebesar Rp172.877.114.875,85 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.118. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
a)	PMPD pada BUMD/PD	187.420.693.303,04	172.487.114.875,85
b)	PMPD pada Yayasan Purna Bakti	0,00	390.000.000,00
Jumlah PMPD		187.420.693.303,04	172.877.114.875,85

a) PMPD pada BUMD/PD

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD/PD per 31 Desember 2018 sebesar Rp187.420.693.303,04 dan Tahun 2017 sebesar Rp172.487.114.875,85 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Tabel 5.119. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD/PD

No	Uraian	2017 (Rp)	Penyertaan Modal 2018	Metode Ekuitas	2018 (Rp)
(1)	Bank Jateng	35.387.000.000,00	6.349.000.000,00		41.736.000.000,00
(2)	PDAM	92.230.172.423,00	1.500.000.000,00	10.145.725.748,00	103.875.898.171,00
(3)	PRPP Jateng, Semarang	407.200.000,00			407.200.000,00
(4)	BPR BKK Kabupaten Tegal	10.683.004.400,20		202.270.864,32	10.885.275.264,52
(5)	BKK Slawi	17.730.301.841,65		(4.311.738.009,13)	13.418.563.832,52
(6)	Bank TGR	16.049.436.211,00	1.000.000.000,00	48.319.824,00	17.097.756.035,00
Jumlah		172.487.114.875,85	8.849.000.000,00	6.084.578.427,19	187.420.693.303,04

- (1) PMPD Kabupaten Tegal pada Bank Jateng merupakan penyertaan saham biasa dan dinilai dengan metode biaya karena kepemilikannya kurang dari 20%. Saldo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp41.736.000.000,00 dan saldo Per 31 Desember 2017 sebesar Rp35.387.000.000,00.
- (2) PMPD pada PDAM Kabupaten Tegal merupakan penyertaan saham, yang dinilai dengan metode ekuitas karena kepemilikannya 100%. Saldo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp103.875.898.171,00 dan Per 31 Desember 2017 sebesar Rp92.230.172.423,00.
- (3) PMPD pada PRPP Jateng, Semarang merupakan penyertaan saham Kabupaten Tegal kepada PT. PRPP Jateng, dinilai dengan metode biaya karena kepemilikannya kurang dari 20%. Saldo per 31 Desember 2018 tidak mengalami perubahan dari jumlah penyertaan Tahun 2017 sebesar Rp407.200.000,00
- (4) PMPD pada PD BPR-BKK Kabupaten Tegal merupakan penyertaan saham, yang Tahun 2018 dinilai dengan metode ekuitas karena kepemilikannya lebih dari 20%. Saldo per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp10.885.275.264,52 dan Rp10.683.004.400,20. Perhitungan nilai penyertaan pada BPR BKK Kabupaten Tegal per 31 Desember 2018 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.120. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BPR-BKK Kabupaten Tegal

No.	Investee	Modal Disetor	Cadangan	Laba (Rugi)	Jumlah	Hak Pemkab Tegal	
						%	Rp
1	BPR BKK Kabupaten Tegal	14.730.000.000,00	4.298.863.908,00	2.786.116.316,00	21.814.980.224,00	49,90	10.885.275.264,52
	Jumlah	14.730.000.000,00	4.298.863.908,00	2.786.116.316,00	21.814.980.224,00		10.885.275.264,52



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

(5) PMPD pada BKK Slawi merupakan penyertaan saham, yang Tahun 2018 dinilai dengan metode ekuitas karena kepemilikannya lebih dari 20%. Saldo per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp13.418.563.832,52 dan Rp17.730.301.841,65. Perhitungan nilai penyertaan pada BKK Slawi per 31 Desember 2018 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.121. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BKK Slawi

No.	Investee	Modal Disetor	Cadangan	Laba (Rugi)	Jumlah	Hak Pemkab Tegal	
						%	Rp
1	BKK Slawi	25.000.000.000,00	4.237.622.119,00	(1.852.797.971,00)	27.384.824.148,00	49,00	13.418.563.832,52
	Jumlah	25.000.000.000,00	4.237.622.119,00	(1.852.797.971,00)	27.384.824.148,00		13.418.563.832,52

(6) Penyertaan pada Bank TGR merupakan penyertaan Pemerintah Daerah kepada Bank TGR, yang Tahun 2018 dinilai dengan metode ekuitas karena kepemilikannya 100%. Saldo per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp17.097.756.035,00 dan Rp16.049.436.211,00. Perhitungan nilai penyertaan pada Bank TGR per 31 Desember 2018 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.122. Investasi pada Bank TGR

No.	Investee	Modal Disetor	Cadangan	Laba (Rugi)	Jumlah	Hak Pemkab Tegal	
						%	Rp
1	Bank TGR	15.000.000.000,00	892.323.745,00	1.205.432.290,00	17.097.756.035,00	100	17.097.756.035,00
	Jumlah	15.000.000.000,00	892.323.745,00	1.205.432.290,00	17.097.756.035,00		17.097.756.035,00

b) Saldo Penyertaan pada Yayasan Purna Bakti untuk tahun 2018 adalah tidak ada. Penyertaan pada yayasan Purna Bakti yaitu sebesar Rp390.000.000,00. Berdasar pada ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pemberian Kuasa Kepala Menteri Dalam Negeri untuk mendirikan dan mengelola Yayasan Purna Bakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa modal pertama tunjangan purna bakti bersumber dari sumbangan Pemerintah Daerah atas beban DPRD yang jumlahnya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Atas pencatatan dalam Investasi Permanen belum ada Surat Keputusan Penghapusan Investasi oleh Bupati, hanya kejelasan atas status.

5.3.1.3. Aset Tetap

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Tegal berupa aset tetap yang dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Penyajian Nilai Aset Tetap dalam Neraca LKPD Tahun 2018 menggunakan metode kapitalisasi atas realisasi belanja modal



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Tahun 2018 ditambah dengan nilai administratif Aset Tetap yang ada dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2017. Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. Pada Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Tegal telah melakukan penyusutan terhadap aset tetap dengan pengecualian tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, sedangkan untuk metode penyusutan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) dengan rumus sebagai berikut :

Penyusutan Per Periode : $\frac{\text{Nilai Yang Disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$

Berdasarkan catatan dari Organisasi Perangkat Daerah nilai Aset Tetap untuk Tahun 2017 sebesar Rp2.545.149.761.767,63 dan Tahun 2018 sebesar Rp2.711.651.573.752,71 yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.123 Aset Tetap

Uraian		2017 (Rp)	2018 (Rp)
a.	Tanah	661.991.402.211,00	658.586.320.676,00
b.	Peralatan dan mesin	504.541.413.485,80	549.694.166.077,80
c.	Gedung dan Bangunan	1.050.064.517.465,00	1.109.711.114.618,00
d.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.642.639.132.175,00	1.851.964.429.286,00
e.	Aset Tetap Lainnya	87.406.387.745,92	111.580.782.721,46
f.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.001.248.037,00	14.898.078.786,00
g.	Akumulasi Penyusutan	(1.408.494.339.352,08)	(1.584.783.318.412,54)
Jumlah Aset Tetap		2.545.149.761.767,63	2.711.651.573.752,72

Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap dalam TA 2018 sebagai berikut :

Tabel 5.124. Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap

Aktiva Tetap	Saldo	Mutasi Tahun 2018		Saldo
	Per 31 Desember 2017	Penambahan	Pengurangan	Per 31 Desember 2018
Tanah	661.991.402.211,00	3.532.268.385,00	6.937.349.920,00	658.586.320.676,00
Peralatan dan Mesin	504.541.413.485,80	134.584.103.431,00	89.431.350.839,00	549.694.166.077,80
Gedung dan Bangunan	1.050.064.517.465,00	131.562.231.124,00	71.915.633.971,00	1.109.711.114.618,00
Jalan, Jembatan dan Irigasi	1.642.639.132.175,00	289.325.496.953,00	80.000.199.842,00	1.851.964.429.286,00
Aset Tetap lainnya	87.406.387.745,92	28.218.643.319,00	4.044.248.343,46	111.580.782.721,46
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	7.001.248.037,00	14.898.078.786,00	7.001.248.037,00	14.898.078.786,00
Akumulasi Penyusutan	(1.408.494.339.352,09)	44.627.736.097,59	220.916.715.158,04	(1.584.783.318.412,54)
Jumlah	2.545.149.761.767,63	646.748.558.095,59	480.246.746.110,50	2.711.651.573.752,72



a. Tanah

Nilai Aktiva Tetap Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal per 31 Desember 2017 dan 2018 masing-masing sebesar Rp661.991.402.211,00 dan Rp658.586.320.676,00 .Adapun rincian asset tetap tanah pemerintah daerah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

a.1 Tanah Perkampungan

Tanah Perkampungan saldo pada 2017 sebesar Rp11.509.993.000,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp12.514.064.125 terjadi penambahan sebesar Rp1.004.071.125,00 dan pengurangan sebesar Rp0,00

a.2 Tanah Pertanian

Tanah Pertanian saldo pada 2017 sebesar Rp26.850.017.500,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp26.850.017.500,00 terjadi penambahan sebesar Rp0,00 dan pengurangan sebesar Rp0,00.

a.3 Tanah Perkebunan

Tanah Perkebunan saldo pada 2017 sebesar Rp582.881.000,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp582.881.000,00 terjadi penambahan sebesar Rp0,00 dan pengurangan sebesar Rp0,00

a.4 Kebun Campuran

Kebun Campuran saldo pada 2017 sebesar Rp5.947.638.750,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp5.947.638.750,00 terjadi penambahan sebesar Rp0,00 dan pengurangan sebesar Rp0,00

a.5 Hutan

Hutan saldo pada 2017 sebesar Rp146.540.000,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp146.540.000,00 terjadi penambahan sebesar Rp0,00 dan pengurangan sebesar Rp0,00.

a.6 Kolam Ikan

Kolam Ikan saldo pada 2017 sebesar Rp297.540.000,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp297.540.000,00 terjadi penambahan sebesar Rp0,00 dan pengurangan sebesar Rp0,00.

a.7 Tanah Untuk Bangunan Gedung

Tanah Untuk Bangunan Gedung saldo pada 2017 sebesar Rp208.282.961.400,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp204.194.654.740,00 terjadi penambahan sebesar Rp2.313.556.340,00 dan pengurangan sebesar Rp6.401.863.000,00.

a.8 Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung

Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung saldo pada 2017 sebesar Rp408.373.830.561,00 dan pada tahun 2018 menjadi



Rp408.577.984.561,00 terjadi penambahan sebesar Rp214.640.920,00 dan pengurangan sebesar Rp10.486.920,00.

b. Peralatan dan Mesin

Aktiva Tetap Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Kabupaten Tegal adalah peralatan dan mesin yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tegal untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp504.541.413.485,80 dan Rp549.694.166.077,80. Adapun rincian penambahan dan pengurangan adalah sebagai berikut:

b.1 Alat-Alat Besar Darat

Alat-alat besar darat saldo pada 2017 sebesar Rp21.755.832.409,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp24.230.430.993,00 terjadi penambahan sebesar Rp2.475.448.584,00 dan pengurangan sebesar Rp850.000,00.

b.2 Alat-Alat Besar Apung

Alat-alat Besar Apung saldo pada 2017 sebesar Rp80.530.500,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp80.530.500,00 terjadi penambahan sebesar Rp0,00 dan pengurangan sebesar Rp0,00.

b.3 Alat-alat Bantu

Alat-alat bantu saldo pada 2017 sebesar Rp7.320.462.369,92 dan pada tahun 2018 menjadi Rp8.009.967.021,92 terjadi penambahan sebesar Rp770.426.652,00 dan pengurangan sebesar Rp80.922.000,00.

b.4 Alat Angkutan Darat Bermotor

Alat Angkutan Darat Bermotor saldo pada 2017 sebesar Rp88.780.759.090,28 dan pada tahun 2018 menjadi Rp95.956.569.404,28 terjadi penambahan sebesar Rp17.449.500.939,00 dan pengurangan sebesar Rp10.273.690.625,00.

b.5 Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

Alat Angkutan Darat Tak Bermotor saldo pada 2017 sebesar Rp2.142.643.186,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp2.675.987.120,00 terjadi penambahan sebesar Rp551.113.934,00 dan pengurangan sebesar Rp17.770.000,00.

b.6 Alat Angkut Apung Bermotor

Alat Angkut Apung Bermotor saldo pada 2017 sebesar Rp45.599.909,00 dan pada tahun 2018 Rp45.599.909,00 terjadi penambahan sebesar Rp0,00 dan pengurangan sebesar Rp0,00.



b.7 Alat Angkut Apung Tak Bermotor

Alat Angkut Apung Tak Bermotor saldo pada 2017 sebesar Rp63.079.881,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp63.079.881,00 terjadi penambahan sebesar Rp0,00 dan pengurangan sebesar Rp0,00.

b.9 Alat Bengkel Bermesin

Alat Bengkel Bermesin saldo pada 2017 sebesar Rp5.481.490.202,56 dan pada tahun 2018 menjadi Rp5.094.422.008,56 terjadi penambahan sebesar Rp12.417.176,00 dan pengurangan sebesar Rp399.485.370,00.

b.10 Alat Bengkel Tak Bermesin

Alat Bengkel Tak Bermesin saldo pada 2017 sebesar Rp3.064.341.460,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp2.783.340.290,00 terjadi penambahan sebesar Rp38.380.420,00 dan pengurangan sebesar Rp319.381.590,00.

b.11 Alat Ukur

Alat Ukur saldo pada 2017 sebesar Rp3.520.134.525,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp3.214.803.924,00 terjadi penambahan sebesar Rp805.275.339,00 dan pengurangan sebesar Rp1.110.605.940,00.

b.12 Alat Pengolahan

Alat Pengolahan saldo pada 2017 sebesar Rp1.036.535.709,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp1.065.283.709,00 terjadi penambahan sebesar Rp87.750.000,00 dan pengurangan sebesar Rp59.002.000,00.

b.13 Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan

Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan saldo pada 2017 sebesar Rp1.412.968.480,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp1.814.812.100,00 terjadi penambahan sebesar Rp464.182.478,00 dan pengurangan sebesar Rp62.338.858,00.

b.14 Alat Kantor

Alat Kantor saldo pada 2017 sebesar Rp19.297.741.201,84 dan pada tahun 2018 menjadi Rp23.763.486.414,84 terjadi penambahan sebesar Rp6.204.798.911,00 dan pengurangan sebesar Rp1.739.053.698,00.

b.15 Alat Rumah Tangga

Alat Rumah Tangga saldo pada 2017 sebesar Rp98.274.961.477,23 dan pada tahun 2018 menjadi Rp105.386.543.276,23 terjadi penambahan sebesar Rp27.273.370.448,00 dan pengurangan sebesar Rp20.161.788.649,00.



b.16 Komputer

Komputer saldo pada 2017 sebesar Rp58.047.640.082,34 dan pada tahun 2018 menjadi Rp63.355.733.815,34 terjadi penambahan sebesar Rp9.729.802.027,00 dan pengurangan sebesar Rp4.421.708.294,00

b.17 Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat saldo pada 2017 sebesar Rp7.092.402.403,49 dan pada tahun 2018 menjadi Rp8.502.439.629,49 terjadi penambahan sebesar Rp1.804.166.406,00 dan pengurangan sebesar Rp394.129.180,00.

b.18 Alat Studio

Alat Studio saldo pada 2017 sebesar Rp11.801.293.807,66 dan pada tahun 2018 menjadi Rp13.219.197.053,66 terjadi penambahan sebesar Rp2.318.006.848,00 dan pengurangan sebesar Rp900.103.602,00.

b. 19 Alat Komunikasi

Alat Komunikasi saldo pada 2017 sebesar Rp3.334.150.923,40 dan pada tahun 2018 menjadi Rp4.021.591.062,40 terjadi penambahan sebesar Rp797.427.414,00 dan pengurangan sebesar Rp109.987.275,00.

b.20 Peralatan Pemancar

Peralatan Pemancar saldo pada 2017 sebesar Rp954.210.218,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp999.813.857,00 terjadi penambahan sebesar Rp49.603.639,00 dan pengurangan sebesar Rp4.000.000,00.

b.21 Alat Kedokteran

Alat Kedokteran saldo pada 2017 sebesar Rp104.520.129.025,03 dan pada tahun 2018 menjadi Rp115.002.684.443,03 terjadi penambahan sebesar Rp11.548.398.295,00 dan pengurangan sebesar Rp1.065.842.877,00

b.22 Alat Kesehatan

Alat Kesehatan saldo pada 2017 sebesar Rp9.058.145.697,77 dan pada tahun 2018 menjadi Rp13.493.587.081,77 terjadi penambahan sebesar Rp13.645.035.590,00 dan pengurangan sebesar Rp9.209.594.206,00

b.23 Unit-Unit Laboratorium

Unit-Unit Laboratorium saldo pada 2017 sebesar Rp30.178.643.962,36 dan pada tahun 2018 menjadi Rp29.187.872.999,36 terjadi penambahan sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Rp1.342.491.710,00 dan pengurangan sebesar
Rp2.333.262.673,00

b.24 Alat Peraga/Praktek Sekolah

Alat Peraga/Praktek Sekolah saldo pada 2017 sebesar
Rp25.272.347.444,93 dan pada tahun 2018 menjadi
Rp25.575.413.597,33 terjadi penambahan sebesar
Rp36.176.752.160,00 dan pengurangan sebesar
Rp35.873.686.007,00

b.25 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir

Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir saldo pada 2017 sebesar
Rp93.853.500,00 dan pada tahun 2018 menjadi
Rp63.550.500,00 terjadi penambahan sebesar Rp0,00 dan
pengurangan sebesar Rp30.303.000,00

b.26 Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika

Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika saldo pada 2017
sebesar Rp13.847.000,00 dan pada tahun 2018 menjadi
Rp13.847.000,00 terjadi penambahan sebesar Rp0,00 dan
pengurangan sebesar Rp0,00.

b.27 Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan

Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan saldo pada 2017
sebesar Rp25.334.500,00 dan pada tahun 2018 menjadi
Rp25.334.500,00 terjadi penambahan sebesar
Rp392.275.000,00 dan pengurangan sebesar Rp392.275.000,00

b.28 Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory
(BATAM)

Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory
(BATAM) saldo pada 2017 sebesar Rp93.163.818,00 dan pada
tahun 2018 menjadi Rp93.163.818,00 terjadi penambahan
sebesar Rp0,00 dan pengurangan sebesar Rp0,00.

b.29 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup

Alat Laboratorium Lingkungan Hidup saldo pada 2017 sebesar
Rp1.154.840.492,00 dan pada tahun 2018 menjadi
Rp1.169.400.492,00 terjadi penambahan sebesar
Rp15.710.000,00 dan pengurangan sebesar Rp1.150.000,00.

b.30 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika

Peralatan Laboratorium Hidrodinamika saldo pada 2017 sebesar
Rp224.750.000,00 dan pada tahun 2018 menjadi
Rp340.608.500,00 terjadi penambahan sebesar
Rp116.408.500,00 dan pengurangan sebesar Rp550.000,00.



b.31 Senjata Api

Senjata Api saldo pada 2017 sebesar Rp17.062.960,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp17.062.960,00 terjadi penambahan sebesar Rp0,00 dan pengurangan sebesar Rp0,00.

b.32 Persenjataan Non Senjata Api

Persenjataan Non Senjata Api saldo pada 2017 sebesar Rp380.267.250,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp428.008.216,00 terjadi penambahan sebesar Rp54.998.216,00 dan pengurangan sebesar Rp7.257.250,00.

c. Gedung dan Bangunan

Aktiva tetap Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal per 31 Desember 2017 dan 2018 masing-masing sebesar Rp1.050.064.517.465,00 dan Rp1.109.711.114.618,00. Adapun rincian penambahan dan pengurangan adalah sebagai berikut:

c.1 Bangunan Gedung Tempat Kerja

Bangunan Gedung Tempat Kerja saldo pada 2017 sebesar Rp977.335.694.901,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp1.032.769.726.893,00 terjadi penambahan sebesar Rp126.656.863.927,00 dan pengurangan sebesar Rp71.222.831.935,00.

c.2 Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Bangunan Gedung Tempat Tinggal saldo pada 2017 sebesar Rp24.720.335.857,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp24.876.910.857,00 terjadi penambahan sebesar Rp156.575.000,00 dan pengurangan sebesar Rp0,00

c.4 Bangunan Bersejarah

Bangunan Bersejarah saldo pada 2017 sebesar Rp4.784.145.469,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp5.520.020.695,00 terjadi penambahan sebesar Rp882.404.532,00 dan pengurangan sebesar Rp146.529.306,00

c.5 Tugu Peringatan

Tugu Peringatan saldo pada 2017 sebesar Rp5.073.145.920,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp5.157.306.920,00 terjadi penambahan sebesar Rp84.161.000,00 dan pengurangan sebesar Rp0,00.

c.6 Candi

Candi saldo pada tahun 2017 sebesar Rp0,00 dan pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp199.511.900,00 terjadi penambahan sebesar Rp199.511.900,00 dan pengurangan sebesar Rp0,00

c.7 Monumen/Bangunan Bersejarah



Monumen/Bangunan Bersejarah saldo pada 2017 sebesar Rp536.157.352,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp536.157.352,00 terjadi penambahan sebesar Rp0,00 dan pengurangan sebesar Rp0,00.

c.8 Tugu Peringatan

Tugu Peringatan saldo pada 2017 sebesar Rp119.605.000,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp 121.205.000,00 terjadi penambahan sebesar Rp 1.600.000,00 dan pengurangan sebesar Rp0,00.

c.9 Tugu Titik Kontrol/Pasti

Tugu Titik Kontrol/Pasti saldo pada 2017 sebesar Rp1.326.663.611,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp terjadi penambahan sebesar Rp239.986.500,00 dan pengurangan sebesar Rp1.566.650.111,00

c.10 Rambu-Rambu

Rambu-Rambu saldo pada 2017 sebesar Rp36.622.674.355,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp38.963.624.890,00 terjadi penambahan sebesar Rp2.887.223.265,00 dan pengurangan sebesar Rp546.272.730,00

d. Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan

Aktiva tetap jalan, jembatan, irigasi dan jaringan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal per 31 Desember 2017 dan 2018 masing-masing sebesar Rp1.642.639.132.175,00 dan Rp1.851.964.429.286,00. Adapun rincian penambahan dan pengurangan adalah sebagai berikut:

d.1 Jalan

Jalan saldo pada 2017 sebesar Rp1.138.295.770.415,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp1.268.560.837.714,00 terjadi penambahan sebesar Rp186.511.765.608,00 dan pengurangan sebesar Rp56.246.698.309,00.

d.2 Jembatan

Jembatan saldo pada 2017 sebesar Rp162.991.760.315,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp170.667.049.137,00 terjadi penambahan sebesar Rp10.764.109.744,00 dan pengurangan sebesar Rp3.088.820.922,00.

d.3 Bangunan Air Irigasi

Bangunan Air Irigasi saldo pada 2017 sebesar Rp109.075.586.046,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp136.277.391.980,00 terjadi penambahan sebesar Rp28.969.815.474,00 dan pengurangan sebesar Rp1.768.009.540,00.



d.4 Bangunan Air Pasang Surut

Bangunan Air Pasang Surut saldo pada 2017 sebesar Rp18.532.947.235,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp0,00 terjadi penambahan sebesar Rp0,00 dan pengurangan sebesar Rp18.532.947.235,00

d.5 Bangunan Air Rawa

Bangunan Air Rawa saldo pada 2017 sebesar Rp94.361.000,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp492.223.000,00 terjadi penambahan sebesar Rp397.862.000,00 dan pengurangan sebesar Rp0,00.

d.6 Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam

Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam saldo pada 2017 sebesar Rp117.568.543.887,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp156.220.101.332,00 terjadi penambahan sebesar Rp38.850.957.445,00 dan pengurangan sebesar Rp199.400.000,00

d.7 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah

Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah saldo pada 2017 sebesar Rp3.560.540.250,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp3.602.040.250,00 terjadi penambahan sebesar Rp44.500.000,00 dan pengurangan sebesar Rp3.000.000,00.

d.8 Bangunan Air Bersih/Baku

Bangunan Air Bersih/Baku saldo pada 2017 sebesar Rp43.162.054.626,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp0,00 terjadi penambahan sebesar Rp0,00 dan pengurangan sebesar Rp43.162.054.626,00

d.9 Bangunan Air Kotor

Bangunan Air Kotor saldo pada 2017 sebesar Rp14.523.666.351,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp15.108.742.001,00 terjadi penambahan sebesar Rp585.075.650,00 dan pengurangan sebesar Rp0,00.

d.10 Bangunan Air

Bangunan Air saldo pada 2017 sebesar Rp2.660.156.266,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp2.660.156.266,00 terjadi penambahan sebesar Rp0,00 dan pengurangan sebesar Rp0,00.

d.11 Instalasi Air Minum/Air Bersih

Instalasi Air Minum/Air Bersih saldo pada 2017 sebesar Rp1.938.913.420,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp1.948.485.420,00 terjadi penambahan sebesar Rp52.000.000,00 dan pengurangan sebesar Rp46.600.000,00



d.12 Instalasi Air Kotor

Instalasi Air Kotor saldo pada 2017 sebesar Rp3.524.157.375,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp5.333.842.375,00 terjadi penambahan sebesar Rp13.888.672.321,00 dan pengurangan sebesar Rp12.078.987.321,00.

d.13 Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik

Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik saldo pada 2017 sebesar Rp117.198.000,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp117.198.000,00 terjadi penambahan sebesar Rp2.635.279.500,00 dan pengurangan sebesar Rp2.635.279.500,00.

d.14 Instalasi Pembangkit Listrik

saldo pada 2017 sebesar Rp15.359.700,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp16.359.700,00 terjadi penambahan sebesar Rp1.000.000,00 dan pengurangan sebesar Rp0,00.

d.15 Instalasi Gardu Listrik

Instalasi Gardu Listrik saldo pada 2017 sebesar Rp7.563.847.973,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp7.573.347.973,00 terjadi penambahan sebesar Rp9.500.000,00 dan pengurangan sebesar Rp0,00.

d.16 Instalasi Pengaman/Pertahanan

Instalasi Pengaman saldo pada 2017 sebesar Rp0,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp0,00 terjadi penambahan sebesar Rp0,00 dan pengurangan sebesar Rp0,00.

d.17 Instalasi Gas

Instalasi Gas saldo pada 2017 sebesar Rp910.614.528,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp910.614.528,00 terjadi penambahan sebesar Rp0,00 dan pengurangan sebesar Rp0,00.

d.18 Instalasi Pengaman

Instalasi Pengaman saldo pada 2017 sebesar Rp163.405.650,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp149.049.400,00 terjadi penambahan sebesar Rp650.000,00 dan pengurangan sebesar Rp15.006.250,00.

d.19 Jaringan Air Minum

Jaringan Air Minum saldo pada 2017 sebesar Rp5.705.700,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp8.567.300,00 terjadi penambahan sebesar Rp2.861.600,00 dan pengurangan sebesar Rp0,00.



d.20 Jaringan Listrik

Jaringan Listrik saldo pada 2017 sebesar Rp17.546.823.742,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp20.237.153.353,00 terjadi penambahan sebesar Rp6.608.447.611,00 dan pengurangan sebesar Rp3.918.118.000,00.

d.21 Jaringan Telepon

Jaringan Telepon saldo pada 2017 sebesar Rp378.948.298,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp381.668.298,00 terjadi penambahan sebesar Rp3.000.000,00 dan pengurangan sebesar Rp280.000,00.

d.22 Jaringan Gas

Jaringan Gas saldo pada 2017 sebesar Rp4.599.398,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp4.599.398,00 terjadi penambahan sebesar Rp0,00 dan pengurangan sebesar Rp0,00.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aktiva milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal berupa barang corak kesenian, dan buku per 31 Desember 2017 dan 2018 yang masing-masing bernilai Rp87.406.387.745,92 dan Rp111.580.782.721,46. Adapun rincian mutasi penambahan dan pengurangan adalah sebagai berikut :

e.1 Buku

Buku saldo pada 2017 sebesar Rp79.005.013.470,92 dan pada tahun 2018 menjadi Rp102.869.735.242,46 terjadi penambahan sebesar Rp26.786.286.115,00 dan pengurangan sebesar Rp2.921.564.343,46

e.2 Terbitan

Terbitan saldo pada 2017 sebesar Rp39.343.267,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp34.113.517,00 terjadi penambahan sebesar Rp0,00 dan pengurangan sebesar Rp5.229.750,00

e.3 Barang-Barang Perpustakaan

Barang-Barang Perpustakaan saldo pada 2017 sebesar Rp454.429.821,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp520.671.221,00 terjadi penambahan sebesar Rp268.443.400,00 dan pengurangan sebesar Rp202.202.000,00

e.4 Barang Bercorak Kebudayaan

Barang Bercorak Kebudayaan saldo pada 2017 sebesar Rp7.458.337.337,04 dan pada tahun 2018 menjadi Rp7.683.955.891,04 terjadi penambahan sebesar Rp239.908.554,00 dan pengurangan sebesar Rp14.290.000,00.



e.5 Alat Olah Raga Lainnya

Alat Olah Raga Lainnya saldo pada 2017 sebesar Rp162.146.500,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp183.390.600,00 terjadi penambahan sebesar Rp21.244.100,00 dan pengurangan sebesar Rp0,00.

e.6 Hewan

Hewan saldo pada 2017 sebesar Rp109.500,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp182.500,00 terjadi penambahan sebesar Rp73.000,00 dan pengurangan sebesar Rp0,00.

e.7 Tanaman

Tanaman saldo pada 2017 sebesar Rp289.257.849,96 dan pada tahun 2018 menjadi Rp288.733.749,96 terjadi penambahan sebesar Rp15.439.900,00 dan pengurangan sebesar Rp15.964.000,00

e.8 Aset Tetap Renovasi

Aset Tetap Renovasi saldo pada 2017 sebesar Rp0,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp0,00 terjadi penambahan sebesar Rp884.998.250,00 dan pengurangan sebesar Rp884.998.250,00

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan Adalah berupa kegiatan yang belum dapat diselesaikan pelaksanaannya. Untuk Tahun Anggaran 2017 Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebesar Rp7.001.248.037,00 yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum. Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2017 telah dilakukam mutasi sebagai aset tetap Bangunan Gedung ke Sekretariat Daerah sebesar Rp1.953.426.415,00 dan sebagai aset tetap Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp5.047.821.622,00 .Untuk Tahun Anggaran 2018 Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebesar Rp14.898.078.786,00. Pada Dinas Kesehatan berupa pembangunan Gedung Puskesmas Slawi berdasarkan kontrak Nomor 050/05/2691/2018 tanggal 6 September 2018 sebesar Rp2.175.381.072 ,00 dan Puskesmas Penusupan berupa belanja modal gedung Puskesmas Penusupan berdasarkan Nomor kontrak 050/05/1856/2018 tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp2.344.120.000,00 yang belum memenuhi kriteria menjadi aset tetap gedung dan bangunan karena belum selesai. Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan berupa pembangunan Pasar Bojong sebesar Rp10.378.577.714,00 yang belum selesai sampai 31 Desmber 2018. Berdasarkan SPK Nomor 050/07/01.1/SP/Pasar Bojong.BG/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 nilai kontrak Rp12.620.249.000,00 dan adendum Nomor 050/07/01/ADD-I/Pasar Bojong.BG/XI/2018 tanggal 5 November 2018 dengan nilai



adendum Rp12.620.249.000,00 akan tetapi volume realisasi pekerjaan 79,87% yang dapat diselesaikan oleh Rekanan sampai tanggal 31 Desember 2018. Sehingga belanja modal tersebut belum di catat sebagai aset tetap gedung dan bangunan tetapi masih di catat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan karena belum ada Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sampai 31 Desember 2018.

g. Akumulasi Penyusutan

Penyusutan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.408.494.339.352,09 dan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp1.584.783.318.412,54. Adapun rincian akumulasi penyusutan pada masing-masing organisasi perangkat daerah disajikan dalam lampiran 5.22.

5.3.1.4. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah dana yang dibentuk untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018. Saldo per 31 Desember 2018 adalah tidak ada karena sudah ada pencairan dana cadangan untuk penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tegal. Saldo per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp14.641.716.729,00 terdiri dari Dana Cadangan sebesar Rp12.840.541.100,00 dan bunga Deposito sebesar Rp1.801.175.629,00

5.3.1.5. Aset Lainnya

Akun ini menggambarkan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tegal berupa Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset yang tidak dapat digolongkan ke dalam klasifikasi Aset Tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp118.310.028.051,65 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp78.084.280.924,98 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.125 Aset Lainnya

Uraian		2018 (Rp)	2017 (Rp)
a.	Tagihan Jangka Panjang	335.147.291,61	335.147.291,61
b.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	14.758.457.006,00	9.450.167.025,00
c.	Aset Tak Berwujud	2.413.753.740,00	2.145.891.740,00
d.	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(1.594.242.238,58)	(1.223.235.366,66)
e.	Aset Lain-lain	204.932.698.236,33	159.808.724.302,23
f.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(102.535.785.983,71)	(92.432.414.067,20)
Jumlah		118.310.028.051,65	78.084.280.924,98



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

a. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang merupakan Tuntutan Ganti Rugi yang merupakan pengakuan piutang TP/TGR atas kerugian daerah karena hilangnya aset daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp335.147.291,61 dan 2017 sebesar Rp335.147.291,61 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.126 Tagihan Jangka Panjang

No.	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
		(Rp)	(Rp)
1	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Ir. Khaerudin sesuai LHP Bawasda No. 356/619.c tanggal 31-12-2005 dan surat Bupati No. 951/0583/2009 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	6.250.000,00	6.250.000,00
2	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Waryono sesuai LHP Bawasda No. 356/398 tanggal 01-12-2008 dan surat Bupati No. 951/0520/2009 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00
3	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Saefudin sesuai LHP Bawasda No. 356/303/2008 tanggal 31-10-2008 dan surat Bupati No. 951/0518/2009 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	2.505.000,00	2.505.000,00
4	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Drs. Ali Murtado sesuai LHP Bawasda No. 356/619.c tanggal 31-12-2005 dan surat Bupati No. 951/0519/2009 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	6.250.000,00	6.250.000,00
5	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Nursidik sesuai LHP Bawasda No. 356/619.d tanggal 31-12-2005 dan surat Bupati No. 951/0522/2009 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	6.250.000,00	6.250.000,00
6	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Drs. H. Hartanto, MM sesuai LHP Bawasda No. 356/301.a tanggal 29-10-2008 dan surat Bupati No. 951/0521/2009 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	5.000.000,00	6.000.000,00
7	Pengakuan Piutang TP/TGR atas kerugian daerah Atas nama CV Bina Jaya sesuai LHP BPKP dan Bawasprop Jateng	3.106.340,12	3.106.340,12
8	Pengakuan Piutang TP/TGR atas kerugian daerah Atas nama CV Purwa Rahayu sesuai LHP BPKP dan Bawasprop Jateng	4.697.240,00	4.697.240,00
9	Pengakuan Piutang TP/TGR atas kerugian daerah Atas nama CV Manara Mas sesuai LHP BPKP dan Bawasprop Jateng	14.638.711,49	14.638.711,49
10	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Abdul Fatah, SIP sesuai LHP Inspektorat No 356/503 tanggal 6 Juli 2010 dan surat Bupati No. 951/2084/2010 tanggal 4 Oktober 2010 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	6.300.000,00	6.300.000,00
11	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Hariyanto, A.Md sesuai LHP Inspektorat No 356/288/2011 tanggal 31 Maret 2011 dan surat Bupati No. 951/2714/2011 tanggal 10 Juni 2011 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	10.300.000,00	10.300.000,00
12	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah atas nama Drs. Rosyid	115.000.000,00	115.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

No.	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
		(Rp)	(Rp)
13	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Rustoyo sesuai LHP Inspektorat No 356/187/2012 tanggal 16 Maret 2012 dan surat Bupati No. 951/1865/2012 tanggal 23 April 2012 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	32.250.000,00	32.250.000,00
14	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Fajar Rokhwidi, SIP sesuai LHP Inspektorat No 356/040/2011 tanggal 9 Januari 2011 dan surat Bupati No. 951/2688/2011 tanggal 8 Juni 2011 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	104.000.000,00	104.000.000,00
15	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah atas nama Imam Abadi Soebedjo	8.600.000,00	8.600.000,00
Jumlah		335.147.291,61	336.147.291,61

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan pihak ketiga dalam rangka pembangunan suatu area yang akan dimanfaatkan dan dikelola bersama selama jangka waktu tertentu. Aset kemitraan dengan pihak ketiga dicatat sebesar nilai investasi yang disertakan Pemerintah Kabupaten Tegal di dalam perjanjian kerjasama. Saldo per 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp14.758.457.006,00 dan saldo tahun Anggaran 2017 sebesar Rp9.450.167.025,00. Adapun rinciannya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.127 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

No.	Uraian	2018(Rp)	2017 (Rp)
1)	Pembangunan Pasar Trayeman	594.342.025,00	594.342.025,00
2)	Pembangunan Pasar Banjaran	2.260.075.000,00	2.260.075.000,00
3)	Pembangunan Pusat Perdagangan dan Rekreasi Slawi	6.295.750.000,00	6.295.750.000,00
4)	Pembangunan LIK Takaru	300.000.000,00	300.000.000,00
5)	Kerjasama Pemanfaatan Aset Tetap	5.308.289.981,00	
Jumlah		14.758.457.006,00	9.450.167.025,00

1) Pembangunan Pasar Trayeman

Merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan PT Karsa Bayu Bangun Persada melalui Perjanjian Nomor 051/03819/1993 tanggal 1 Agustus 1993. Masa Perjanjian kerjasama selama 25 tahun. Penyertaan Pemerintah Daerah berupa tanah seluas 10.000m² yang berada dalam HPL Nomor 1 Desa Trayeman seluas 15.000 m² sesuai dengan Keputusan Kepala BPN Nomor 11/HPL/BPN/94 dengan nilai Rp562.500.000,00 dan Hak Pengelolaan HPL senilai Rp31.842.025,00 sehingga penyertaan Pemda sebesar Rp594.342.025,00. Penyertaan PT Karsa Bayu Bangun Persada sebesar biaya pembangunan kios Pasar Trayeman



beserta fasilitas pendukungnya senilai Rp2.811.148.364,00 dan tanah yang terletak di Desa Trayeman seluas 12.390 m² senilai Rp74.340.500,00 sehingga total penyertaan PT Karsa Bayu Bangun Persada adalah Rp2.885.488.864,00.

Perjanjian kerjasama ini telah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 511.234-170 tanggal 8 Maret 1994.

Adendum perjanjian dilakukan tanggal 16 Pebruari 2002 dengan Perjanjian Nomor 573/0669/2002. Perubahan dilakukan pada Pasal 1 dan Pasal 7 yang mengubah nilai penyertaan PT Karsa Bayu Bangun Persada menjadi Rp3.103.468.864,00. Addendum ini telah mendapat persetujuan DPRD dengan Surat Keputusan Nomor 4 Tahun 2002.

Pada tanggal 19 Agustus 2009 terjadi kebakaran di los pasar Trayeman, agar pasar tersebut dapat digunakan maka dilakukan kegiatan tanggap darurat melalui Belanja Tidak Terduga TA 2009 senilai Rp702.665.000,00 kemudian dilakukan pembangunan kembali dari TA 2010 sampai dengan TA 2012 senilai Rp12.080.000.000,00.

2) Pembangunan Pasar Banjaran

Merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan PT Karsa Bayu Bangun Persada melalui Perjanjian Nomor 573/03200 tanggal 4 Juli 1994. Perjanjian Kerjasama selama 25 tahun. Penyertaan Pemerintah Daerah berupa tanah seluas 17.830 m² dengan nilai Rp2.194.225.000,00 dengan Hak Pengelolaan Tanah Nomor 1 Desa Tembok Banjaran sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 80/HPL/BPN/94 dan bekas bangunan Pasar Banjaran senilai Rp65.825.000,00, sehingga penyertaan Pemda sebesar Rp2.260.075.000,00. Penyertaan PT Karsa Bayu Bangun Persada sebesar biaya pembangunan Pasar Banjaran beserta fasilitas pendukungnya senilai Rp6.141.854.719,00.

Perjanjian kerjasama ini telah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 573-33-668 tanggal 7 Oktober 1994.

Adendum perjanjian dilakukan pada tanggal 9 Oktober 1995 dengan melalui Perjanjian Nomor 573/05123. Perubahan dilakukan pada pasal 1 dan pasal 7 yang mengubah nilai penyertaan dari PT Karsa Bayu Bangun Persada menjadi Rp6.915.520.876,00. Adendum ini telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 511.2-802 tanggal 8 Juli 1997.



Pada tahun 2006 terjadi kebakaran di pasar Banjaran kemudian dilakukan kegiatan tanggap darurat melalui belanja tidak tersangka senilai Rp463.650.000,00.

3) Pembangunan Pusat Perdagangan dan Rekreasi Slawi

Merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan PT Karsa Bayu Bangun Persada melalui Perjanjian Nomor 573/05296/2000, tanggal 19 Oktober 2000. Perjanjian kerjasama selama 30 tahun. Penyertaan Pemerintah Daerah berupa tanah seluas 16.618 m² yang berada dalam HPL Nomor 1/1997 sesuai Keputusan Kepala BPN Nomor 6/HPL/BPN/97 dengan nilai Rp6.231.750.000,00 dan nilai dari HPL sebesar Rp64.000.000,00, sehingga penyertaan Pemda sebesar Rp6.295.750.000,00. Penyertaan PT Karsa Bayu Bangun Persada sebesar biaya pembangunan pusat perdagangan dan rekreasi beserta fasilitas pendukungnya senilai Rp12.900.001.000,00. Perjanjian kerjasama ini telah mendapat persetujuan DPRD dengan Keputusan Nomor 09/DPRD/IX/2000.

Adendum pertama dilakukan tanggal 16 Pebruari 2002 dengan Perjanjian Nomor 573/0670/2002. Perubahan dilakukan pada Pasal 1, Pasal 3, Pasal 6 dan Pasal 7, yang mengubah nilai penyertaan PT Karsa Bayu Bangun Persada menjadi Rp17.593.551.000,00. Adendum ini telah mendapat persetujuan DPRD dengan Keputusan Nomor 4 Tahun 2002.

Adendum kedua dilakukan tanggal 14 Oktober 2002 dengan Perjanjian Nomor 573/05528/2002. Perubahan dilakukan pada Pasal 1, Pasal 3, Pasal 6 dan Pasal 7 adendum pertama yang mengubah nilai penyertaan PT Karsa Bayu Bangun Persada menjadi Rp17.595.717.000,00.

4) Pembangunan LIK Takaru

Merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan PT Karsa Bayu Bangun Persada melalui Perjanjian Nomor 573/02405/2002, tanggal 6 Juni 2002. Perjanjian Kerjasama selama 30 tahun. Penyertaan Pemerintah Daerah berupa tanah seluas 2000 m² yang berada dalam HPL Nomor 2 Dampyak sesuai Keputusan Kepala BPN Nomor 10/HPL/BPN/2003 dengan luas tanah 90.600 m² dengan nilai Rp300.000.000,00, sementara penyertaan PT Karsa Bayu Bangun Persada sebesar biaya pembangunan LIK Takaru beserta fasilitas pendukungnya senilai Rp2.101.847.500,00. Perjanjian kerjasama telah mendapat persetujuan DPRD dengan Keputusan Nomor 12 Tahun 2002.



Adendum dilakukan tanggal 4 Oktober 2002 dengan Perjanjian Nomor 573/05531/2002. Perubahan dilakukan pada Pasal 1, Pasal 3, Pasal 6 dan Pasal 7, yang mengubah nilai penyertaan PT Karsa Bayu Bangun Persada menjadi Rp2.134.847.500,00.

5) Kerjasama Pemanfaatan Aset Tetap

Saldo aset pemerintah kabupaten Tegal yang dimanfaatkan oleh pihak lain per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp5.308.289.981,00 dengan rincian disajikan dalam table berikut:

Tabel 5.128 Kerjasama Pemanfaatan Aset Tetap

No.	Nama Organisasi Perangkat Daerah	SALDO
		2018
1	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat	92.534.000,00
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11.063.332,00
3	Sekretariat Daerah	2.000.862.625,00
4	Kecamatan Slawi	623.300.000,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	2.580.530.024,00
Jumlah		5.308.289.981,00

c. Aset Tak Berwujud

Merupakan saldo aktiva tak berwujud per 31 Desember 2018 yang berada di Dinas Kesehatan, RSUD dr. Soeselo Slawi, RSUD SURadadi, Satpol PP, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Inspektorat, dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Saldo 31 Desember 2018 sebesar Rp2.413.753.740,00 dan TA 2017 sebesar Rp2.145.891.740,00 dengan rincian disajikan dalam lampiran 5.23.

Aset tak berwujud pada pemerintah Kabupaten Tegal adalah berupa software dengan masa manfaat terbatas sehingga dilakukan amortisasi. Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan metode Garis Lurus. Untuk Software yang mengalami pengembangan aplikasi dan telah memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud, maka pengeluarannya akan dicatat sebagai kapitalisasi.

d. Aset lain-lain

Hal ini dikarenakan karena adanya reklasifikasi dari aset tetap dan Hal ini dikarenakan karena adanya reklasifikasi dari aset tetap dan Penghapusan Aset Daerah sesuai Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor tanggal 2018 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah. Saldo Aset lain-lain pada tahun 2017 adalah sebesar Rp159.808.724.302,23 dan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp204.932.698.236,33. Aset lain-lain ini terdapat penambahan dari



aset tetap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan P3D Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen yang akan diserahkan kepada Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp61.712.735.235,46 yang terdapat pada SMA Negeri dan SMK Negeri di Kabupaten Tegal. Adapun rincian aset lain-lain dapat dilihat pada *lampiran 5.24*

e. Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain pada tahun 2017 adalah sebesar Rp92.432.414.067,20 dan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp102.535.785.983,71. Adapun rincian Akumulasi Penyusutan aset lain-lain dapat dilihat pada *lampiran 5.25*

5.3.2. Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp32.495.011.851,00 dan 2017 sebesar Rp34.374.096.019,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.129 Kewajiban Jangka Pendek

No.	Uraian	2018 (Rp.)	2017 (Rp.)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	77.031.600,00	31.665.307,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	1.756.392.705,00	2.562.086.430,00
3	Utang Beban	30.655.827.546,00	31.330.911.598,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.760.000,00	449.432.684,00
Jumlah		32.495.011.851,00	34.374.096.019,00

1. Utang PFK

Merupakan saldo utang yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga pada 31 Desember 2018 sebesar Rp77.031.600,00 kepada Jasa Raharja dan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp31.665.307,00 dengan rincian pada Dinas Kesehatan Rp29.000.000,00 dan Kecamatan Bojong sebesar Rp2.665.307,00.

2. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima dimuka merupakan Saldo pendapatan Diterima Dimuka yang berasal dari pembayaran pihak ketiga yang pada 31 Desember 2018 belum digunakan pemanfaatannya sebesar Rp1.756.392.705,00, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Tabel 5.130 Pendapatan Diterima Dimuka

No.	Uraian	2018 (Rp.)	2017 (Rp.)
1	Pajak Reklame	1.026.279.330,00	673.029.621,00
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	730.113.375,00	1.889.056.809,00
Jumlah		1.756.392.702,00	2.562.086.430,00

a. Pajak Reklame

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2018 yang berasal dari Pajak Reklame sebesar Rp1.026.279.330,00 dan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp673.029.621,00 yang berada pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal.

b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2018 yang berasal dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp730.113.375,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.889.056.809,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.131 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

No.	Uraian	2018 (Rp.)	2017 (Rp.)
1	Dinas Perhubungan	240.000.000,00	300.000.000,00
2	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan	10.104.000,00	12.796.334,00
3	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	384.598.875,00	1.463.771.675,00
4	Kecamatan Slawi	95.410.500,00	109.738.800,00
5	Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah		2.750.000,00
Jumlah		730.113.375,00	1.889.056.809,00

3. Utang Beban

Utang Beban merupakan Saldo Belanja per 31 Desember 2018 yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp30.655.827.546,00 dan saldo per 31 Desember 2017 Rp31.330.911.598,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.132 Utang Beban

No.	Uraian	2018 (Rp.)	2017 (Rp.)
1	Beban Pegawai (TPP)	7.572.061.685,00	6.792.775.985,00
2	Beban Listrik	3.370.527.320,00	3.329.632.848,00
3	Beban Telepon	57.901.747,00	52.487.645,00
4	Beban Air	85.588.524,00	98.618.450,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

No.	Uraian	2018 (Rp.)	2017 (Rp.)
5	Beban Internet	52.953.151,00	54.206.205,00
6	Beban Paket	395.000,00	608.000,00
7	Beban BLUD RSUD dr Soeselo	14.335.213.030,00	16.799.183.140,00
8	Beban BLUD RSUD Suradadi	5.020.504.789,00	3.890.747.315,00
9	Beban pada Pihak Ketiga (rekanan)	44.900.000,00	-
10	Beban Transfer	-	312.652.010,00
11	Beban BLUD Dinkes (Puskesmas)	115.782.300,00	
	Jumlah	30.655.827.546,00	31.330.911.598,00

a. Utang Beban Pegawai

Merupakan saldo utang Beban Tambahan Penghasilan PNS bulan Desember 2018 yang dibayarkan pada tahun 2019 sebesar Rp7.572.061.685,00

b. Utang Beban Listrik

Merupakan Saldo utang beban listrik per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.370.527.320,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp3.329.632.848,00 . Rincian lengkap utang beban listrik per OPD dapat dilihat pada lampiran 5.26.

c. Utang Beban Telepon

Merupakan Saldo utang beban telepon per 31 Desember 2018 sebesar Rp57.901.747,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp52.487.645,00. Rincian lengkap utang beban telepon per OPD dapat dilihat pada lampiran 5.27.

d. Utang Beban Air

Merupakan saldo utang beban Air per 31 Desember 2018 sebesar Rp85.588.524,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp98.618.450,00. Rincian lengkap utang beban air per OPD dapat dilihat pada lampiran 5.28.

e. Utang Beban Internet

Merupakan Saldo utang beban Internet per 31 Desember 2018 yang belum dibayar sebesar Rp52.953.151,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp54.206.205,00. Rincian lengkap utang beban internet per OPD dapat dilihat pada lampiran 5.29.

f. Utang Beban paket

Merupakan Saldo utang beban paket per 31 Desember 2018 yang belum dibayar yang berada pada Inspektorat sebesar Rp395.000,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp608.000,00.



g. Utang Beban BLUD

Merupakan saldo utang beban Barang Jasa BLUD per 31 Desember 2018 yang berada pada SKPD RSUD dr Soeselo, RSUD Suradadi, dan Dinkes (Puskesmas) sebesar Rp19.471.500.119,00 dan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp20.689.930.455,00 dengan rincian sebagai disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.133 Utang Beban BLUD

No.	Uraian	2018 (Rp.)	2017 (Rp.)
1	RSUD dr Soeselo	14.335.213.030,00	16.799.183.140,00
2	RSUD Suradadi	5.020.504.789,00	3.890.747.315,00
3	Dinkes (Puskesmas)	115.782.300,00	
	Jumlah	19.471.500.119,00	20.689.930.455,00

Utang beban BLUD RSUD dr Soeselo per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 secara lebih rinci dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 5.134. Utang Beban BLUD RSUD dr Soeselo

No.	Uraian	2018(Rp.)	2017 (Rp.)
1	Obat	-	2.459.078.228,00
2	Perlengkapan Obat	-	59.455.000,00
3	Bahan Alat Kesehatan dan habis pakai	-	1.663.232.763,00
4	Bank Darah	609.275.000,00	460.358.800,00
5	Laboratorium	446.150.104,00	174.557.025,00
6	Hemodialisa	807.721.200,00	813.620.500,00
7	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	76.535.200,00	10.866.450,00
8	Barang Cetak Rekam Medis	438.587.935,00	487.931.400,00
9	Listrik,Air,Telepon	200.796.597,00	216.050.834,00
10	Jasa Pelayanan Medis	11.500.406.994,00	10.454.032.140,00
11	Perlengkapan Pendaftaran	255.740.000,00	-
	Jumlah	14.335.213.030,00	16.799.183.140,00

Utang beban BLUD RSUD Suradadi per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 secara lebih rinci dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 5.135 Utang Beban BLUD RSUD Suradadi

No.	Uraian	2018 (Rp.)	2017 (Rp.)
1	Obat	3.185.019.832,00	2.497.908.172,00
2	Bahan Alat Kesehatan dan habis pakai	0,00	568.071.451,00
3	Bahan Medis Habis Pakai Instalasi Bedah Sentral (BMHP IBS)	0,00	244.254.850,00
4	Laboratorium	41.200.000,00	387.785.865,00
5	Radiologi	0,00	17.017.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

No.	Uraian	2018 (Rp.)	2017 (Rp.)
6	PEN	0,00	129.357.162,00
7	Gas Medis	0,00	46.352.815,00
8	Bank Darah	71.280.000,00	0,00
9	Jasa Pelayanan Medis	1.682.564.214,00	0,00
10	Telepon	2.343.323,00	0,00
11	Listrik	36.997.420,00	0,00
12	Internet	1.100.000,00	0,00
Jumlah		5.020.504.789,00	3.890.747.315,00

Saldo Utang Beban BLUD Dinkes (puskesmas) sebesar Rp115.782.300,00 merupakan utang BOK Puskesmas Talang sebesar Rp111.582.300,00, Jampersal Puskesmas Talang sebesar Rp780.000,00 dan Jampersal Puskesmas Jatibogor sebesar Rp3.420.000,00.

h. Utang Beban pada Pihak Ketiga (Rekanan)

Merupakan saldo utang beban pada pihak ketiga (rekanan) berupa jasa konsultasi perencanaan yang belum dibayar per 31 Desember 2018 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang merupakan pembayaran 100% jasa konsultasi perencanaan Kec. Suradadi, Kramat, Adiwerna, Tarub sesuai SPK No. 005/021.A/PL-JITUT/PER/II/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 dan BAST No. 050/76.2/PSP-TRB-PERENCANA-JITUT dll tanggal 29 Maret 2018 sebesar Rp44.900.000,00.

4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Merupakan Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp5.760,000, merupakan Lebih Salur Dana BOS yang baru disetorkan pada Tahun 2019

5. Utang Jangka Panjang

Akun ini menggambarkan jumlah Utang Jangka Panjang-Pemerintah Pusat yang jatuh tempo sampai dengan Tahun 2018. Saldo per 31 Desember 2018 tidak ada karena pada Tahun 2015 utang tersebut lunas.

5.3.3. Ekuitas

Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban. Ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.151.695.467.737,44 meningkat sebesar Rp195.000.325.769,81 (6,60%) jika dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.956.695.141.967,63.



5.4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan tahun 2018. Laporan Operasional (LO) tahun 2018 disajikan dengan perbandingan Laporan Operasional tahun 2017.

5.4.1. KEGIATAN OPERASIONAL

5.4.1.1. Pendapatan –LO

Pendapatan-LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp2.576.653.719.477,81 dan pada tahun 2017 sebesar Rp2.241.079.534.708,85 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.136 Pandapatan - LO

No.	Uraian	Saldo 2018 (Rp)	Saldo 2017 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah – LO	407.657.716.953,81	394.305.231.217,85
2	Transfer– LO	2.016.857.467.822,00	1.683.674.158.868,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	152.138.534.702,00	163.100.144.623,00
Jumlah		2.576.653.719.477,81	2.241.079.534.708,85

1. Pendapatan Asli Daerah- LO

Pendapatan Asli Daerah – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp407.657.716.953,81 dan Tahun 2017 sebesar Rp394.305.231.217,85 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.137 Pendapatan Asli Daerah - LO

No.	Uraian	Saldo 2018 (Rp)	Saldo 2017 (Rp)
a.	Pendapatan Pajak Daerah - LO	115.262.632.351,00	99.115.952.570,00
b.	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	19.400.937.863,00	19.979.859.749,00
c.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	25.010.502.816,19	36.389.532.574,73
d.	Lain – lain PAD Yang Sah - LO	247.983.643.923,62	238.819.886.324,12
Jumlah		407.657.716.953,81	394.305.231.217,85

a. Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan Pajak Daerah untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp115.262.632.351,00 dan Tahun 2017 sebesar Rp99.115.952.570,00 dengan disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Tabel 5.138 Pendapatan Pajak Daerah - LO

No.	Uraian	Saldo 2018 (Rp)	Saldo 2017 (Rp)
1)	Pajak Hotel	610.644.058,00	447.178.254,00
2)	Pajak Restoran	5.395.788.141,00	2.621.114.069,00
3)	Pajak Hiburan	398.127.550,00	120.789.838,00
4)	Pajak Reklame	1.984.226.060,00	1.642.268.701,00
5)	Pajak Penerangan Jalan	51.698.559.990,00	41.716.698.780,00
6)	Pajak Parkir	65.292.250,00	38.849.750,00
7)	Pajak Air Tanah	375.132.710,00	295.162.135,00
8)	Pajak Sarang Burung Walet	3.000.000,00	2.600.000,00
9)	Pajak Minerba	1.154.324.950,00	2.721.284.620,00
10)	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	29.746.190.011,00	28.320.309.774,00
11)	Pajak BPHTB	23.831.346.631,00	21.189.696.649,00
Jumlah		115.262.632.351,00	99.115.952.570,00

b. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Retribusi Daerah – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan Retribusi Daerah untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp19.400.937.863,00 dan Tahun 2017 sebesar Rp19.979.859.749,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.139 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

No.	Uraian	Saldo 2018 (Rp)	Saldo 2017 (Rp)
1)	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	164.320.500,00	156.801.000,00
2)	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	1.803.798.750,00	1.232.392.000,00
3)	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	665.750.000,00	417.850.000,00
4)	Retribusi Pelayanan Pasar - LO	3.087.717.700,00	3.263.884.800,00
5)	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	1.591.980.000,00	1.612.270.000,00
6)	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO	3.515.000,00	3.350.000,00
7)	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	280.221.000,00	154.505.000,00
8)	Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO	51.600.000,00	22.400.000,00
9)	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	2.431.399.553,00	4.192.572.602,00
10)	Retribusi Tempat Pelelangan - LO	212.988.260,00	186.168.857,00
11)	Retribusi Terminal - LO	166.905.500,00	199.391.000,00
12)	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	871.998.300,00	963.722.260,00
13)	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	7.041.789.450,00	6.050.225.750,00
14)	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	995.603.850,00	1.256.694.880,00
15)	Retribusi Izin Gangguan - LO	0,00	241.216.600,00
16)	Retribusi Izin Trayek - LO	31.350.000,00	26.415.000,00
Jumlah		19.400.937.863,00	19.979.859.749,00



c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Daerah – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp25.010.502.816,19 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp36.389.532.574,73 berupa bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)

d. Lain – lain PAD Yang Sah - LO

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan Daerah untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp247.983.643.923,62 dan Tahun 2017 sebesar Rp238.819.886.324,12 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 140 Pendapatan lain-lain PAD yang Sah - LO

No.	Uraian	Saldo 2018 (Rp)	Saldo 2017 (Rp)
1)	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	306.856.280,00	299.810.970,00
2)	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO	238.520.000,00	242.601.850,00
3)	Penerimaan Jasa Giro - LO	4.951.111.972,00	6.657.879.164,00
4)	Pendapatan Bunga - LO	14.734.363.612,00	12.745.408.455,00
5)	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	10.290.000,00	0,00
6)	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	717.191.571,00	1.854.520.937,00
7)	Pendapatan Denda Pajak - LO	2.518.578.856,00	2.606.446.374,92
8)	Pendapatan Denda Retribusi - LO	871.671.400,00	888.710.000,00
9)	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LO	55.500.000,00	29.250.000,00
10)	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO	686.800.500,00	1.246.255.297,00
11)	Pendapatan dari Pengembalian -LO	4.448.535.803,00	1.505.163.284,00
12)	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO	719.800.800,00	
13)	Pendapatan BLUD - LO	216.917.373.344,62	210.066.502.850,20
14)	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	29.858.005,00	9.910.000,00
15)	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO	231.393.300,00	262.765.800,00
16)	Pendapatan dari sumber mata air - LO	545.798.480,00	380.661.342,00
17)	Pendapatan Sewa BLK - LO		24.000.000,00
	Jumlah	247.983.643.923,62	238.819.886.324,12

2. Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp2.016.857.467.822,00 dan Tahun 2017 sebesar Rp1.683.674.158.868,00 dengan rincian disajikan dalam table berikut:

Table 5.141 Pendapatan Transfer - LO



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

No.	Uraian	Saldo 2018 (Rp)	Saldo 2017 (Rp)
a.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	1.513.203.330.274,00	1.501.803.679.373,00
b.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	317.703.162.997,00	0,00
c.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	175.478.284.551,00	164.221.871.495,00
d.	Bantuan Keuangan - LO	10.472.690.000,00	17.648.608.000,00
Jumlah		2.016.857.467.822,00	1.683.674.158.868,00

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.513.203.330.274,00 dan Tahun 2017 sebesar Rp1.501.803.679.373,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.142 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

No.	Uraian	Saldo 2018 (Rp)	Saldo 2017 (Rp)
1)	Bagi Hasil Pajak - LO	21.232.470.187,00	26.099.126.042,00
2)	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	8.188.805.102,00	8.393.126.242,00
3)	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	1.144.494.182.000,00	1.141.687.714.000,00
4)	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	339.287.872.985,00	325.623.713.089,00
Jumlah		1.513.203.330.274,00	1.501.803.679.373,00

b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya – LO Kabupaten Tegal adalah pendapatan Transfer Dana Penyesuaian. Saldo Pendapatan Transfer 2018 adalah sebesar Rp317.703.162.997,00 berupa Pendapatan Dana Desa sebesar Rp282.703.162.997,00 dan Dana Insentif Daerah sebesar Rp35.000.000.000,00.

c. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah lainnya – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp175.478.284.551,00 dan Tahun 2017 sebesar Rp164.221.871.495,00 berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi.

d. Bantuan Keuangan – LO

Bantuan Keuangan – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp10.472.690.000,00 dan Tahun 2017 sebesar Rp17.648.608.000,00 berupa Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi.



3. Lain-lain Pendapatan yang Sah –LO

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp152.138.534.702,00 dan Tahun 2016 sebesar Rp163.100.144.623,00 yaitu berupa Pendapatan Hibah – LO.

a. Pendapatan Hibah – LO

Pendapatan Hibah – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp152.138.534.702,00 dan Tahun 2017 sebesar Rp163.100.144.623,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.143 Pendapatan Hibah - LO

No.	Uraian	Saldo 2018 (Rp)	Saldo 2017 (Rp)
1)	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	14.820.017.150,00	24.828.154.112,00
2)	Hibah Dana BOS – LO	137.318.517.552,00	138.271.990.511,00
Jumlah		152.138.534.702,00	163.100.144.623,00

5.4.1.2. Beban

Jumlah Beban Daerah untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp2.379.843.433.285,83 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.977.446.282.397,37 dengan rincian disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.144 Beban

No.	Beban	Saldo 2018 (Rp)	Saldo 2017 (Rp)
1.	Beban Pegawai	1.112.695.074.785,00	1.068.966.218.494,00
2.	Beban Barang dan Jasa	497.685.999.482,73	492.258.285.093,07
3.	Beban Bunga	-	-
4.	Beban Subsidi	-	-
5.	Beban Hibah	92.411.137.642,00	57.765.178.641,00
6.	Beban Bantuan Sosial	20.264.296.500,00	16.837.300.000,00
7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	201.333.648.287,61	174.667.938.110,87
8.	Beban Penyisihan Piutang	7.518.154.624,49	4.624.916.594,43
9.	Beban Lain - Lain		
10.	Beban Transfer	447.935.121.964,00	162.326.445.464,00
Jumlah		2.379.843.433.285,83	1.977.446.282.397,37

1. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp1.112.695.074.785,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.068.966.218.494,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Tabel 5.145 Beban Pegawai

No.	Beban Pegawai	Saldo 2018 (Rp)	Saldo 2017 (Rp)
a.	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	881.149.734.192,00	671.073.838.505,00
b.	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	108.897.860.726,00	294.571.697.730,00
c.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	6.679.500.000,00	5.417.400.000,00
d.	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan - LO	197.364.969,00	270.838.796,00
e.	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	3.237.345.887,00	3.961.086.477,00
f.	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	580.112.180,00	657.731.888,00
g.	Beban Uang Lembur - LO	2.608.756.600,00	2.608.492.700,00
h.	Beban Honorarium PNS - LO	24.801.763.495,00	23.420.903.450,00
i.	Beban Honorarium Non PNS - LO	43.472.695.394,00	28.956.851.100,00
j.	Beban Pegawai BLUD - LO	22.068.251.066,00	17.853.327.819,00
k.	Beban Pegawai BOS - LO	19.001.690.276,00	20.174.050.029,00
	Jumlah	1.112.695.074.785,00	1.068.966.218.494,00

a. Beban Gaji dan Tunjangan - LO

Jumlah Beban Gaji dan Tunjangan - LO untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp881.149.734.192,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp671.073.838.505,00 dengan rincian disajikan dalam lampiran 5.30.

b. Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO

Jumlah Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp108.897.860.726,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp294.571.697.730,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.146 Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO

No.	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	Jumlah 2018	Jumlah 2017
1)	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - LO	108.708.410.726,00	64.614.342.270,00
2)	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas - LO	37.500.000,00	213.650.000,00
3)	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja - LO	151.950.000,00	-
4)	Beban Tambahan Profesi Guru PNSD - LO		227.748.220.360,00
5)	Beban Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LO		1.308.375.000,00
6)	Beban Tunjangan Khusus Guru - LO		687.110.100,00
	Jumlah	108.897.860.726,00	294.571.697.730,00

c. Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO

Jumlah Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp6.679.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp5.417.400.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.147 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO

No.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	Jumlah 2018	Jumlah 2017
1)	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD - LO	6.289.500.000,00	4.817.400.000,00
2)	Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH - LO	390.000.000,00	600.000.000,00
Jumlah		6.679.500.000,00	5.417.400.000,00

d. Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan – LO

Jumlah Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan – LO untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp197.364.969,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp270.838.796,00.

e. Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Jumlah Beban Insentif pemungutan Pajak Daerah untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp3.237.345.887,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp3.961.086.477,00.

f. Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Jumlah Beban Insentif Retribusi Daerah untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp580.112.180,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp657.731.888,00.

g. Beban Uang Lembur – LO

Jumlah Beban Uang Lembur - LO untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp2.608.756.600,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp2.608.492.700,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.148 Beban Uang Lembur -LO

No.	Beban Uang Lembur – LO	Jumlah 2018	Jumlah 2017
1)	Beban Uang Lembur PNS - LO	2.205.869.600,00	2.338.630.800,00
2)	Beban Uang Lembur Non PNS - LO	402.887.000,00	269.861.900,00
Jumlah		2.608.756.600,00	2.608.492.700,00

h. Beban Honorarium PNS- LO

Jumlah Beban Honorarium PNS - LO untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp24.801.763.495,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp23.420.903.450,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Tabel 5.149 Beban Honorarium PNS -LO

No.	Beban Honorarium PNS – LO	Jumlah 2018	Jumlah 2017
1)	Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.918.776.125,00	6.117.389.200,00
2)	Beban Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa - LO	3.029.132.000,00	2.848.479.500,00
3)	Beban Honorarium PNS Lainnya - LO	16.853.855.370,00	14.455.034.750,00
Jumlah		24.801.763.495,00	23.420.903.450,00

i. Beban Honorarium Non PNS – LO

Jumlah Beban Honorarium Non PNS - LO untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp43.472.695.394,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp28.956.851.100,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.150 Beban Honorarium Non PNS –LO

No.	Beban Honorarium Non PNS - LO	Jumlah 2018	Jumlah 2017
1)	Beban Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap - LO	18.706.002.500,00	11.549.145.100,00
2)	Beban Honorarium Non PNS Lainnya	24.766.692.894,00	17.407.706.000,00
Jumlah		43.472.695.394,00	28.956.851.100,00

j. Beban Pegawai BLUD – LO

Jumlah Beban Pegawai BLUD- LO untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp22.068.251.066,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp17.853.327.819,00. Jumlah beban Pegawai BLUD Sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp22.068.251.066,00 terdiri dari Beban Pegawai BLUD Dinkes (puskesmas) sebesar Rp10.545.843.510,00, Beban Pegawai BLUD RSUD dr Soeselo Slawi sebesar Rp7.644.817.556,00 dan Beban Pegawai BLUD RSUD Suradadi sebesar Rp3.877.590.000,00

k. Beban Pegawai BOS –LO

Jumlah Beban Pegawai BOS- LO untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp19.001.690.276,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp20.174.050.029,00.

2. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp497.685.999.482,73 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp492.258.285.093,07 dengan rincian disajikan dalam lampiran 5.31

a. Beban Bahan Pakai Habis

Jumlah Beban Bahan Pakai Habis untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp13.512.021.915,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp10.230.070.867,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.151 Beban Bahan Pakai Habis

No.	Beban Bahan Pakai Habis	Jumlah 2018	Jumlah 2017
1)	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	3.516.814.341,00	3.001.944.451,00
2)	Beban Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	4.198.200,00	850.000,00
3)	Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.604.685.229,00	1.309.511.980,00
4)	Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	173.214.600,00	1.171.317.772,00
5)	Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.076.034.190,00	1.058.427.986,00
6)	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	3.281.545.789,00	1.322.295.419,00
7)	Beban Persediaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	33.881.000,00	46.017.280,00
8)	Beban Persediaan Pengisian Isi Tabung Gas	42.079.000,00	46.994.000,00
9)	Beban Bahan Pakai Habis Lainnya	2.779.569.566,00	2.272.711.979,00
Jumlah		13.512.021.915,00	10.230.070.867,00

b. Beban Persediaan Bahan/Material

Jumlah Beban Bahan Persediaan Bahan/Material untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp23.388.966.303,34 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp23.724.162.443,83 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.152 Beban Persediaan Bahan/Material

No.	Beban Persediaan Bahan/ Material	Jumlah 2018	Jumlah 2017
1)	Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan	4.619.049.291,00	3.313.817.958,00
2)	Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	657.219.420,00	771.480.213,00
3)	Beban Persediaan Bibit Ternak	84.220.000,00	(103.490.000,00)
4)	Beban Persediaan Bahan Obat-obatan	11.859.919.796,34	11.849.653.859,83
5)	Beban Persediaan Bahan Kimia	862.423.494,00	1.034.033.426,00
6)	Beban Persediaan Makanan Pokok	322.540.000,00	313.097.075,00
7)	Beban Persediaan bahan/peralatan pelatihan	1.109.591.850,00	1.309.256.743,00
8)	Beban Bahan /Material Lainnya	3.874.002.452,00	5.236.313.169,00
Jumlah		23.388.966.303,34	23.724.162.443,83

c. Beban Jasa Kantor

Jumlah Beban Jasa Kantor untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp78.668.430.002,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp76.393.269.917,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Tabel 5.153 Beban Jasa Kantor

No.	Beban Jasa Kantor	Jumlah 2018	Jumlah 2017
1)	Beban Jasa telepon	817.601.867,00	714.678.287,00
2)	Beban Jasa air	765.352.879,00	788.306.976,00
3)	Beban Jasa listrik	40.792.659.834,00	38.689.724.414,00
4)	Beban Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang		7.000.000,00
5)	Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	562.401.175,00	531.002.200,00
6)	Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	1.571.919.503,00	1.148.860.100,00
7)	Beban Jasa Paket/Pengiriman	10.840.900,00	9.239.420,00
8)	Beban Jasa Sertifikasi	356.259.100,00	229.283.320,00
9)	Beban Jasa Kantor Lainnya	33.791.394.744,00	34.275.175.200,00
	Jumlah	78.668.430.002,00	76.393.269.917,00

d. Beban Premi Asuransi

Jumlah Beban Premi Asuransi untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp1.219.039.089,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp864.522.282,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.154 Beban Premi Asuransi

No.	Beban Premi Asuransi	Jumlah 2018	Jumlah 2017
1)	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	1.024.553.897,00	683.155.865,00
2)	Beban Premi Asuransi Ketenagakerjaan	194.485.192,00	181.366.417,00
	Jumlah	1.219.039.089,00	864.522.282,00

e. Beban Perawatan Kendaraan Bermotor

Jumlah Beban Perawatan Kendaraan Bermotor untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp6.729.868.412,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp8.646.430.438,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.155 Beban Perawatan Kendaraan Bermotor

No.	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	Jumlah 2018	Jumlah 2017
1)	Beban Jasa Service	1.204.091.355,00	1.227.316.806,00
2)	Beban Penggantian Suku Cadang	1.537.410.294,00	2.049.977.670,00
3)	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3.529.073.310,00	4.966.105.187,00
4)	Beban Jasa KIR	10.503.075,00	5.490.000,00
5)	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	232.085.828,00	240.319.550,00
6)	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	216.704.550,00	157.221.225,00
	Jumlah	6.729.868.412,00	8.646.430.438,00



f. Beban Cetak dan Penggandaan

Jumlah Beban Cetak dan Penggandaan untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp8.603.553.438,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp9.220.338.942,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.156 Beban Cetak dan Penggandaan

No.	Beban Cetak dan Penggandaan	Jumlah 2018	Jumlah 2017
1)	Beban Cetak	5.885.987.423,00	6.467.368.544,00
2)	Beban Penggandaan	2.717.566.015,00	2.752.970.398,00
Jumlah		8.603.553.438,00	9.220.338.942,00

g. Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Jumlah Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp1.949.951.881,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.878.931.775,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.157 Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

No.	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	Jumlah 2018	Jumlah 2017
1)	Beban Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	15.000.000,00	
2)	Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	1.620.224.681,00	1.668.766.475,00
3)	Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	314.727.200,00	208.399.300,00
4)	Beban Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas		1.766.000,00
Jumlah		1.949.951.881,00	1.878.931.775,00

h. Beban Sewa Sarana Mobilitas

Jumlah Beban Sewa Sarana Mobilitas untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp1.319.035.550,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.330.330.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.158 Beban Sewa Sarana Mobilitas

No.	Beban Sewa Sarana Mobilitas	Jumlah 2018	Jumlah 2017
1)	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.314.885.550,00	1.328.530.000,00
2)	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	4.150.000,00	1.800.000,00
Jumlah		1.319.035.550,00	1.330.330.000,00

i. Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Jumlah Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

sebesar Rp2.236.841.000,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.893.087.400,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.159 Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

No.	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah 2018	Jumlah 2017
1)	Beban Sewa Meja Kursi	755.635.000,00	646.056.000,00
2)	Beban Sewa Generator	9.650.000,00	25.710.000,00
3)	Beban Sewa Tenda	335.270.000,00	275.891.000,00
4)	Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional	56.625.000,00	76.330.000,00
5)	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	1.079.661.000,00	869.100.400,00
Jumlah		2.236.841.000,00	1.893.087.400,00

j. Beban Makanan dan Minuman

Jumlah Beban Makanan dan Minuman untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp22.422.912.890,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp19.105.055.296,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.160 Beban Makanan dan Minuman

No.	Beban Makanan dan Minuman	Jumlah 2018	Jumlah 2017
1)	Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai	2.362.890.115,00	2.392.196.096,00
2)	Beban Makanan dan Minuman Rapat	11.275.186.600,00	8.548.380.250,00
3)	Beban Makanan dan Minuman Tamu	1.028.044.150,00	696.112.500,00
4)	Beban Makanan dan Minuman Pelatihan	3.862.453.450,00	3.762.798.100,00
5)	Beban Makanan dan Minuman Lainnya	3.894.338.575,00	3.705.568.350,00
Jumlah		22.422.912.890,00	19.105.055.296,00

k. Beban Pakaian Dinas dan Atributnya

Jumlah Beban Pakaian Dinas dan Atributnya untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp2.969.170.900,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp564.739.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.161 Beban Pakaian Dinas dan Atributnya

No.	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	Jumlah 2018	Jumlah 2017
1)	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH	116.712.000,00	
2)	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	58.135.000,00	103.720.000,00
3)	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	136.170.000,00	19.470.000,00
4)	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	2.364.270.500,00	185.543.000,00
5)	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	142.708.400,00	139.477.000,00
6)	Beban Pakaian Seragam Resmi (PSR)	95.044.000,00	116.529.000,00
7)	Beban Pakaian Dinas/Seragam Lainnya	56.131.000,00	
Jumlah		2.969.170.900,00	564.739.000,00



l. Beban Pakaian Kerja

Jumlah Beban Pakaian Kerja untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp752.875.350,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp586.752.935,00 berupa Beban pakaian Kerja Lapangan.

m. Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

Jumlah Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp1.261.747.299,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.022.773.163,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.162 Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

No.	Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	Jumlah 2018	Jumlah 2017
1)	Beban Pakaian Adat Daerah	134.250.000,00	54.000.000,00
2)	Beban Pakaian Batik Tradisional	139.594.999,00	162.555.000,00
3)	Beban Pakaian Olahraga	714.832.900,00	523.303.463,00
4)	Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu Lainnya	273.069.400,00	282.914.700,00
Jumlah		1.261.747.299,00	1.022.773.163,00

n. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp28.947.885.047,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp27.806.583.043,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.163 Beban Perjalanan Dinas

No.	Beban Perjalanan Dinas	Jumlah 2018	Jumlah 2017
1)	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.485.035.687,00	4.832.382.950,00
2)	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.462.849.360,00	22.974.200.093,00
Jumlah		28.947.885.047,00	27.806.583.043,00

o. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp27.624.004.334,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp35.866.453.153,02 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.164 Beban Pemeliharaan

No.	Beban Pemeliharaan	Jumlah 2018	Jumlah 2017
1)	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.705.862.509,00	5.808.430.277,02
2)	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.153.037.882,00	4.481.174.827,00
3)	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	20.600.293.443,00	25.170.957.164,00
4)	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	164.810.500,00	405.890.885,00
Jumlah		27.624.004.334,00	35.866.453.153,02



p. Beban Jasa Konsultasi

Jumlah Beban Jasa konsultasi untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp7.144.346.785,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp5.761.449.950,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.165 Beban Jasa Konsultasi

No.	Beban Jasa Konsultasi	Jumlah 2018	Jumlah 2017
1)	Beban Jasa Konsultasi Penelitian	418.281.500,00	397.380.500,00
2)	Beban Jasa Konsultasi Perencanaan	3.874.337.235,00	3.775.134.900,00
3)	Beban Jasa Konsultasi Pengawasan	186.015.000,00	128.577.650,00
4)	Beban Jasa Konsultasi Lainnya	2.665.713.050,00	1.460.356.900,00
Jumlah		7.144.346.785,00	5.761.449.950,00

q. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak ketiga

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 tidak ada dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp502.816.835,00.

r. Beban Beasiswa Pendidikan PNS

Jumlah Beban Beasiswa Pendidikan PNS untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 tidak ada dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp27.000.000, berupa Beban Beasiswa Tugas Belajar S1 sebesar Rp6.000.000,00 dan Beban Beasiswa Tugas Belajar S2 sebesar Rp21.000.000,00.

s. Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

Jumlah Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp4.600.738.699,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp6.105.140.941,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.166 Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis

No.	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	Jumlah 2018	Jumlah 2017
1)	Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	2.955.502.199,00	3.854.201.441,00
2)	Beban Sosialisasi	34.507.000,00	44.199.500,00
3)	Beban Bimbingan Teknis	1.583.859.500,00	2.187.210.000,00
4)	Beban Ujian	26.870.000,00	19.530.000,00
Jumlah		4.600.738.699,00	6.105.140.941,00



t. Beban uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

Jumlah Beban Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp2.239.760.000,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.738.445.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.167 Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

No.	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	Jumlah 2018	Jumlah 2017
1)	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	91.100.000,00	7.000.000,00
2)	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat	2.148.660.000,00	1.731.445.000,00
	Jumlah	2.239.760.000,00	1.738.445.000,00

u. Beban Barang dan Jasa BLUD

Jumlah Beban Barang dan Jasa BLUD untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp173.379.969.046,39 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp166.553.125.172,22. Jumlah Beban Barang dan Jasa BLUD sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp173.379.969.046,39 terdiri dari Beban Barang dan Jasa BLUD Dinkes (puskesmas) sebesar Rp56.898.762.965,39, Beban Barang dan Jasa BLUD RSUD dr Soeselo Slawi sebesar Rp102.819.924.219,00 dan Beban Barang dan Jasa BLUD RSUD Suradadi sebesar Rp13.661.281.862,00.

v. Beban Barang Ekstrakomptabel

Jumlah Beban Barang Ekstrakomptabel untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp19.674.515,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.295.121.493,00

w. Beban Barang Jasa BOS

Jumlah Beban Barang Jasa BOS untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp83.642.707.027,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp86.956.090.047,00

x. Beban Barang dan Jasa Dana BOP PAUD

Jumlah Beban Barang dan jasa Dana BOP PAUD untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp148.800.000,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp120.000.000,00



y. Beban Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli

Jumlah Beban Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp4.903.700.000,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp4.065.595.000,00

3. Beban Bunga

Jumlah Beban Bunga untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 tidak ada dan Tahun Anggaran 2017 tidak ada.

4. Beban Jasa

Jumlah Beban Bunga untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 tidak ada dan Tahun Anggaran 2017 tidak ada.

5. Beban Hibah

Jumlah Beban Hibah untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp92.411.137.642,00 sedangkan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp57.765.178.641,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.168 Beban Hibah

No.	Beban Hibah	Saldo 2018 (Rp)	Saldo 2017 (Rp)
1)	Beban Hibah kepada Pemerintah	10.557.557.342,00	17.806.165.900,00
2)	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	52.100.809.800,00	28.365.300.000,00
3)	Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	29.752.770.500,00	11.593.712.741,00
Jumlah		92.411.137.642,00	57.765.178.641,00

6. Beban Bantuan Sosial

Jumlah Beban Bantuan Sosial untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp20.264.296.500,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp16.837.300.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 169 Beban Bantuan Sosial

No.	Beban Bantuan sosial	Saldo 2018 (Rp)	Saldo 2017 (Rp)
1)	Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	150.000.000,00	524.000.000,00
2)	Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat	19.914.800.000,00	16.313.300.000,00
3)	Beban Bantuan Sosial Barang/Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat/Pihak ketiga	199.496.500,00	0,00
Jumlah		20.264.296.500,00	16.837.300.000,00



7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp201.333.648.287,61 dan Tahun anggaran 2017 Rp174.667.938.110,87 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 170 Beban penyusutan dan Amortisasi

No	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Saldo 2018 (Rp)	Saldo 2017 (Rp)
1)	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	64.404.371.635,41	60.452.869.558,79
2)	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	30.298.740.198,28	23.700.430.236,29
3)	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	106.259.529.582,00	90.177.508.335,00
4)	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	371.006.871,92	337.129.980,79
JUMLAH		201.333.648.287,61	174.667.938.110,87

8. Beban Penyisihan Piutang

Jumlah Beban Penyisihan Piutang untuk Tahun 2018 sebesar Rp7.518.154.624,49 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp4.624.916.594,44 merupakan penyisihan piutang Kabupaten Tegal 2018 yang terdapat pada 9 (sembilan) OPD dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 171 Beban Penyisihan Piutang

No	SKPD	Saldo 2018 (Rp)	Saldo 2017 (Rp)
1)	RSUD dr Soeselo	3.328.604.033,00	948.819.334,00
2)	RSUD Suradadi	501.391.317,00	247.090.577,00
3)	Dinas Perhubungan	375.075.427,50	198.372.318,47
4)	Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	36.728.188,87	40.450.613,25
5)	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	0,00	5.991.900,00
6)	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	12.458.250,00	16.937.250,00
7)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	15.075.250,00	0,00
8)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	676.282.856,84	222.377.108,58
9)	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.572.539.301,28	2.944.877.493,14
JUMLAH		7.518.154.624,49	4.624.916.594,44

9. Beban Transfer

Jumlah Beban Transfer untuk tahun 2018 sebesar Rp447.935.121.964,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp162.326.445.464,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 5. 172 Beban Transfer

No	Beban Transfer	Saldo 2018 (Rp)	Saldo 2017 (Rp)
a.	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	7.385.046.100,00	7.799.361.400,00
b.	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	1.627.402.000,00	2.180.822.100,00
c.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	437.853.770.000,00	151.346.520.004,00
d.	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.068.903.864,00	999.741.960,00
	JUMLAH	447.935.121.964,00	162.326.445.464,00

5.4.2. KEGIATAN NON OPERASIONAL

5.4.2.1. Defisit Non Operasional

Jumlah Defisit Non Operasional ini merupakan defisit atas penghapusan aset yaitu sebesar nilai buku aset saat dihapuskan, untuk tahun 2018 sebesar Rp150.635.660,87 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp22.795.606.781,14.

5.4.3. POS LUAR BIASA

5.4.2.1. Beban Luar Biasa

Pos beban Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta diluar kendali entitas pemerintah daerah. Beban luar biasa Tahun 2018 sebesar Rp4.136.076.000,00 dan tahun anggaran 2017 sebesar Rp7.691.783.916,00 merupakan beban yang berasal dari belanja tidak terduga, rincian realisasi belanja tak terduga dijelaskan di dalam penjelasan Laporan Realisasi Anggaran.

5.5. Laporan Perubahan Ekuitas

Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.5.1. Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal Tahun 2018 sebesar Rp2.956.695.141.967,63

5.5.2. Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit-LO merupakan saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan sebesar Rp192.523.574.531,11



5.5.3. Koreksi-koreksi

Koreksi-koreksi yang menambah ekuitas sebesar Rp2.476.751.238,70 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Koreksi nilai Persediaan yang Menambah Persediaan sebesar Rp206.465.500,00
2. Koreksi piutang sebesar (Rp214.606.182,00) yang menambah ekuitas sebesar Rp10.017.160,00, koreksi yang mengurangi nilai ekuitas sebesar Rp224.623.342,00
3. Koreksi penyisihan piutang yang menambah ekuitas sebesar Rp189.965.368,05
4. Koreksi aset tetap yang menambah ekuitas sebesar Rp59.092.578,00
5. Koreksi akumulasi penyusutan aset tetap yang menambah ekuitas sebesar Rp2.158.587.189,25
6. Koreksi Investasi Jangka Panjang yang mengurangi nilai ekuitas sebesar Rp390.000.000,00
7. Koreksi kewajiban jangka pendek yang menambah ekuitas sebesar Rp449.432.684,00
8. Koreksi ekuitas lainnya yang menambah ekuitas sebesar Rp17.814.101,40

5.5.4. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir sebesar Rp3.151.695.467.737,44 merupakan jumlah Ekuitas Awal ditambah dengan Surplus/Defisit – LO ditambah dengan koreksi-koreksi

5.6. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi arus penerimaan kas dan pengeluaran kas Bendahara Umum Daerah (BUD) selama Tahun 2018 dan 2017, meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan, Aktivitas Pembiayaan dan Aktivitas Non Anggaran. Saldo akhir kas TA 2018 sebesar Rp59.877.097.965,82 dan TA 2017 sebesar Rp106.954.093.495,80 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Tabel 5.173 Laporan Arus Kas

Arus Kas dari :	2018 Realisasi (Rp)	2017 Realisasi (Rp)
1. Aktivitas Operasi	366.369.820.127,62	435.128.462.477,20
2. Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(417.437.645.655,00)	(437.758.902.809,00)
3. Aktivitas Pembiayaan	4.173.768.991,00	(10.507.120.625,00)
4. Aktivitas Non Anggaran	22.130.968,40	(38.512.246,00)
Kenaikan /Penurunan Kas	(46.871.925.567,98)	(13.176.073.202,80)
Saldo Awal Kas	106.523.127.049,80	119.699.200.252,60
Saldo Akhir Kas	59.651.201.481,82	106.523.127.049,80
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	20.199.984,00	38.512.246,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	205.696.500,00	392.454.200,00
Saldo Akhir Kas	59.877.097.965,82	106.954.093.495,80

5.6.1. Arus Kas dari Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi tahun 2018 surplus sebesar Rp366.369.820.127,62 dan tahun 2017 surplus sebesar Rp435.128.462.477,20 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya.

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar dengan sebagai berikut:

Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp2.524.007.301.234,62 dan Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp2.450.374.097.930,20 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 174 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas	2018 (Rp)	2017 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	106.989.918.258,00	97.179.813.740,00
Pendapatan Retribusi Daerah	18.066.219.045,00	19.654.670.695,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.576.924.389,00	25.475.140.654,00
Lain-lain PAD yang Sah	234.290.995.782,62	232.829.086.062,20



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Arus Masuk Kas	2018 (Rp)	2017 (Rp)
Dana Bagi Hasil Pajak	21.232.470.187,00	29.750.032.332,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	8.188.805.102,00	8.610.348.281,00
Dana Alokasi Umum	1.144.494.182.000,00	1.141.687.714.000,00
Dana Alokasi Khusus	339.287.872.985,00	325.623.713.089,00
Dana Penyesuaian	0,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	317.703.162.997,00	234.026.299.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	167.207.542.937,00	164.221.871.495,00
Bantuan Keuangan dari pemerintah daerah provinsi lainnya	10.472.690.000,00	17.648.608.000,00
Pendapatan Hibah	143.496.517.552,00	153.666.800.582,00
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	2.524.007.301.234,62	2.450.374.097.930,20

Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp2.157.637.481.107,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp2.015.245.635.453,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.175 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas	2018 (Rp)	2017 (Rp)
Belanja Pegawai	1.108.018.481.665,00	1.033.229.512.409,00
Belanja Barang	484.444.957.020,00	506.026.267.768,00
Bunga	0,00	0,00
Subsidi	0,00	0,00
Hibah	92.525.895.948,00	55.420.678.906,00
Bantuan Sosial	20.264.296.500,00	16.837.300.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	439.235.325.874,00	386.059.908.954,00
Belanja Tak Terduga	4.136.076.000,00	7.691.783.916,00
Bagi Hasil Pajak	7.385.046.100,00	7.799.361.400,00
Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	1.627.402.000,00	2.180.822.100,00
<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>	2.157.637.481.107,00	2.015.245.635.453,00



5.6.2. Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan

Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan tahun 2018 defisit sebesar Rp417.437.645.655,00 dan tahun 2017 defisit sebesar Rp437.758.902.809,00 mencerminkan adanya pengadaan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah di masa yang akan datang. Dalam tahun 2015 tidak terdapat arus kas masuk dari aktivitas investasi aset non keuangan. Arus kas bersih aktivitas investasi aset nonkeuangan merupakan selisih dari arus masuk kas dengan arus keluar kas yang terdiri dari :

Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp545.376.280,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini ;

Tabel 5.176 Arus Masuk Kas Dari Investasi Aset Non Keuangan

Arus Masuk Kas	2018 (Rp)	2017 (Rp)
Pendapatan Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	230.989.000,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	41.247.280,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.100.000,00	0,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	28.520.000,00	0,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	238.520.000,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	545.376.280,00	0,00

Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp417.983.021.935,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp437.758.902.809,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.177 Arus Keluar Kas Dari Investasi Aset Non Keuangan

Arus Keluar Kas	2017 (Rp)	2016 (Rp)
Belanja Tanah	3.148.086.385,00	9.082.599.234,00
Belanja Peralatan dan Mesin	96.724.967.692,00	81.344.975.420,00
Belanja Gedung dan Bangunan	109.978.782.599,00	98.542.968.351,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	206.618.577.009,00	244.257.718.104,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.512.608.250,00	4.530.641.700,00
Jumlah Arus Keluar Kas	417.983.021.935,00	437.758.902.809,00

5.6.3. Arus Kas dari Aktifitas Pembiayaan

Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan tahun 2018 surplus sebesar Rp4.173.768.991,00 dan tahun 2017 defisit sebesar Rp10.507.120.625,00 mencerminkan adanya pengeluaran pemerintah yang terkait dengan arus kas di masa yang akan datang. Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan



merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar atas aktivitas pembiayaan, yaitu:

Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp13.051.768.991,00 dan Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp13.433.879.375,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 178 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus Masuk Kas	2018 (Rp)	2017 (Rp)
Pencairan Dana Cadangan	12.840.541.100,00	13.159.458.900,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Perguliran Modal	211.227.891,00	274.420.475,00
Jumlah Arus Masuk Kas	13.051.768.991,00	13.433.879.375,00

Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp8.878.000.000,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp23.941.000.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 179 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus Keluar Kas	2018 (Rp)	2017 (Rp)
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	10.000.000.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	8.849.000.000,00	13.941.000.000,00
Pengembalian Biaya Administrasi Pembukaan Rekening BLUD Puskesmas	29.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	8.878.000.000,00	23.941.000.000,00

5.6.4. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran mencerminkan saldo penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran. Realisasi aktivitas non anggaran TA 2018 sebesar Rp22.130.968,40 dan TA 2017 sebesar (Rp38.512.246,00) dengan rincian sebagai berikut:

Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp148.198.309.962,00 dan Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp146.734.662.108,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Tabel 5.180 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Arus Masuk Kas	2018 (Rp)	2017 (Rp)
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		
~ Iuran wajib Pegawai	46.818.437.919,00	48.684.552.834,00
~ Tabungan Uang Muka Perumahan	911.625.000,00	958.069.000,00
~ Subsidi Askes	14.141.847.044,00	14.701.607.409,00
~ Pajak Penghasilan pasal 21 Karyawan	35.753.653.279,00	34.259.309.776,00
~ Pajak Penghasilan pasal 22	1.204.220.160,00	1.002.790.079,00
~ Pajak Penghasilan pasal 23	373.803.938,00	1.873.960.429,00
~ Pajak Penghasilan pasal 25	0,00	0,00
~ Pajak Penghasilan pasal 4 (2)	6.901.105.751,00	5.179.273.204,00
~ Pajak Penghasilan pasal 26	0,00	0,00
~ Pajak PPn	38.747.250.463,00	37.675.837.602,00
~ BPJS Ketenagakerjaan	3.307.854.162,00	2.399.261.775,00
Penerimaan Kiriman Uang (R/K SKPD)	38.512.246,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	148.198.309.962,00	146.734.662.108,00

Penerimaan Kiriman Uang (R/K SKPD) sebesar Rp38.512.246,00 merupakan Sisa Uang Persediaan (UP) TA 2017 pada Bendahara Pengeluaran SKPD, yang baru disetor kembali ke rekening umum BUD dalam Tahun 2018.

Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp148.176.178.993,60 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp146.773.174.354,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.181 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Arus Keluar Kas.	2018 (Rp)	2017 (Rp)
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		
~ Iuran wajib Pegawai	46.818.437.919,00	48.684.552.834,00
~ Tabungan Uang Muka Perumahan	911.625.000,00	958.069.000,00
~ Subsidi Askes	14.141.847.044,00	14.701.607.409,00
~ Pajak Penghasilan pasal 21 Karyawan	35.753.653.279,00	34.259.309.776,00
~ Pajak Penghasilan pasal 22	1.204.220.160,00	1.002.790.079,00
~ Pajak Penghasilan pasal 23	373.803.938,00	1.873.960.429,00
~ Pajak Penghasilan pasal 25	0,00	0,00
~ Pajak Penghasilan pasal 4 (2)	6.901.105.751,00	5.179.273.204,00
~ Pajak Penghasilan pasal 26	0,00	0,00
~ Pajak PPn	38.747.250.463,00	37.675.837.602,00
~ BPJS Ketenagakerjaan	3.307.854.162,00	2.399.261.775,00
Pengeluaran Kiriman Uang (R/K SKPD)	20.199.984,00	38.512.246,00
~ Koreksi atas Kas BOS	(3.818.706,40)	
Jumlah Arus Keluar Kas	148.176.178.993,60	146.773.174.354,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Pengeluaran Kiriman Uang (R/K SKPD) sebesar Rp20.199.984,00 merupakan Sisa Uang Persediaan (UP) TA 2018 pada Bendahara Pengeluaran SKPD, yang baru disetor kembali ke rekening umum BUD dalam Tahun 2019.

Posisi Kas akhir TA 2018 sebesar Rp59.877.097.965,82 dan TA 2017 sebesar Rp106.954.093.495,80 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 182. Saldo Akhir Kas

Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
Kenaikan /Penurunan Kas	(46.871.925.567,98)	(13.176.073.202,80)
Saldo Awal Kas BUD	82.457.061.138,00	86.150.190.721,00
Saldo Awal Kas di BLUD	21.043.264.770,80	33.549.009.531,60
Saldo Awal Kas BOS	3.022.801.141,00	
Saldo Akhir Kas BUD	59.651.201.481,82	106.523.127.049,80
Saldo Akhir Kas BUD (Kas Daerah)	41.645.810.899,00	82.457.061.138,00
Saldo Akhir Kas di BLUD	15.923.709.895,82	21.043.264.770,80
Saldo Akhir Kas BOS	2.081.680.687,00	3.022.801.141,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	20.199.984,00	38.512.246,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	205.696.500,00	392.454.200,00
Saldo Akhir Kas	59.877.097.965,82	106.954.093.495,80



BAB VI INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. GAMBARAN UMUM DAERAH

Kondisi umum Kabupaten Tegal dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Tegal dengan ibu kota Slawi merupakan salah satu kabupaten di wilayah pesisir utara bagian barat Propinsi Jawa Tengah yang berada pada persilangan arus transportasi Semarang-Tegal-Jakarta dan Jakarta-Tegal-Purwokerto, dengan batas-batas wilayah sebelah Utara Kota Tegal dan Laut Jawa, sebelah Timur Kabupaten Pemalang, sebelah Barat Kabupaten Brebes, sebelah Selatan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas. Secara geografis terletak antara $108^{\circ}57'6''$ s/d $109^{\circ}21'30''$ Bujur Timur dan $6^{\circ}50'41''$ s/d $7^{\circ}15'30''$ Lintang Selatan.

Wilayah Kabupaten Tegal terdiri dari daratan seluas 87.878,56 ha dan lautan seluas 121,50 km². Panjang garis pantai 30 km dan panjang perbatasan darat dengan daerah lain adalah 27 Km. Wilayah daratan mempunyai kemiringan bervariasi, mulai dari yang datar hingga yang sangat curam, secara topografis wilayah Kabupaten Tegal terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu :

- Daerah pantai, dengan kemiringan lahan tipe datar/pesisir ($0-2^{\circ}$) seluas 24.547,52 ha meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja;
- Daerah dataran rendah, dengan kemiringan lahan tipe bergelombang/dataran ($2-15^{\circ}$) seluas 35.847,22 ha meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah;
- Daerah dataran tinggi/pegunungan, dengan kemiringan lahan tipe curam/berbukit-bukit ($15-40^{\circ}$) seluas 20.383,84 ha dan tipe sangat curam/pegunungan ($>40^{\circ}$) seluas 7.099,97 ha meliputi Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulang, Bumijawa, Bojong, sebagian Pangkah dan Kedungbanteng.

Kabupaten Tegal beriklim tropis, dengan rata-rata curah hujan sepanjang sebesar 134,94 mm, suhu udara rata-rata setiap tahunnya berkisar pada $27,30 - 28^{\circ}\text{C}$, dengan kelembaban udara rata-rata 67-81,7 %, tekanan udara rata-ratanya adalah 1.009,7 mb, kecepatan angin rata-ratanya adalah 1,6 - 3 knot dan Sinar matahari rata-ratanya 41.603 joule/cm² serta penguapan rata-ratanya 154,4 mm/tahun.

Secara administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986, Kabupaten Tegal terdiri dari 18 kecamatan, 281 desa, 6 kelurahan, yaitu :



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Kecamatan Margasari (13 desa), Kecamatan Bumijawa (18 desa), Kecamatan Bojong (17 desa), Kecamatan Balapulang (20 desa), Kecamatan Pagerbarang (13 desa), Kecamatan Lebaksiu (15 desa), Kecamatan Jatinegara (17 desa), Kecamatan Kedungbanteng (10 desa), Kecamatan Pangkah (23 desa), Kecamatan Slawi (5 desa, 5 kelurahan), Kecamatan Dukuhwaru (10 desa), Kecamatan Adiwerna (21 desa), Kecamatan Dukuhturi 18 desa), Kecamatan Talang (19 desa), Tarub (20 desa), Kecamatan Kramat (19 desa, 1 kelurahan), Kecamatan Suradadi (11 desa), dan Kecamatan Warureja 12 desa).

2. Demografis

Pada tahun 2017 jumlah penduduk Kabupaten Tegal sebanyak 1.433.515 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki 712.511 jiwa dan perempuan 721.004 jiwa, dengan sex ratio sebesar 98,82 %. Rata-rata kepadatan penduduk sebesar 1.631 jiwa/km² dan laju pertumbuhan penduduk tahun 2017 sebesar 0,29. Kecamatan yang berpenduduk paling banyak adalah Kecamatan Adiwerna yaitu 119.751 jiwa, dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Kedungbanteng 40.440 jiwa. *(BPS)

3. Perekonomian

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2016 (juta rupiah) sebesar 27.727.792,98. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha pada tahun 2016 (juta rupiah) sebesar 21.265.717,23.

Perekonomian Kabupaten Tegal pada tahun 2016 mengalami percepatan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha Kabupaten Tegal tahun 2016 menurut harga konstan mencapai 6,37 persen, sedangkan tahun 2015 sebesar 5,45 persen. Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha Kabupaten Tegal tertinggi berdasarkan harga konstan dicapai oleh kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,40 persen.

Adapun kategori-kategori lainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan yang positif, diantaranya kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 3,63 persen, kategori pertambangan dan penggalan sebesar 6,75 persen, kategori industri pengolahan sebesar 7,73 persen, kategori pengadaan listrik dan gas sebesar 0,37 persen, kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 1,27 persen, kategori konstruksi sebesar 5,35 persen, kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 5,19 persen, kategori transportasi dan pergudangan sebesar 7,40 persen, kategori informasi dan komunikasi sebesar 7,60 persen, kategori jasa keuangan dan asuransi sebesar 7,19 persen, kategori real estate sebesar 7,83 persen, kategori jasa perusahaan sebesar 8,43 persen, kategori administrasi, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 2,96 persen, kategori jasa pendidikan sebesar 9,43 persen, kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 6,93 persen dan kategori jasa lainnya sebesar 4,37 persen.



Pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku (ribu rupiah) tahun 2017 sebesar 19.398,60 sedangkan pertumbuhan pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku sebesar 8,01 persen. Pendapatan per kapita atas dasar harga konstan (ribu rupiah) tahun 2017 sebesar 14.877,68 sedangkan pertumbuhan pendapatan per kapita atas dasar harga konstan sebesar 6,03 persen*(BPS tahun 2017)

6.2. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 06 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, telah ditetapkan susunan perangkat daerah yang terdiri dari:

- A. Sekretariat Daerah;
- B. Sekretariat DPRD;
- C. Inspektorat;
- D. Dinas Daerah;
- E. Badan Daerah; dan
- F. Kecamatan

Perangkat daerah tersebut di atas dibentuk dengan susunan sebagai berikut:

- A. Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal ;
- B. Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal;
- C. Inspektorat Daerah Kabupaten Tegal;
- D. Dinas Daerah Kabupaten Tegal, terdiri dari :
 - 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - 2. Dinas Kesehatan
 - 3. Dinas Pekerjaan Umum
 - 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan
 - 5. Satpol PP
 - 6. Dinas Sosial
 - 7. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
 - 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 9. Dinas Lingkungan Hidup
 - 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 12. Dinas Perhubungan
 - 13. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - 14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 15. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
 - 16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
 - 17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 - 18. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
 - 19. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



E. Badan Daerah terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
2. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4. Badan Kepegawaian , Pendidikan dan Pelatihan Daerah

F. Kecamatan terdiri atas:

1. Kecamatan Margasari
2. Kecamatan Bumijawa
3. Kecamatan Bojong
4. Kecamatan Balapulang
5. Kecamatan Pagerbarang
6. Kecamatan Lebaksiu.
7. Kecamatan Jatinegara
8. Kecamatan Kedungbanteng
9. Kecamatan Pangkah
10. Kecamatan Slawi
11. Kecamatan Dukuhwaru
12. Kecamatan Adiwerna
13. Kecamatan Dukuhturi
14. Kecamatan Talang
15. Kecamatan Tarub
16. Kecamatan Kramat
17. Kecamatan Suradadi
18. Kecamatan Warureja

Dalam wilayah kecamatan tersebut dibentuk kelurahan sebagai perangkat kecamatan, yang terdiri dari :

1. Kelurahan Pekembaran
2. Kelurahan Slawi Wetan
3. Kelurahan Procot
4. Kelurahan Kudaile
5. Kelurahan Kagok
6. Kelurahan Dampyak



BAB VII
PENUTUP

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Laporan Arus Kas. Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018.